



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH** **TAHUN 2025**



SAHRUJANI

H. SAHRUJANI
BUPATI HULU SUNGAI UTARA



HERO SETIAWAN

HERO SETIAWAN
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA





KATA PENGANTAR



H. SAHRUJANI
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah, yaitu berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya dan dimulainya proses penyusunan RPJMD periode berikutnya. Dalam masa transisi ini, Pemerintah Kabupaten tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta dokumen perencanaan strategis lainnya.

LKjIP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 menyajikan gambaran mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama satu tahun anggaran, termasuk tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja utama, serta berbagai upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, 30 Maret 2026
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. SAHRUJANI



PERNYATAAN TELAH DI REVIU



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA **INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat No. 5 Amuntai Kode Pos 71414, Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. (0527) 62002 Fax. (0527) 6060003, e-mail : inspektorat.kab.hsu@gmail.com
Website : www.inspektorat.hulusungaiutarakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Amuntai, 30 Maret 2026

Inspektur
Kabupaten Hulu Sungai Utara



FAHRUDIN, S.Hut, MS, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19691024 199603 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada pencapaian Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Capaian pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah di analisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasarkan target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya, serta membandingkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan ini menyajikan uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja utama.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam masa transisi antara RPD 2023–2026 dan RPJMD 2025–2029. Tahun 2025 menjadi tahun strategis karena merupakan fase awal implementasi RPJMD baru, sekaligus kelanjutan target-target dalam RPD.

Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik pada sebagian besar indikator utama.

- Indikator reformasi birokrasi menunjukkan capaian melampaui target (>100%), yang mencerminkan keberhasilan peningkatan tata kelola pemerintahan.
- Konektivitas daerah dan cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan capaian mendekati target akhir RPD, menandakan progres pembangunan infrastruktur yang signifikan.
- Beberapa indikator lainnya masih dalam proses pengukuran atau belum optimal, terutama pada sektor SDM dan lingkungan hidup, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD, sebagian besar indikator telah mencapai lebih dari 80%, yang menunjukkan bahwa pembangunan daerah berada pada jalur yang tepat.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan



tingkat penyerapan yang cukup tinggi pada sebagian besar misi pembangunan. Terdapat misi dengan efektivitas tinggi, di mana capaian kinerja melampaui target dengan dukungan anggaran yang optimal. Namun demikian, terdapat pula misi dengan efektivitas rendah, ditandai dengan besarnya anggaran yang belum diikuti capaian kinerja yang sepadan. Selain itu, masih ditemukan indikator yang belum dapat diukur secara optimal karena keterbatasan data.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan anggaran telah berjalan baik, diperlukan penguatan prinsip *money follow program* dan *money follow result*. Sebagai upaya perbaikan dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas kinerja pada periode RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melakukan:

- Penguatan implementasi SAKIP berbasis hasil (outcome-oriented)
- Reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan
- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- Percepatan transformasi digital melalui penguatan SPBE
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur
- Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

Masa transisi dari RPD 2023–2026 menuju RPJMD 2025–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil, guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prestasi kinerja yang telah berhasil diraih merupakan kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama *stakeholder*, dengan semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sedangkan kekurangan yang ada, merupakan semangat pemacu untuk perbaikan di tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. ORGANISASI PEMERINTAHAN.....	I-3
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. PERENCANAAN KINERJA	
1. Perencanaan Kinerja Pada Awal Tahun 2025.....	II-1
2. Perencanaan Kinerja Perubahan pada Tahun 2025	II-6
B. PERJANJIAN KINERJA	
1. Perjanjian Kinerja pada Awal Tahun 2025.....	II-14
2. Perjanjian Kinerja Perubahan pada Tahun 2025	II-16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026	
1. Tujuan 1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.....	III-2
Sasaran 1.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	III-5
Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	III-14
Sasaran 1.3 Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	III-17
Sasaran 1.4 Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-18
Sasaran 1.5 Meningkatnya Pengendalian Penduduk	III-18
Sasaran 1.6 Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	III-19
Sasaran 1.7 Meningkatnya Keharmonisan Kehidupan Sosial, Agama di Masyarakat	III-20
Sasaran 1.8 Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis	III-21
2. Tujuan 2 Meningkatnya Perekonomian Daerah	III-21
Sasaran 2.1 Meningkatnya Produksi Pertanian, Perdagangan,	



Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Jasa.....	III-31
Sasaran 2.2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.....	III-40
Sasaran 2.3 Meningkatnya Sektor Pariwisata	III-42
Sasaran 2.4 Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu di serap Lapangan Kerja	III-44
Sasaran 2.5 Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	III-48
3. Tujuan 3 Menurunnya Angka Kemiskinan	III-49
Sasaran 3.1 Penurunan Kemiskinan	III-49
4. Tujuan 4 Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar	III-51
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	III-51
Sasaran 4.2 Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik...	III-54
Sasaran 4.3 Meningkatnya Jaringan Interkoneksi Daerah	III-55
Sasaran 4.4 Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	III-56
5. Tujuan 5 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	III-57
Sasaran 5.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah .	III-58
Sasaran 5.2 Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	III-59
6. Tujuan 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	III-61
Sasaran 6.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-61
Sasaran 6.2 Meningkatnya Kesesuaian Peruntukkan Lahan	III-61
Sasaran 6.3 Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	III-63
Sasaran 6.4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana.....	III-63
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2025-2029	
1. Tujuan 1 Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Stabil	III-66
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB...	III-77
Sasaran 1.2 Meningkatnya Investasi dan Kewirausahaan	III-83
Sasaran 1.3 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran.....	III-89
Sasaran 1.4 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Perdesaan	III-98
2. Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	III-100
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	III-107
Sasaran 2.2 Meningkatnya Keharmonisan Sosial	III-123
Sasaran 2.3 Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pengarusutamaan Gender.....	III-124
3. Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur	III-125



Sasaran 3.1 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	III-126
Sasaran 3.2 Meningkatnya Konektivitas Daerah	III-127
4. Tujuan 4 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi	III-129
Sasaran 4.1 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	III-134
Sasaran 4.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Prima	III-142
Sasaran 4.3 Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	III-148
5. Tujuan 5 Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah	III-149
Sasaran 5.1 Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	III-152
Sasaran 5.2 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	III-156
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	III-158
2. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja	III-160

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	IV-1
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS	IV-5

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara	I-4
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.....	II-4
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026	II-6
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.....	II-11
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	II-13
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	III-2
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia	III-3
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023-2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026.....	III-3
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	III-5
Tabel 3.5	Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten HSU dengan Capaian RPD Tahun 2026	III-7
Tabel 3.6	Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian RPD Tahun 2026.....	III-8
Tabel 3.7	Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian RPD Tahun 2026 .	III-8
Tabel 3.9	Capaian terhadap Target Indikator Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025	III-14
Tabel 3.10	Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Target RPD Tahun 2026.....	III-15
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Indeks Desa Membangun.....	III-17
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	III-18
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk	III-19
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif.....	III-19
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Angka Kriminalitas.....	III-20
Tabel 3.16	Realisasi Indikator Jumlah Konflik Sosial	III-21
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah.....	III-21
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-22



Tabel 3.19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2025.....	III-29
Tabel 3.20 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2025.....	III-30
Tabel 3.21 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Jasa.....	III-31
Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja sasaran dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-32
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah	III-40
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	III-40
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Akhir Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata.....	III-42
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Sektor Pariwisata dengan Kabupaten Sekitar, dan Provinsi Kalimantan Selatan.....	III-43
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Akhir Sasaran Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu di Serap Lapangan Kerja	III-44
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu di Serap Lapangan Kerja dengan Kabupaten Sekitar, dan Provinsi Kalimantan Selatan Serta Nasional	III-45
Tabel 3.29 Realisasi Indikator Persentase Kemiskinan	III-49
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Persentase Kemiskinan Tahun 2023-2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026	III-50
Tabel 3.31 Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	III-51
Tabel 3.32 Realisasi Perbandingan Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	III-52
Tabel 3.33 Faktor Pembentuk Capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	III-53
Tabel 3.34 Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika.....	III-54
Tabel 3.35 Realisasi Indikator Jumlah desa yang Terjangkau Jaringan Internet (4G).....	III-56
Tabel 3.36 Realisasi Indikator Persentase SKPD yang menerapkan SPBE	III-56
Tabel 3.37 Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	III-58
Tabel 3.38 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	III-58
Tabel 3.39 Realisasi Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	III-60
Tabel 3.40 Capaian Indikator Kinerja Tertib Penataan Ruang	III-61



Tabel 3.41 Realisasi Indikator Indeks Kapasitas Daerah	III-63
Tabe 3.42 Realisasi Indikator Penunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	III-65
Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Stabil.....	III-66
Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Stabil Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-67
Tabel 3.45 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022- 2025.....	III-76
Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	III-77
Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-77
Tabel 3.48 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Investasi dan Kewirausahaan	III-83
Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	III-89
Tabel 3.50 Capaian Kinerja Indikator Indeks Desa Tahun 2025	III-99
Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Desa dengan Tahun Sebelumnya	III-99
Tabel 3.52 Capaian Kinerja Indikator Tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia.....	III-100
Tabel 3.53 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-103
Tabel 3.54 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Capaian Akhir RPJMD Tahun 2030 ...	III-107
Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indikator Penurunan Daerah Rawan Peredaran Narkoba.....	III-120
Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pengarusutamaan Gender	III-124
Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2025...	III-125
Tabel 3.59 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-125
Tabel 3.60 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur	III-126
Tabel 3.61 Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Tahun 2025.....	III-127
Tabel 3.62 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Tahun 2025	



dengan Target Akhir RPJMD.....	III-128
Tabel 3.63 Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025.....	III-129
Tabel 3.64 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-130
Tabel 3.65 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD.....	III-131
Tabel 3.66 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah .	III-134
Tabel 3.67 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai LHE AKIP Daerah Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	III-135
Tabel 3.68 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai LHE AKIP Daerah Tahun 2025 dengan Target RPJMD.....	III-136
Tabel 3.69 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2025.....	III-139
Tabel 3.70 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	III-139
Tabel 3.71 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2025 dengan Target RPJMD	III-140
Tabel 3.72 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	III-142
Tabel 3.73 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	III-142
Tabel 3.74 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	III-143
Tabel 3.75 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target RPJMD.....	III-143
Tabel 3.76 Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2025	III-146
Tabel 3.77 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	III-146
Tabel 3.78 Capaian Indikator Indeks Sistem Merit.....	III-148
Tabel 3.79 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah	III-149
Tabel 3.80 Capaian Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2025	III-150
Tabel 3.81 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	III-152
Tabel 3.82 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025	III-152
Tabel 3.83 Realisasi Capaian Sasaran/Indikator Penunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-154
Tabel 3.84 Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025.....	III-156



Tabel 3.85 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)..... III-159

Tabel 3.86 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. III-160

Tabel 3.87 Efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2025 III-161

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama RPD Tahun 2023-2026..... IV-1

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025-2029..... IV-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	I-3
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara	I-5
Gambar 2.1	Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	II-10
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja pada Awal Tahun 2025	II-15
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	II-17
Gambar 3.1	Pertumbuhan dan distribusi ekonomi beberapa Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun (persen),2025.....	III-25
Gambar 3.2	Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025.....	III-26
Gambar 3.3	Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut lapangan usaha (persen), 2025.....	III-26
Gambar 3.4	Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen Pengeluaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025	III-27
Gambar 3.5	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2023–2025	III-27
Gambar 3.6	Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran (persen), 2025	III-28
Gambar 3.7	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja	III-46
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan.....	III-54
Gambar 3.9	Kegiatan Perbaikan Jaringan Oleh Bidang Egovernment dan Infrastruktur Teknologi Informasi	III-56
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan dalam Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah.....	III-66
Gambar 3.11	Pertumbuhan dan distribusi ekonomi beberapa Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun (persen),2025.....	III-72
Gambar 3.12	Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025.....	III-73
Gambar 3.13	Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut lapangan usaha (persen), 2025	III-73
Gambar 3.14	Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen Pengeluaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025	III-74
Gambar 3.15	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2023–2025	III-74
Gambar 3.16	Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran (persen), 2025	III-75
Gambar 3.17	Realisasi Capaian Kinerja Rasio Kewirausahaan Kabupaten Hulu Sungai	



Utara Tahun 2021- 2025.....	III-85
Gambar 3.17 Realisasi Capaian Kinerja Rasio Kewirausahaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025.....	III-91
Gambar 3.18 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2025	III-92
Gambar 3.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara 2021- 2025..	III-93
Gambar 3.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2025.....	III-93
Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021- 2025.....	III-101
Gambar 3.22 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2025.....	III-102
Gambar 3.23 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025 ..	III-108
Gambar 3.24 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025.....	III-108
Gambar 3.25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025 ..	III-110
Gambar 3.26 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025.....	III-110
Gambar 3.27 Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025.....	III-113
Gambar 3.28 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025.....	III-113
Gambar 3.29 Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025	III-116
Gambar 3.30 Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025	III-117
Gambar 3.31 Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian dan Pendampingan dengan SKPD.....	III-134
Gambar 3.32 Kegiatan Asistensi Penyusunan Pohon Kinerja dengan Kementerian.....	III-138
Gambar 3.33 Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Kalsel dan Sosialisasi Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	III-145



Gambar 3.34 Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air dan Kualitas Udara Tahun

2025 III-155



BAB

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penetapan kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang memiliki arti strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berada pada masa transisi antara berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya dengan penyusunan dan penetapan RPJMD periode berikutnya. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tetap menjaga kesinambungan arah pembangunan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun kebutuhan masyarakat daerah.

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan



pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pada masa transisi ini, pelaksanaan pembangunan daerah tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah.

Selain itu, masa transisi RPJMD juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap capaian pembangunan pada periode sebelumnya, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pemerintah daerah, capaian indikator kinerja utama, serta berbagai upaya perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Melalui penyusunan LKjIP ini, Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, memperkuat budaya kinerja di lingkungan perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada awal tahun 2025 pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Dilantiknya H. Sahrujani sebagai Bupati dan Hero Setiawan sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 menandai dimulainya pemerintahan jangka menengah yang baru. Pelantikan kepala daerah juga menjadi titik dimulainya proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Perubahan dinamika pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, serta ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 menuntut adanya penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pada seluruh perangkat daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan menjadi pedoman utama dalam penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang harus diimplementasikan secara konsisten dan terukur.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029 disusun sebagai turunan RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan perangkat daerah dalam jangka menengah. Renstra menjadi dasar dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK), sehingga keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dapat terjaga secara utuh.

Penyesuaian atas PK dan Renja Tahun 2025 diperlukan untuk memastikan keselarasan indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra periode terbaru. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, agar pelaksanaan pembangunan daerah lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, penyesuaian PK dan Renja Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai arah kebijakan RPJMD dan Renstra periode terbaru, sekaligus memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

B. ORGANISASI PEMERINTAHAN

Gambar 1.1
Peta Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 907,72 km². Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 192,77 km² atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 22,25 km² atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	136,24	16,53	-	16
2.	Babirik	82,01	8,06	-	23
3.	Sungai Pandan	59,92	6,84	-	33
4.	Amuntai Selatan	149,99	17,58	-	30
5.	Amuntai Tengah	77,09	9,49	5	24
6.	Banjang	110,64	12,27	-	20
7.	Amuntai Utara	37,85	4,24	-	26
8.	Haur Gading	38,96	4,25	-	18
9.	Sungai Tabukan	22,25	2,07	-	17
10	Paminggir	192,77	22,04	-	7
Jumlah		907,72	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2025

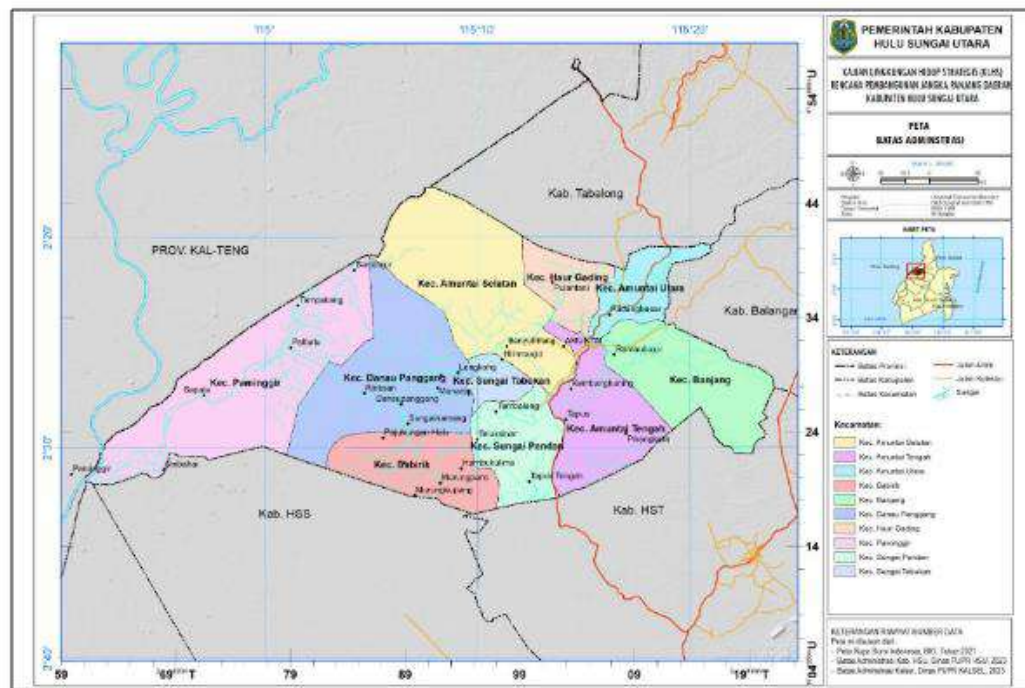
Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki ibukota di Amuntai.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada Gambar 1.2 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045.

Gambar 1.2
Peta Kabupaten Hulu sungai Utara



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Bupati Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil yang disebut Wakil Bupati Hulu Sungai Utara dan organisasi pemerintahan yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun daftar Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
15. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Perpustakaan;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Pendapatan Daerah;
26. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Kecamatan Amuntai Tengah;
30. Kecamatan Amuntai Utara;
31. Kecamatan Amuntai Selatan;
32. Kecamatan Banjarang;
33. Kecamatan Haur Gading;
34. Kecamatan Sungai Pandan;
35. Kecamatan Sungai Tabukan;
36. Kecamatan Babirik;
37. Kecamatan Danau Panggang; dan
38. Kecamatan Paminggir.

**BAB****II****PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. PERENCANAAN KINERJA****1. Perencanaan Kinerja pada Awal Tahun 2025****a) Visi**

Dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 Visi Daerah untuk perencanaan jangka panjang adalah **“RAWA MAKMUR 2025”**, yang mengandung pemahaman “Terciptanya kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara optimal melalui pemanfaatan dan perekayasaan terhadap berbagai potensi sumberdaya alam/biotik berupa hamparan rawa yang luas; potensi sumberdaya manusia; potensi ekonomi; potensi sosial budaya; potensi ruang dan berbagai potensi yang bersifat lokal lainnya, serta kemampuan dalam memanfaatkan peluang internal dan eksternal sehingga dapat membawa kemakmuran bagi segenap masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b) Misi

Guna mewujudkan RAWA MAKMUR 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan melalui berbagai misi yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi Rawa Makmur 2025. Misi-misi ini meliputi :

- 1) **Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ**, yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, terampil, memiliki kemandirian dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupannya, memiliki kualitas kehidupan yang baik, serta tetap memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan yang baik dan diimplementasikan sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) **Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas**, yakni arah pembangunan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju. Secara agregat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang merupakan perwujudan dari transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer



(pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri).

- 3) **Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahan**, dimana arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya dalam menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
- 4) **Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik**, yakni menciptakan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas, yang ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang profesional, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dapat memberi pelayanan yang maksimal yang disertai penegakkan supremasi hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- 5) **Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam**, baik berupa sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari dan berkelanjutan serta mewujudkan pengembangan pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan.

c) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara implementatif, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan yang diinginkan dan hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dan merupakan kelanjutan dari tujuan-tujuan lima tahun sebelumnya meliputi :

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi publik.
- 3) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.
- 4) Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 5) Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.



- 6) Meningkatnya perekonomian daerah.
- 7) Menurunnya angka kemiskinan.
- 8) Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar.
- 9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- 10) Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana.

Atas berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun-tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
2. Terwujudnya pemerintahan yang bebas KKN
3. Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah
4. Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Meningkatnya pengendalian penduduk
11. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
12. Terwujudnya tata kehidupan sosial dan agama yang harmonis
13. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa
14. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
15. Meningkatnya sektor pariwisata
16. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja
17. Penurunan kemiskinan
18. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
20. Meningkatnya kesesuaian peruntukkan lahan
21. Meningkatnya kapasitas lembaga dan masyarakat penanggulangan bencana.

Adapun rincian tujuan dan sasaran tersebut yang dibagi berdasarkan misi-misi yang diemban Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ			
1. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama Sekolah (Tahun)
			2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
			3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Usia Harapan Hidup (tahun)
		3. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	5. Indeks Desa Membangun (IDM)
		4. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			8. Jumlah Perkawinan Anak (orang)
		5. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	9. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		6. Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam pembangunan	10. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)
		7. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	11. Angka Kriminalitas
		8. Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama Yang Harmonis	12. Jumlah Kasus Konflik Sosial
Misi 2 : Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas			
2. Meningkatnya perekonomian daerah	2. Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 3. PDRB Perkapita ADHB (Rp) 4. PDRB Perkapita ADHK (Rp)	9. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	13. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%) 14. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) 15. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%) 16. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) 17. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)
		10. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	18. Indeks ketahanan pangan daerah
		11. Meningkatnya sektor pariwisata	19. Persentase Peningkatan Wisatawan (%)
		12. Meningkatnya	20. Rasio



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian Fiskal (%)
		13. Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu Diserap Lapangan Kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3. Menurunnya angka kemiskinan	5. Persentase kemiskinan	14. Penurunan Kemiskinan	22. Persentase kemiskinan (%)
Misi 3 : Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahan			
4. Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	6. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	15. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	23. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar
		16. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	24. Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan telekomunikasi
		17. Meningkatnya Jaringan Interkoneksi Daerah	25. Persentase desa yang terjangkau jaringan internet (4G)
		18. Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	26. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE
Misi 4 : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik			
5. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	7. Indeks Reformasi Birokrasi	19. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	27. Nilai SAKIP Kabupaten
			28. Opini BPK
			29. Persentase Pencegahan Korupsi (MCP)/ KORSUPGAH
		20. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	30. Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN
Misi 5 : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam			
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	21. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		22. Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan	32. Tertib Penataan Ruang
		23. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	33. Indeks Risiko Bencana
		24. Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	34. Indeks Kapasitas Daerah

Sumber : RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

d) Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pimpinan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Berikut adalah Indikator



Kinerja Utama yang diambil dari indikator sasaran strategis RPD 2023 – 2026 berikut.

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH (IKU)	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				TARGET KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,23	4,05	5,05	6,05	6,05	6,05
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,83	6,73	6,63	6,53	6,43	6,43
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,60
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,12	66,88	67,26	67,64	68,02	68,02
5	Indeks Reformasi Birokrasi	54,04 (CC)*	55 (CC)	60 (B)	65 (B)	70 (B)	70 (B)
6	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	20.648,74	20.751,98	20.855,23	20.958,47	21.061,71	21.061,71
7	Pengeluaran Perkapita (Rp)	9.644,00	9.761,00	9.891,00	10.021,00	10.151,00	10.151,00
8	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	21 - 40 (sedang)	41 - 60 (cukup)	61 - 80 (baik)	61 - 80 (baik)
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	65,46	65,87	66,67	67,08	67,08

Sumber : RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

2. Perencanaan Kinerja Perubahan pada Tahun 2025

Perencanaan perubahan pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2025. Dalam rangka menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan dinamika perkembangan kebijakan nasional, kondisi daerah, serta kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru yang bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, sasaran strategis, program serta visi misi kepala daerah yang baru tetap relevan dan responsif terhadap pembangunan daerah.

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan sebagai berikut.



a) Visi

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 adalah:

HSU BANGKIT

(Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul dan Kreatif)
sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan

Pokok-pokok visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

- a. **Berkeadilan** berarti adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat di HSU. Ini mencakup distribusi sumber daya yang adil, akses yang merata terhadap layanan publik, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga tanpa distriminasi.
- b. **Unggul** berarti memiliki kualitas dan prestasi yang menonjol dibandingkan dengan daerah lain. Ini mencakup keberhasilan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
- c. **Kreatif** berarti memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menemukan solusi baru yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini mencakup kreativitas dalam pengembangan ekonomi, budaya, teknologi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
- d. **Pusat Agrominapolitan** memiliki makna bahwa HSU akan menjadi pusat agrominapolitan yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang efisien dan berkualitas tinggi. Fasilitas pengolahan akan dibangun untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

b) Misi

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan sinergi perencanaan, maka Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut.

1) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Misi ini berorientasi pada penguatan fondasi ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor agrominapolitan yang terintegrasi dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang, maka pada periode 2025-2029 dilakukan penguatan fondasi transformasi, termasuk transgormasi ekonomi. Upaya hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan UMKM dan koperasi



menjadi prioritas. Tantangan utama adalah bagaimana mempercepat hilirisasi, memperluas pasar, mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, misi ini sejalan dengan tujuan RTRW untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pusat agrominapolitan, serta memperkuat peran daerah sebagai penopang logistik Kalimantan Selatan.

2) Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak, dan Bebas Narkoba

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia sehingga SDM lokal mampu bersaing di tingkat regional. Upaya strategis mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta pencegahan stunting. Pendekatan pembangunan menekankan keadilan gender serta keterlibatan kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.) agar mereka memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan. Selain itu, integrasi nilai-nilai religius, kebudayaan, dan pengendalian narkoba menjadi prioritas agar kualitas SDM tidak hanya unggul secara akademik dan keterampilan, tetapi juga berakhlak mulia. Tantangan kedepan adalah mengurangi kesenjangan layanan dasar terutama bagi daerah terpencil, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

3) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah

Misi ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan dasar, serta mendukung logistik regional. Infrastruktur yang dimaksud antara lain meliputi jalan, transportasi darat dan sungai, sistem air bersih, sanitasi, perumahan layak huni, serta infrastruktur pertanian dan perikanan. Pemenuhan Standar Pelayanan Dasar (SPM) menjadi hal yang diprioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang handal tidak hanya mendorong mobilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan pemerataan pembangunan. Dalam periode pembangunan tahun 2025-2029 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur berkualitas yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

4) Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Misi ini menekankan pada reformasi birokrasi, profesionalitas aparatur sipil negara, serta modernisasi pelayanan publik berbasis digital. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diarahkan agar bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah



masih adanya kesenjangan kapasitas SDM aparatur dan keterbatasan adopsi teknologi digital. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik berbasis digitalisasi dan penguatan budaya kerja profesional dengan sistem merit menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih lanjut, misi ini memastikan tata kelola pemerintahan yang mampu mendorong pembangunan lintas sektor.

5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana

Misi ini menegaskan komitmen daerah pada pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Kebijakan diarahkan pada pengendalian pencemaran, perlindungan kawasan lindung, pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah dengan karakteristik rawa, memiliki kerentanan terhadap banjir, degradasi lahan, dan perubahan iklim, sehingga pengelolaan lingkungan yang bijak dan berbasis kearifan lokal. Misi ini memperkuat dan menjamin komitmen untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus melindungi masyarakat dari risiko lingkungan dan bencana.

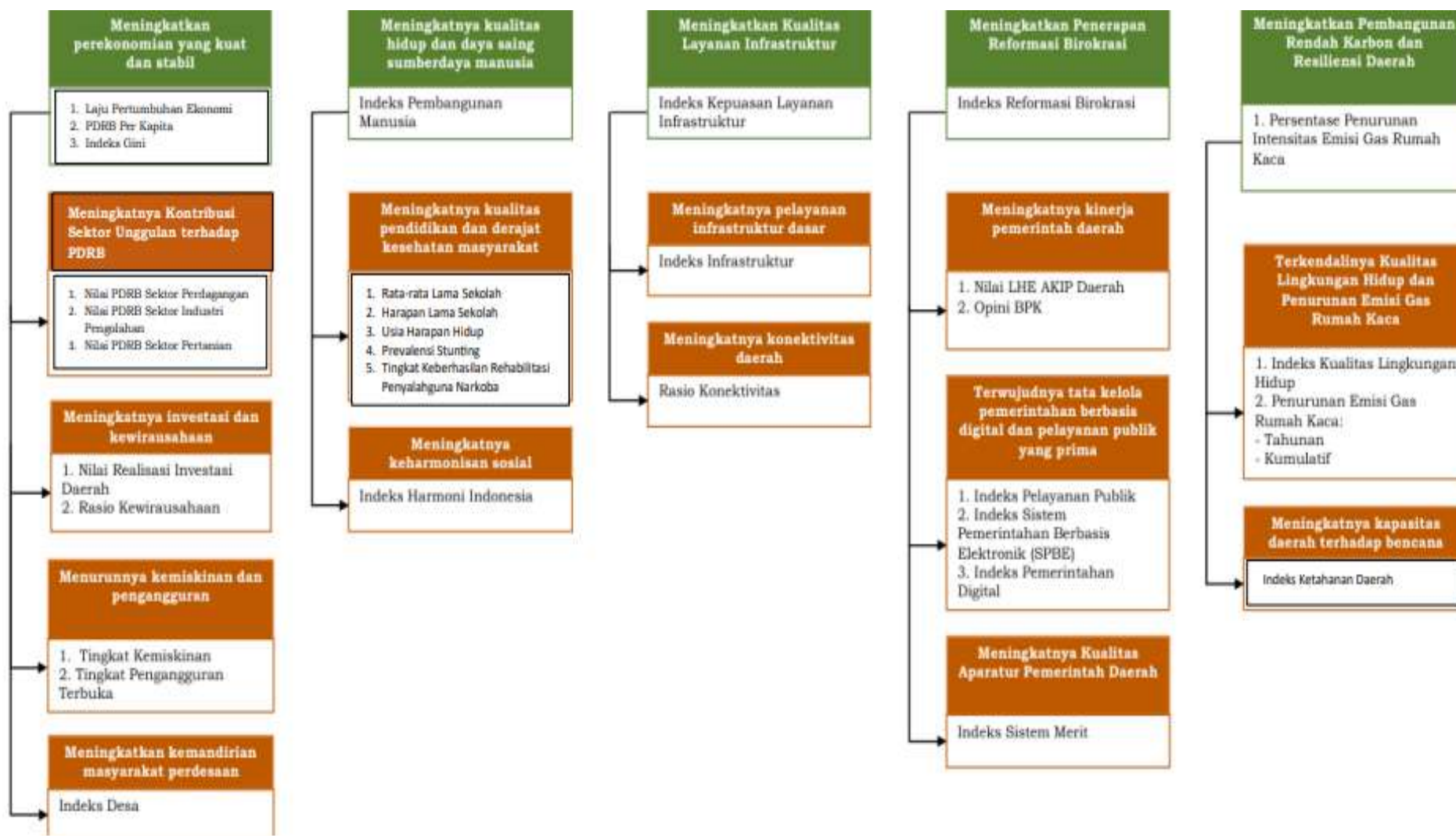
c) Tujuan dan Sasaran

Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan diturunkan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati, yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya daerah tujuan, hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran merupakan hasil penurunan (*cascading*) kinerja. Kinerja ini akan diwujudkan melalui hasil penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama oleh unsur pemerintah dan non pemerintah. Adapun pohon kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 dimuat pada di bawah ini. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dilengkapi dengan indikator dan target kinerja. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur secara bertahap per tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dan sasaran RPJMD dimuat pada tabel di bawah.



Gambar 2.1
Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029



Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	
Visi: HSU BANGKIT (Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul dan Kreatif) sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan			
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing			
1.1	Meningkatkan perekonomian yang kuat dan stabil	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		2	PDRB Per Kapita
		3	Indeks Gini
1.1.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan
		2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan
		3	Nilai PDRB Sektor Pertanian
1.1.2	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	1	Nilai Realisasi Investasi Daerah
		2	Rasio Kewirausahaan
1.1.3	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	1	Tingkat Kemiskinan
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka
1.1.4	Meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan		Indeks Desa
Misi 2: Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak dan Bebas Narkoba			
2.1	Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia		Indeks Pembangunan Manusia
2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah
		2	Harapan Lama Sekolah
		3	Usia Harapan Hidup
		4	Prevalensi Stunting
		5	Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba
2.1.2	Meningkatnya keharmonisan sosial		Indeks Harmoni Indonesia
2.1.3	Meningkatnya kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
		2	Indeks Ketimpangan Gender
Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah			
3.1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
3.1.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar		Indeks Infrastruktur
3.1.2	Meningkatnya konektivitas daerah		Rasio Konektivitas
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik			
4.1	Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi
4.1.1	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	1	Nilai LHE AKIP Daerah



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	
		2	Opini BPK
4.1.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		3	Indeks Pemerintahan Digital
4.1.3	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah		Indeks Sistem Merit
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana			
5.1	Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah	1	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
		2	Indeks Risiko Bencana
5.1.1	Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:
			- Tahunan
			- Kumulatif
5.1.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah

d) Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sekaligus pembangunan daerah, dibutuhkan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai tolok ukur keberhasilan pencapaian target-target pembangunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Adapun IKU pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,43	4,52	4,61	4,70	4,80	4,89	4,99
2	Indeks Gini	Persen	0,266	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,235
3	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar rupiah	1.088,20	1.197,02	1.324,74	1.457,21	1.602,93	1.773,92	1.963,23
4	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	536,61	544,42	552,34	560,37	568,52	576,79	585,18
5	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	1.047,71	1.126,39	1.210,99	1.301,93	1.399,71	1.504,82	1.617,84
6	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Juta Rupiah	24.120	24.361	24.848	25.594	26.618	27.950	28.118
7	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,49	4,72	4,84	4,96	5,07	5,19	5,29
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,75	5,46	5,19	4,93	4,68	4,45	4,23
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73	3,66	3,58	3,51	3,44	3,37	3,30
10	Indeks Desa	Indeks	427,034	432	445	467	494	503	508
11	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,74	72,79-73,87	73,48	74,17	74,87	75,58	76,30
12	Prevalensi Stunting	Persen	27,6	27,40	26,42	25,44	24,46	23,48	22,50
13	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
14	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,61	3,63	3,65	3,66	3,68	3,70	3,72
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,29	70,34	70,40	70,45	70,50	70,56	70,61
16	Nilai LHE AKIP Daerah	Nilai	64,82	66,12	67,44	68,79	70,16	71,57	73,00
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,69	3,78	3,86	3,95	4,02	4,11	4,20
19	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	44,59	50,31	55,04	59,77	64,5	69,23	73,96
20	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	2,21	2,17	2,03	1,89	1,75	1,57
21	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,69	97,67	97,65	97,63	97,61	97,59	97,57
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,50	69,16	69,42	69,67	69,92	70,17	70,42

Sumber : RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029



B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Perjanjian Kinerja Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 tahunan.

Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

1. Perjanjian Kinerja pada Awal Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahapan awal dalam siklus pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah secara terarah, efektif, dan akuntabel. Dokumen perencanaan kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Awal Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta memperhatikan prioritas pembangunan, program strategis daerah dan kebutuhan masyarakat. Melalui penetapan sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target yang terukur, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten dan terkoordinasi guna mencapai hasil pembangunan yang optimal.



Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja pada Awal Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Amuntai, Januari 2025
Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1 Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Nilai SAKIP Kabupaten	8,67,5 Nilai
	2 Opini BPK	WTP
	3 Persentase Penegakan Korupsi (MCPJ/KORSIAS/AM)	78 %
2 Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	4 Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	95 %
3 Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah	5 Jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G)	211 Desa
4 Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	6 Jumlah SKPD yang menerapkan SPBE	33 SKPD
5 Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	7 Jumlah PAD (Rp)	136.294.336,01 Rp.
6 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	8 Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	8,31 Tahun
	9 Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,80 Tahun
	10 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,80 Tahun
7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11 Usia Harapan Hidup (tahun)	65,26 Tahun
8 Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	12 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6919 Nilai
9 Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,00 Nilai
	14 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,02 Nilai
	15 Jumlah Perkawinan Anak (orang)	39 Orang
10 Meningkatnya Pendidikan Penduduk	0,68 %	
11 Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam pembangunan	17 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	75 %
12 Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	18 Jumlah Kasus konflik sosial	0 kasus
13 Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Jasa	19 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	5,09 %
	20 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	5,94 %
	21 Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	2,81 %
	22 Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	7 %
	23 Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	10021 Rp.
14 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	24 Indeks ketahanan pangan daerah	71,05 Nilai
15 Meningkatnya sektor pariwisata	25 Jumlah wisatawan (orang)	106.934 Orang
16 Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	26 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,9 %
17 Penurunan Kemiskinan	27 Persentase kemiskinan	6,53 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
18 Meningkatnya jangkauan dan kualitas Infrastruktur pengisian	28 Indeks Infrastruktur Dasar	41 - 60 (rata-rata)
19 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,92 Nilai
20 Meningkatnya Konservasi perantukan lahan	30 Tertib Pemakaian Ruang	100
21 Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	31 Indeks Kapasitas Daerah	0,38 Nilai

Jumlah Anggaran : Rp. 1.687.020.362.587,-

Amuntai, Januari 2025
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM



2. Perjanjian Kinerja Perubahan pada Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Penetapan RPJMD tersebut membawa perubahan pada visi, misi, tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah agar tetap selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyesuaian Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Proses ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan dinamika kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, perubahan perencanaan kinerja ini diharapkan dapat memperkuat fokus pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang baru.

Melalui penyesuaian perencanaan kinerja ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan sinergi, konsistensi, serta komitmen dalam melaksanakan pembangunan daerah secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHRUJANI
Jabatan : BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Amuntai, 15 September 2025
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
H. SAHRUJANI

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatkan perekonomian yang kuat dan stabil	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,52	Persen
		2 PDRB Per Kapita	28,42	Juta Rupiah
		3 Indeks Gini	0,266	Persen
2	Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,79	Indeks
3	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	3,63	Indeks
4	Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	70,34	Indeks
5	Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah	1 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	2,21	Persen
		2 Indeks Risiko Bencana	97,67	Indeks

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	1.197,02	Miliar rupiah
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	544,42	Miliar rupiah
		Nilai PDRB Sektor Pertanian	1.126,39	Miliar rupiah
2	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	Nilai Realisasi Investasi Daerah	24.361	Juta Rupiah
		Rasio Kewirausahaan	4,72	Rasio
3	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	5,46	Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,66	Persen
4	Meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan	Indeks Desa	432	Indeks
5	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	9,6	Tahun
		Harapan Lama Sekolah	14,25	Tahun
		Usia Harapan Hidup	72,50	Tahun
		Prevalensi Stunting	27,40	Persen
		Penurunan Daerah Rawan Narkoba	140	Jumlah Kelurahan/Desa

6	Meningkatnya keharmonisan sosial	Indeks Harmoni Indonesia	6	Indeks
7	Meningkatnya kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,16	Indeks
		Indeks Ketimpangan Gender	0,445	Indeks
8	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur	0,851	Indeks
9	Meningkatnya konektivitas daerah	Rasio Konektivitas	0,65	Rasio
10	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LHE AKIP Daerah	66,12	Nilai
		Opini BPK	WTP	Opini
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	3,78	Indeks
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	Indeks
		Indeks Pemerintahan Digital	N/A	Indeks
12	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Ment	0,61	Indeks
13	Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,16	Indeks
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:		
		- Tahunan	41.054,95	Ton CO2eq
		- Kumulatif	1.422.849,92	Ton CO2eq
14	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,70	Indeks

Jumlah Anggaran : Rp. 1.931.943.134.250,92

Amuntai, 15 September 2025
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
H. SAHRUJANI

**BAB****III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan laporan Akuntabilitas Kinerja yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pelaksana kebijakan pembangunan di wilayah kewenangannya. Laporan ini tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan, yaitu sejak perencanaan dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja dan selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dalam tahun anggaran 2025, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan Laporan Kinerja Tahun Ketiga dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan merupakan tahun Pertama dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Analisis akuntabilitas kinerja pada laporan ini dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja pembangunan antara dua periode RPD, yaitu RPD periode sebelumnya dan RPJMD periode berjalan. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat keberlanjutan pembangunan daerah, konsistensi pencapaian sasaran strategis, serta efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam RPD periode sebelumnya, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah tujuan dan sasaran strategis pembangunan yang diukur melalui indikator kinerja utama daerah, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian indikator tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, pada RPJMD periode berjalan, pemerintah daerah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang pada prinsipnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari periode sebelumnya. Beberapa indikator kinerja masih dipertahankan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, sementara indikator lainnya disesuaikan



dengan dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan demikian, analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan melalui perbandingan dua periode antara RPD dengan RPJMD memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada periode selanjutnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

yang start perencanaannya dimulai tahun 2024 Target tahun kedua RPD ini selanjutnya dituangkan sebagai target kinerja pada RKPD Tahun 2024. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja dari tujuan terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJPD, dan penjelasan atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran pada tahun kedua RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026.

Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penyempurnaan Indikator RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, Pengukuran Kinerja 2025 dan Pengukuran Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun capaian kinerja mulai dari tujuan, dan sasaran beserta dengan indikatornya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerjanya digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$>100\%$	Sangat Berhasil (SB)
II	$100\% \leq 90\%$	Berhasil (B)
III	$89\% \leq 70\%$	Cukup Berhasil (CB)
IV	$< 70\%$	Kurang berhasil (KB)

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026

1) Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di ukur dengan indikator berikut.



Tabel 3.2
Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Kinerja pada Periode 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,63	70,33	71,12	71,74	67,64	72,67	107,4

a) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan dengan angka mencapai 72,67. Capaian tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja sebesar 107,4% dari target yang ditetapkan sebesar 67,64. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan IPM rata-rata per tahun berada pada kisaran 0,6 hingga 0,9 poin. Keberhasilan mempertahankan tren pertumbuhan ini merupakan implikasi dari efektivitas program kerja strategis serta integrasi inovasi dari perangkat daerah yang difokuskan pada penguatan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023-2025
dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian s/d 2025 Terhadap target RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025		
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	67,64	71,12	71,74	72,67	68,02	106,84

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori Sangat Baik. Keberhasilan melampaui target akhir RPD 2026 sebesar 106,84% mencerminkan keberhasilan strategis dalam penguatan modal manusia. Fokus ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ini agar terus meningkat sekaligus menetapkan standar baru yang lebih tinggi untuk periode perencanaan berikutnya guna mempertahankan status IPM pada level "Tinggi".

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

➤ Upaya yang telah Dilakukan

- Melakukan perluasan program beasiswa daerah, rehabilitasi sarana dan



prasarana pendidikan, serta optimalisasi program pendidikan non-formal (Kejar Paket) guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)

- Meningkatkan kualitas layanan pada BLUD Puskesmas dan RSUD, serta mengintegrasikan program percepatan penurunan *stunting* sebagai upaya strategis dalam meningkatkan angka Usia Harapan Hidup (UHH)
- Menjaga ketahanan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi daerah yang responsif serta penyediaan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro.
- Mengintegrasikan indikator pendidikan dan kesehatan ke dalam dokumen perencanaan desa untuk memastikan anggaran Dana Desa selaras dengan target IPM kabupaten.
- Implementasi sistem antrean *online* dan rekam medik elektronik di RSUD/Puskesmas untuk memangkas waktu tunggu layanan kesehatan.

➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- Masih terdapat kesenjangan kualitas SDM antarwilayah (perkotaan dan perdesaan) yang memengaruhi pemerataan capaian indikator IPM.
- Tantangan dalam mempertahankan tenaga medis spesialis dan tenaga pendidik bersertifikasi di wilayah yang jauh dari pusat kota (kecamatan terpencil).
- Masih adanya sarana pendukung (seperti akses internet untuk sekolah digital) yang belum merata, menghambat akselerasi literasi digital di tingkat pedesaan.
- Belum optimalnya sinkronisasi data lintas sektor (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) ke dalam satu platform monitoring terpadu yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara *real-time*.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Memperluas keterlibatan sektor swasta (CSR) dan pejabat daerah sebagai bapak asuh untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di desa lokus.
- Melaksanakan audit kinerja pada program prioritas pendidikan dan kesehatan untuk memastikan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Mengintensifkan program peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya bagi kelompok usia produktif, guna memperkuat daya saing daerah.
- Transformasi perpustakaan desa menjadi pusat pembelajaran masyarakat berbasis IT untuk meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat.



Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Kinerja Akhir Tahun 2025		
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,75	7,76	7,77	7,78	8,31	8	96,26
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	13,19	13,21	13,80	13,47	97,61
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-		17,29	16,93	13	13,46	103,5

Rumus Perhitungan:

- Angka Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator komposit untuk mengukur tingkat perkembangan literasi masyarakat dari berbagai aspek, mencakup ketersediaan dan keterjangkauan layanan perpustakaan, kualitas koleksi, sumber daya manusia pengelola, serta tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. IPLM mengintegrasikan beberapa komponen, meliputi rasio perpustakaan per satuan penduduk, rasio koleksi buku per kapita, jumlah tenaga pustakawan terlatih bersertifikat, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta proporsi anggaran layanan perpustakaan terhadap APBD.

a) Perbandingan Realisasi dengan Target

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Realisasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun kenaikannya masih tergolong lambat. Realisasi Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 mencapai angka 8,00 tahun, meningkat dari 7,78



tahun pada tahun 2024, namun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 8,31 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi pendidikan menunjukkan tren positif, tantangan dalam menekan laju putus sekolah serta mendorong penyelesaian jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih memerlukan intervensi kebijakan yang selarasa dan komprehensif.

2) Harapan Lama Sekolah

Realisasi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 mencapai 13,47 tahun, yang mengindikasikan bahwa secara rata-rata, anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I atau tahun pertama perguruan tinggi. Dengan tingkat capaian sebesar 97,61%, kinerja ini masuk dalam kategori Sangat Baik dan menunjukkan tren peningkatan yang lebih dinamis dibandingkan tahun 2024 (13,21 tahun). Pencapaian ini merupakan representasi dari keberhasilan program akselerasi aksesibilitas pendidikan serta meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator komposit yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM mengintegrasikan beberapa komponen, antara lain:

- a. rasio perpustakaan per satuan penduduk;
- b. rasio koleksi buku per kapita;
- c. jumlah tenaga pustakawan terlatih;
- d. keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; serta
- e. alokasi anggaran layanan perpustakaan.

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,46, atau mencapai 103,46% dari target yang ditetapkan sebesar 13. Meskipun secara persentase capaian mendekati target, skor tersebut secara kategoris masih berada pada



klasifikasi rendah. Kondisi ini dipengaruhi secara signifikan oleh penyesuaian metodologi perhitungan IPLM yang kini diselaraskan dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pembatasan cakupan pengukuran yang kini difokuskan pada jenjang SD dan SMP berimplikasi pada penyempitan basis populasi secara statistik. Hal ini menghasilkan angka indeks yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, namun memberikan gambaran kinerja yang lebih akurat secara kebijakan. Secara historis, tren IPLM menunjukkan fluktuasi penurunan berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir, dimana realisasi sebesar 17,29 pada tahun 2023 menurun menjadi 16,93 (tahun 2024), dan kembali terkoreksi menjadi 13,46 pada tahun 2025 seiring dengan implementasi kebijakan baru tersebut.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan performa yang sangat progresif pada tahun 2025 dengan kenaikan sebesar 0,22 poin. Capaian ini melampaui pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,01 poin. Dengan realisasi sebesar 8,00 tahun, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mencapai 94,67% dari target akhir yang ditetapkan dalam RPD 2026. Meskipun tren menunjukkan arah positif, diperlukan strategi akselerasi pada sisa periode perencanaan untuk menutup selisih (gap) sebesar 0,45 poin guna memastikan target akhir sebesar 8,45 dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3.5
Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian RPD Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian s/d 2025 Terhadap target RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,31	7,77	7,78	8	8,45	94,67

Akselerasi pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2025 meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,00 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas kini telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SMP atau sedang menempuh kelas 3 SMP.



2) Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan tabel diatas terjadi akselerasi pertumbuhan pada tahun 2025 yang jauh lebih dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Angka 13,47 mencerminkan bahwa rata-rata anak usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I atau tahun pertama Perguruan Tinggi.

Realisasi capaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan kinerja yang progresif dengan capaian sebesar 96,07% terhadap target akhir RPD 2026. Pertumbuhan pada tahun 2025 sebesar 0,26 poin menunjukkan keberhasilan akselerasi program dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,02 poin. Angka realisasi 13,47 ini mengindikasikan semakin kuatnya minat dan akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Diploma/Sarjana), sekaligus menjadi modal penting bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah secara keseluruhan.

Tabel 3.6
Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian RPD Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian s/d 2025 Terhadap target RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,80	13,19	13,21	13,47	14,02	96,07

3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator strategis untuk mengukur ketersediaan sarana prasarana, koleksi, tenaga perpustakaan, serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi.

Tabel 3.7
Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian RPD Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian 2025 Terhadap target RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	17,29	16,93	13,46	13,50	99,70

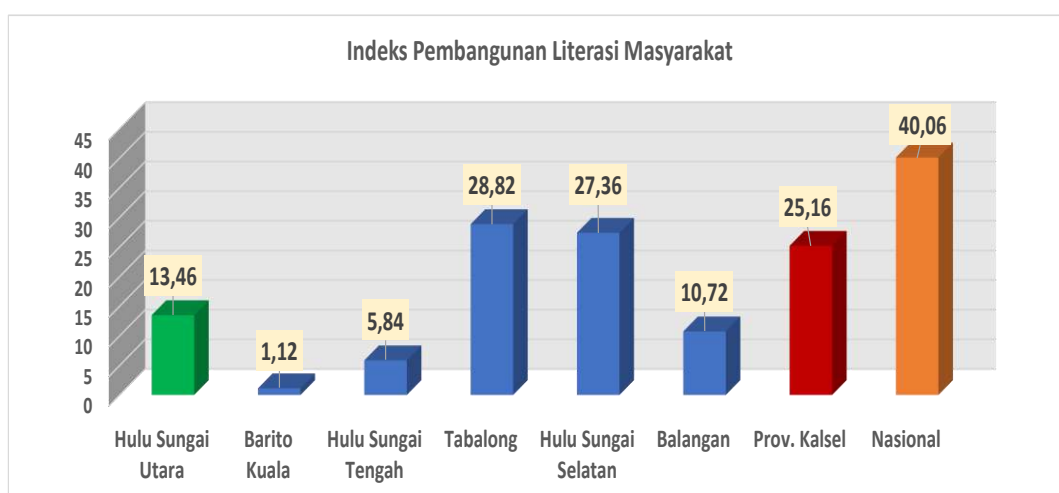
Berdasarkan analisis perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), terdapat penurunan capaian yang cukup signifikan sebesar 3,47 poin atau setara dengan 20,5% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Penurunan tersebut mengindikasikan perlunya peninjauan kembali terhadap variabel pembentuk indeks literasi, khususnya pada aspek pemerataan koleksi perpustakaan, ketersediaan tenaga perpustakaan yang kompeten, serta intensitas keterlibatan masyarakat dalam program literasi. Langkah mitigasi melalui evaluasi variabel-variabel tersebut diharapkan dapat menekan tren penurunan dan mengoptimalkan kembali capaian indikator pada tahun mendatang.

Jika dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 13,50, realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) saat ini yang mencapai 13,46 menunjukkan tingkat capaian akumulatif sebesar 99,70%. Berdasarkan persentase tersebut, kinerja pembangunan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan "Sangat Tinggi/Hampir Tercapai" dalam konteks target jangka menengah.

Meskipun secara tren tahunan terjadi fluktuasi penurunan, secara kumulatif capaian Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mendekati target akhir periode RPD. Pemerintah Daerah hanya memerlukan akselerasi penguatan sebesar 0,04 poin untuk menuntaskan target akhir RPD pada tahun 2026 mendatang. Hal ini menegaskan bahwa fokus kebijakan pada tahun terakhir perencanaan harus diarahkan pada intensifikasi program literasi guna memastikan target jangka menengah terpenuhi sepenuhnya.

Gambar 3.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2025



(Sumber: BPS. 2026)

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5,84) dan Barito Kuala (1,12). Hal



ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan standar pelayanan minimal perpustakaan di HSU relatif lebih berjalan dibandingkan daerah tersebut. Namun, Hulu Sungai Utara masih tertinggal cukup jauh dari Kabupaten Tabalong (28,82), Hulu Sungai Selatan (27,36), dan Balangan (10,72). Selisih yang cukup lebar dengan Tabalong dan HSS (lebih dari 13 poin) mengindikasikan perlunya akselerasi program penguatan literasi di HSU.

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (13,46) masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (25,16) dan Nasional (40,06). Kesenjangan yang signifikan terhadap angka Provinsi dan Nasional mengindikasikan bahwa indikator-indikator pembentuk IPLM seperti ketercukupan koleksi, jumlah tenaga perpustakaan, serta jumlah kunjungan masyarakat—masih perlu dioptimalkan. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu memperkuat sinergi antara Dinas Perpustakaan dengan perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas perpustakaan hingga ke tingkat desa dan mendorong budaya baca melalui inovasi layanan digital.

c) Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Rata-Rata Lama Sekolah

➤ Upaya yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis:

- Penguatan Pendidikan Non-Formal dengan Optimalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM melalui program Paket A, B, dan C untuk menjangkau masyarakat yang sudah lewat usia sekolah formal.
- Pemberian Beasiswa/Bantuan Biaya melalui Penyaluran bantuan operasional pendidikan daerah untuk mengurangi beban biaya personal siswa dari keluarga kurang mampu.
- Sosialisasi Pentingnya Pendidikan dengan melakukan edukasi ke desa-desa mengenai korelasi antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan jangka panjang.

➤ Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa hambatan yang tetap perlu menjadi perhatian adalah:

- Sebagian masyarakat usia produktif cenderung memilih bekerja dini untuk membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan sekolah.
- Kondisi geografis tertentu yang cukup jauh dari pusat pendidikan menengah memicu potensi putus sekolah.
- Masih adanya pandangan bahwa pendidikan dasar dianggap cukup untuk



bekerja di sektor informal/pertanian.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka mengejar target jangka panjang dan mempertahankan tren positif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- Memperkuat sinkronisasi data Dapodik dengan data kependudukan untuk mengidentifikasi individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar secara akurat.
- Mengembangkan platform belajar berbasis digital bagi mereka yang bekerja namun ingin menyelesaikan sekolah.
- Memastikan guru di daerah pelosok mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang setara dengan wilayah perkotaan agar kualitas pembelajaran tetap kompetitif.
- Sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk memastikan transisi siswa SMP ke SMA/SMK berjalan mulus
- Melaksanakan Gerakan Kembali Bersekolah dengan Inisiatif penjemputan anak putus sekolah untuk masuk kembali ke jalur pendidikan formal maupun kesetaraan.
- Menyediakan sarana prasarana sekolah berupa penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif dengan kenaikan sebesar 0,26 poin dari tahun sebelumnya. Angka 13,47 mencerminkan bahwa rata-rata anak usia sekolah di HSU kini memiliki ekspektasi untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I atau tahun pertama Perguruan Tinggi.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

Pemerintah Kabupaten telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong kenaikan Harapan Lama Sekolah, antara lain:

- Pemberian beasiswa daerah dengan penyaluran bantuan biaya pendidikan khusus untuk siswa berprestasi dan kurang mampu guna menjamin keberlanjutan sekolah.
- Perluasan akses SMA/SMK dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pemetaan kebutuhan ruang kelas baru di wilayah yang padat penduduk usia sekolah.
- Sosialisasi masif ke sekolah-sekolah menengah mengenai pentingnya



pendidikan tinggi dalam meningkatkan daya saing di dunia kerja.

➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- Masih terdapat risiko *drop-out* pada fase transisi dari SMP ke SMA atau SMA ke Perguruan Tinggi, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
- Terbatasnya variasi program studi perguruan tinggi lokal di daerah terkadang membuat minat lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan sedikit tertahan jika harus keluar daerah.
- Sebagian wilayah di Hulu Sungai Utara merupakan daerah perairan/rawa yang membutuhkan upaya ekstra dalam hal aksesibilitas transportasi bagi anak sekolah.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Menyelaraskan jurusan di SMK dengan potensi ekonomi daerah (seperti kerajinan atau pertanian modern) agar minat sekolah meningkat karena prospek kerja yang jelas.
- Optimalisasi Digital Learning dengan menyediakan infrastruktur internet di perpustakaan desa untuk mendukung pembelajaran mandiri dan riset bagi siswa.
- Melaksanakan Monitoring Anak Putus Sekolah dengan menggunakan sistem informasi pendidikan untuk melacak anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan sekolah dan memberikan intervensi segera.
- Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, melalui penyediaan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar tetap memiliki harapan lama sekolah yang setara.
- Kemitraan dengan universitas/STIA/STAI lokal untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Meskipun realisasi tahun 2025 sebesar 13,46 melebihi target (13), namun terdapat penurunan signifikan sebesar 3,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya penurunan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat disebabkan perubahan metodologi perhitungan IPLM yang menyesuaikan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Pembatasan cakupan hanya pada jenjang SD dan SMP menyebabkan basis populasi yang diukur lebih sempit, menghasilkan angka indeks yang lebih rendah secara statistik namun lebih akurat secara kebijakan.

Berdasarkan realisasi capaian tersebut, kondisi ini mengindikasikan



perlu nya evaluasi komprehensif terhadap aspek ketersediaan sarana prasarana, keterjangkauan akses layanan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penguatan budaya baca.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

- Pengembangan Perpustakaan Desa dengan mendorong replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di beberapa kecamatan.
- Layanan Perpustakaan Keliling dengan menambahkan operasional armada bus dan motor perpustakaan untuk menjangkau sekolah-sekolah di pelosok.
- Penyelenggaraan lomba literasi dengan mengadakan pemilihan Duta Baca dan lomba bercerita tingkat kabupaten untuk menstimulus minat baca anak.

➤ **Hambatan dalam Pencapaian KInerja**

Beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab penurunan indeks literasi adalah:

- Terbatasnya koleksi buku yang mutakhir karena kurangnya pembaruan koleksi buku fisik dan digital yang sesuai dengan minat generasi muda (Gen Z dan Alpha).
- Belum meratanya jangkauan internet di titik-titik baca desa, sehingga akses ke perpustakaan digital (e-HSU) belum optimal.
- Dominasi konten hiburan singkat di media sosial yang menggeser minat baca intensif di tengah masyarakat.
- Kesulitan mobilitas perpustakaan keliling untuk menjangkau daerah perairan/rawa yang jauh dari pusat kota Amuntai.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Melakukan pengadaan buku baru yang berbasis kebutuhan praktis masyarakat (pertanian, perikanan, teknologi tepat guna).
- Pengembangan perpustakaan melalui Kolaborasi dengan Komunitas melibatkan komunitas literasi lokal dan pegiat media sosial untuk mengampanyekan budaya baca secara kreatif.
- Peningkatan Anggaran Perpustakaan Desa dengan memberikan insentif bagi desa yang berhasil mengelola pojok baca secara mandiri melalui dana desa.
- Memastikan seluruh komponen pembentuk IPLM (koleksi, tenaga perpus, pemustaka, sarana dan lain-lain) terdata secara akurat dalam aplikasi pendataan pusat.
- Koordinasi aktif dengan Perpustakaan Nasional untuk penyesuaian target



IPLM tahun 2026 sesuai metodologi berbasis kewenangan daerah;

- Penguatan program literasi berbasis sekolah pada jenjang SD dan SMP.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan literasi digital.

d) Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

- Program Pengelolaan Pendidikan meliputi Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan biaya operasional dasar.
- Program Pembinaan Perpustakaan meliputi pengembangan koleksi perpustakaan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan sekolah (SD/SMP), pembinaan perpustakaan desa/kelurahan, serta pengembangan perpustakaan digital. Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang masih dalam satu program Pembinaan Perpustakaan, meliputi sosialisasi dan kampanye literasi, penyelenggaraan lomba minat baca, perpustakaan keliling, serta sinergi dengan sekolah-sekolah jenjang SD dan SMP.
- Program Pengelolaan Arsip meliputi akuisisi, pengolahan, penyimpanan, dan preservasi arsip, serta pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah.

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” diukur melalui 1 indikator yaitu Usia Harapan Hidup.

a) Perbandingan Realisasi dengan Target

Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Adapun Target, realisasi dan capaiannya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.9
Capaian terhadap Target Indikator Usia Harapan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Kinerja Akhir Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50	71,89	72,21	72,49	65,26	72,95	111,8

Capaian Usia Harapan Hidup sebesar 111,8% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat telah



melampaui target. Realisasi sebesar 72,95 tahun mencerminkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang efektif, di mana rata-rata penduduk memiliki jaminan harapan hidup yang lebih baik dibandingkan perencanaan awal.

Kenaikan Usia Harapan Hidup dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,46 poin merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi program kesehatan pada tahun berjalan, seperti keberhasilan dalam menekan angka kematian ibu/bayi, penanganan stunting, serta peningkatan akses layanan kesehatan dasar yang semakin merata.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Hulu Sungai menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dimana pada tahun 2023 angka UHH berada di 72,21, kemudian meningkat menjadi 72,49 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 72,95 pada tahun 2025. Kenaikan konsisten ini mencerminkan efektivitas program penguatan layanan kesehatan dasar dan peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 65,55, maka capaian s/d tahun 2025 telah mencapai 111,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menuntaskan target jangka menengah satu tahun lebih cepat dengan performa yang melampaui batas minimal perencanaan.

Tabel 3.10
Capaian terhadap Target Kinerja Indikator Usia Harapan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Target RPD Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian 2025 Terhadap target RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	65,26	72,21	72,49	72,95	65,55	111,29

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Realisasi Kinerja

➤ Upaya yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan Usia Harapan Hidup, antara lain:

- Penguatan Layanan Kesehatan Dasar, dengan optimalisasi peran Puskesmas dan Pustu dalam deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) dan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).
- Perluasan Jaminan Kesehatan dengan peningkatan cakupan kepesertaan JKN (Menuju *Universal Health Coverage/UHC*) untuk memastikan akses pengobatan bagi masyarakat rentan.



- Pelaksanaan program penanganan stunting secara masif melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kek (kurang energi kronis) dan balita gizi kurang.
- Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Sosialisasi pola makan sehat dan aktivitas fisik secara masif di tingkat desa.
- Perbaikan sanitasi Lingkungan melalui peningkatan akses air minum layak dan pembangunan jamban keluarga sehat untuk menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan (seperti diare).

➤ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Sebagian wilayah HSU merupakan daerah perairan/rawa yang menyulitkan mobilitas tenaga kesehatan dan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan rujukan, terutama saat musim kemarau atau banjir.
- Masalah gizi kronis (stunting), meskipun menurun, angka stunting masih memerlukan penanganan serius karena berdampak pada kualitas hidup jangka panjang.
- Adanya kasus penyakit tidak menular (PTM), Tren peningkatan kasus PTM (seperti hipertensi dan diabetes) pada usia produktif akibat perubahan gaya hidup, yang berpotensi menurunkan angka harapan hidup jika tidak tertangani.
- Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga medis spesialis di RSUD, yang memaksa pasien seringkali dirujuk keluar daerah.

➤ Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten tetangga dan rata-rata provinsi serta mempertahankan tren positif:

- Akselerasi UHC dengan memastikan seluruh penduduk HSU termasuk dalam jaminan kesehatan aktif.
- Inovasi Layanan Kesehatan Daerah Terpencil dengan mengembangkan model pelayanan kesehatan bergerak (Telemedicine atau Puskesmas Terapung) yang lebih efektif untuk wilayah rawa.
- Penguatan Pemantauan Gizi 1000 HPK dengan memfokuskan intervensi gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan secara presisi (*by name by address*).
- Pemenuhan Tenaga Medis Strategis, dengan memberikan insentif khusus dan beasiswa ikatan dinas untuk menarik minat dokter spesialis bekerja di HSU.
- Penguatan Sistem Rujukan dengan mengoptimalkan RSUD dan



Puskesmas Rawat Inap agar mampu menangani kasus darurat lebih cepat untuk menekan angka kematian mendadak.

- Evaluasi Terpadu Lintas Sektor dengan melakukan inkronisasi data kemiskinan dengan data kesehatan untuk memastikan intervensi gizi tepat sasaran pada kelompok rentan.

d) Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja Usia Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program-program kunci berikut:

- Program Akses Pelayanan Kesehatan: Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Daerah dan operasional Puskesmas Keliling Perairan.
- Program KIA dan Gizi Masyarakat: Kegiatan Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, dan pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri.
- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Posbindu PTM di desa-desa.
- Program Kesehatan Lingkungan: Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pengawasan kualitas air minum.

Sasaran 1.3 : Meningkatkan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Sasaran Meningkatkan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Indikator Indeks Desa Membangun

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7004	0,6919	0,7875	113,82	112,43

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa desa tersebut berada pada kategori "Maju". IDM memiliki skala 0-1, dengan kategori sebagai berikut:

- 0,0000 - 0,1999: Sangat Tertinggal
- 0,2000 - 0,3999: Tertinggal
- 0,4000 - 0,5999: Berkembang
- 0,6000 - 0,7999: Maju
- 0,8000 - 1,0000: Mandiri

Dengan capaian 0,7875, desa tersebut sudah mendekati kategori "Mandiri",



namun masih perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur: seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi.
2. Peningkatan ekonomi: seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian, dan pariwisata.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.
4. Penguatan kelembagaan desa: seperti pembentukan dan penguatan lembaga desa, BUMDes, dan kelompok masyarakat.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat: seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sasaran 1.4 : Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.12

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD 2026	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79,50	78	71,44	91,59	89,86
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,52	93,02	91,79	98,68	98,15
3	Jumlah Perkawinan Anak	Orang	29	39	18	153,85	137,93

Dari tabel realisasi capaian indikator sasaran diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran ini termasuk kategori cukup berhasil, berhasil dan sangat berhasil, sedangkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 untuk sasaran dan indikator sasaran ini ada penyesuaian.

Sasaran 1.5 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk di ukur dengan indikator berikut.



Tabel 3.13
Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD 2026	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,67	0,68	0,08	188,2	189,6

Capaian laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,08% menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk relatif rendah dan stabil. Laju pertumbuhan penduduk yang rendah dapat memiliki beberapa implikasi:

- Pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena jumlah tenaga kerja yang tersedia relatif stabil.
- Struktur penduduk: Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat menyebabkan struktur penduduk yang lebih tua, sehingga perlu perencanaan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk tua.
- Ketersediaan sumber daya: Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur.

Laju pertumbuhan penduduk yang rendah juga dapat memiliki beberapa keuntungan, seperti:

- Pengurangan kemiskinan: Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.
- Peningkatan kualitas lingkungan: Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat mengurangi tekanan pada lingkungan dan sumber daya alam.

Sasaran 1.6 : Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD 2026	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	80	75	94,78	126,37	118,47

Dari capaian organisasi pemuda aktif sebesar 94,78% menunjukkan bahwa hampir seluruh organisasi pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Utara aktif dan berfungsi dengan baik. Ini adalah capaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa:

- Partisipasi pemuda: Pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat aktif dan terlibat dalam kegiatan organisasi, sehingga meningkatkan partisipasi dan



kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat.

- Kualitas organisasi: Organisasi pemuda yang aktif menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur, kepemimpinan, dan program yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan mereka.
- Dampak positif: Organisasi pemuda yang aktif dapat memiliki dampak positif pada masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran sosial, mempromosikan kegiatan positif, dan membantu mengatasi masalah sosial.

Namun, masih ada 5,22% organisasi pemuda yang belum aktif, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas organisasi tersebut.

Sasaran 1.7 : Meningkatnya Keharmonisan Kehidupan Sosial, Agama di Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Keharmonisan Kehidupan Sosial, Agama di Masyarakat di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.15
Realisasi Indikator Angka Kriminalitas

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD 2026	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kriminalitas	%	0	0	0	100	100

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, indikator Angka Kriminalitas menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat capaian yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 0%, dan realisasi yang dicatatkan juga berada pada angka 0%. Dengan realisasi yang sama persis dengan target (tidak melampaui batas toleransi kriminalitas yang ditetapkan), maka capaian kinerja tahun 2025 dinilai sebesar 100%.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), target akhir pada tahun 2026 dipatok pada angka 0%. Realisasi tahun 2025 yang berada di angka 0% menunjukkan bahwa target akhir RPD telah berhasil tercapai lebih awal dengan tingkat capaian 100%.

Nolnya angka kriminalitas ini mencerminkan keberhasilan berbagai program preventif dan sinergi lintas sektor, seperti:

1. Optimalisasi patroli keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat untuk menekan faktor pemicu kriminalitas (sosial-ekonomi).



3. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat.

Sasaran 1.8 : Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis

Sasaran Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.16
Realisasi Indikator Jumlah Konflik Sosial

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD 2026	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah Kasus Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	100	100

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, indikator Jumlah Kasus Konflik Sosial menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana stabilitas sosial kemasyarakatan berhasil terjaga dengan baik tanpa adanya gejolak kasus. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 0 kasus, dan realisasi di lapangan tercatat 0 kasus. Keberhasilan mempertahankan ketiadaan konflik sosial ini menempatkan persentase capaian kinerja tahun 2025 pada angka 100%. Target akhir pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 adalah 0 kasus. Dengan tidak adanya kasus di tahun 2025, target jangka menengah RPD telah tercapai lebih awal dengan tingkat capaian 100%.

2) Tujuan 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah

Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,08	4,51	4,41*	5,50	5,02**	91,27	82,97
PDRB Perkapita ADHB	Ribu Rupiah	24.459,09	26.131,99	27.909,99	20.992,89	29.878,92	142,32	141,86
PDRB Perkapita ADHK	Ribu Rupiah	15.305	15.813	16.330*	13.964,36	16.970**	121,52	121,13

Sumber Data: Data diolah, BPS 2025

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
		HSU**	HST**	Batola**	Tabalong**	Provinsi*
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,01	5,27	4,69	5,05
PDRB Perkapita ADHB	Ribu Rupiah	29.878,92	37.585,65	36.344,83	126.520,24	70.576,83
PDRB Perkapita ADHK	Ribu Rupiah	16.970	21.885	21.101	67.088	38.155**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah, 2025

Catatan: * Angka Sementara 2024

** Angka Sangat Sementara

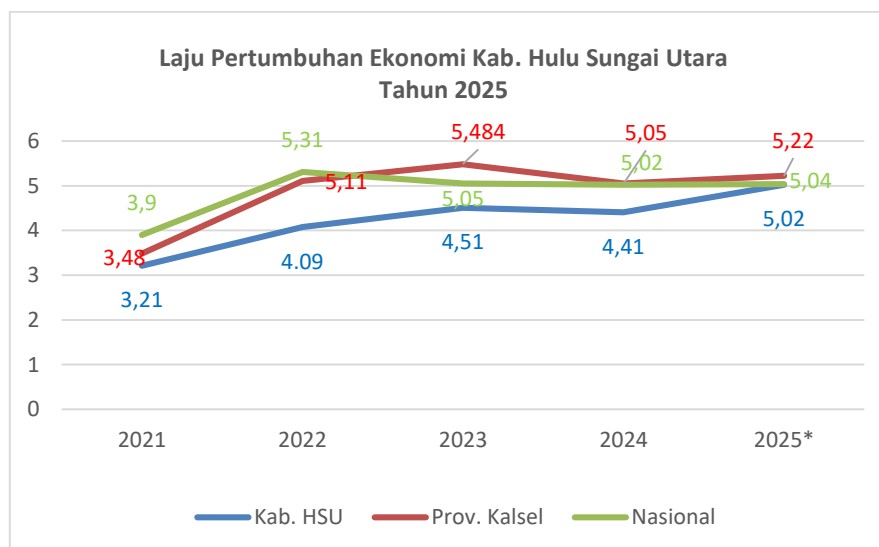
1) Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja tujuan Meningkatnya perekonomian daerah diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi serta target yang telah ditetapkan atas indikator tersebut sebesar 4,52. Adapun realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar 5,02 dengan tingkat capaian 111,06%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “Sangat Berhasil”, dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan.

Grafik 3.1

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dibandingkan dengan Prov. Kalsel dan Nasional



Sumber : Hulu Sungai Utara Dalam Angka, 2025

Catatan * : Angka Sangat Sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun

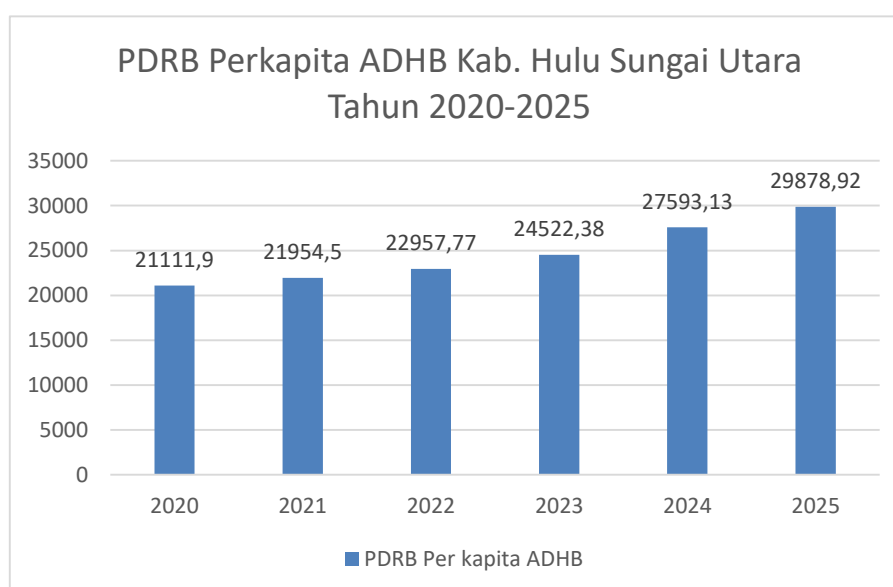


memiliki tren peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,41 persen.

b. PDRB perkapita ADHB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 mencapai 7.160,07 miliar rupiah dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp.29.878.921,91. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 sudah melebihi dari target capaian tahun 2026 yang merupakan target akhir dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Grafik 3.2
Capaian PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2025



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung naik dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi pertumbuhannya di banding pertumbuhan penduduk.

c. PDRB perkapita ADHK

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp.16.970 (Ribu) dari target sebesar Rp.13.964,36 (Ribu), sehingga persentase capaian PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 121,52%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 121,13%, ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan.

PDRB Perkapita ADHK mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2025.



2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 5,02% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 5,05% maka masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong, akan tetapi masih diatas Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. PDRB perkapita ADHB

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp29.878,92 (Ribu) jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar Rp70.576,83 (Ribu), masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

c. PDRB perkapita ADHK

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 16.970 (Ribu) jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar Rp38.155 (Ribu), masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar 5,02% mengalami peningkatan sebesar 0,61% dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 4,41%.

Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025:

- Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7.160,06 miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp 29,87 juta.
- Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp 4.066,51 miliar.
- Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03 persen. Dari

sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,61 persen.

- Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dari sisi produksi didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16,53 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 88,74 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran sebagai berikut:

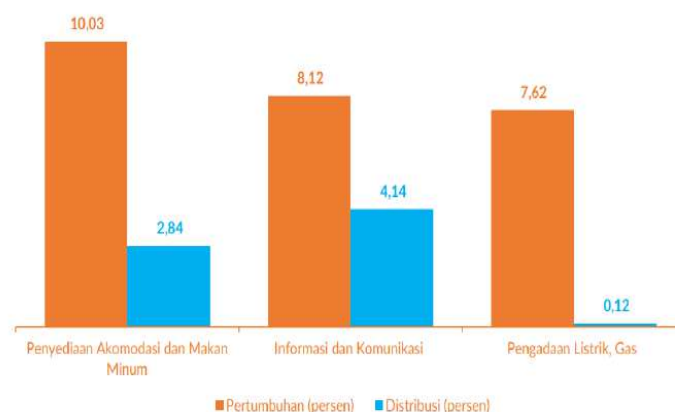
a) PDRB Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 10,03 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,12 persen; serta Pengadaan Listrik, Gas sebesar 7,62 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi beserta besaran distribusinya terhadap total PDRB terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 3.1

Pertumbuhan dan distribusi ekonomi beberapa Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun (persen),2025



Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,14 persen; diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,67 persen; dan Transportasi dan Pergudangan

sebesar 0,46 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari kategori lainnya sebesar 0,63 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2

Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025

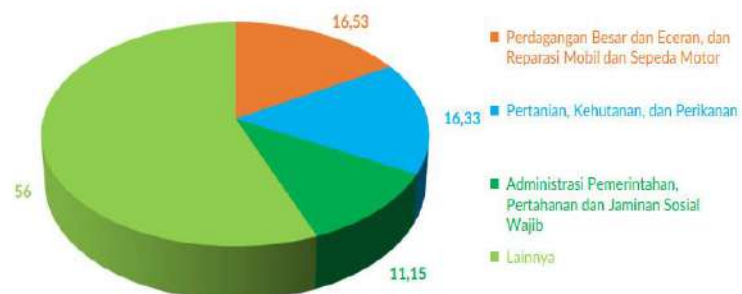


2) Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,53 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,33 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,15 persen. Sementara itu, kategori lainnya menyumbang sebesar 56,00 persen. Struktur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3

Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut lapangan usaha (persen), 2025

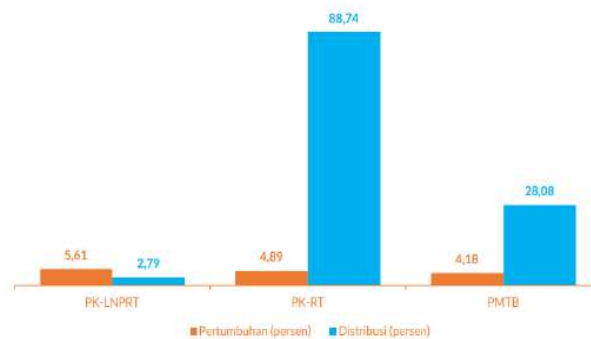


b) PDRB Menurut Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terhadap tahun 2024 terjadi pada sebagian besar komponen. Tiga komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,61 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,18 persen. Pertumbuhan dan Distribusi per komponen dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen Pengeluaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025



Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,50 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,15 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,62 persen. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2023–2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2023–2025

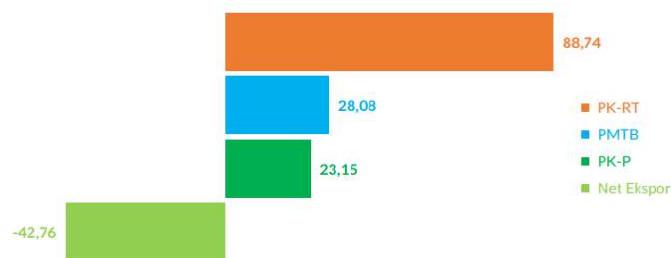


2) Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar 88,74 persen.

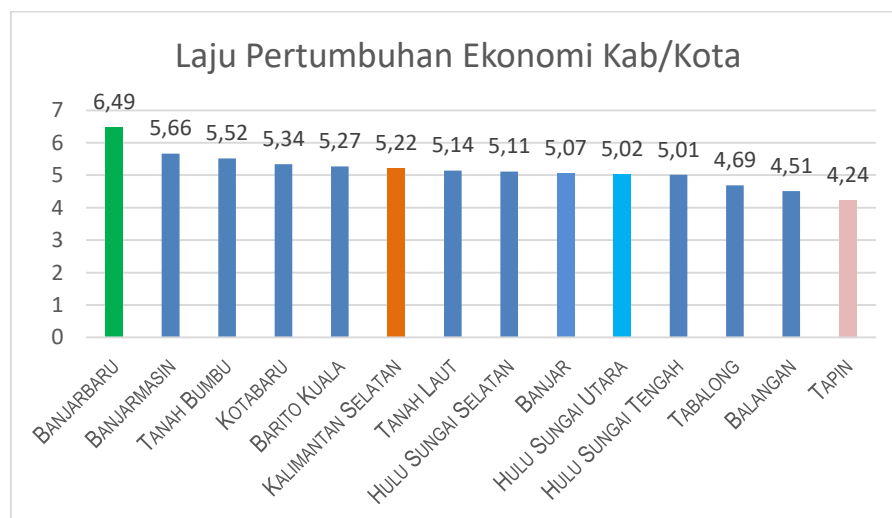
Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Model Tetap Bruto (PMTB) sebesar 28,08 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 23,15 persen. Sementara Komponen Net Ekspor memiliki share sebesar -42,76 persen. Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.6
Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran (persen), 2025



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Kab/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2025





Pada Tahun 2025 sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan. Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di urutan ke 9 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, meningkat dua peringkat di bandingkan dengan capaian tahun 2024.

a. PDRB perkapita ADHB

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 29.878 (Ribu) mengalami peningkatan sebesar Rp1.968,01 (Ribu) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 27.909,99 (Ribu). Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan membaiknya perekonomian.

Penyumbang terbesar berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 16,53 persen atau setara dengan 1.183,46 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,33 persen atau setara dengan 1.168,90 miliar rupiah. Hampir semua kategori mengalami pertumbuhan positif.

Faktor pembentuk atau Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2022 -2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2025

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,99	16,30	15,81	16,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,20	0,19	0,19
C	Industri Pengolahan	9,22	8,30	8,11	8,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,82	0,83	0,82
F	Konstruksi	10,84	10,72	10,15	10,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	16,28	16,54	16,53
H	Transportasi dan Pergudangan	7,30	7,67	8,07	8,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,72	2,73	2,76	2,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,18	4,15	4,11	4,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,20	3,21	3,18
L	Real Estate	3,53	3,49	3,47	3,47
M.N	Jasa Perusahaan	0,42	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,57	11,40	11,79	11,15
P	Jasa Pendidikan	9,48	9,20	9,37	9,41



No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024*	2025**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	2,64	2,59	2,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,29	2,35	2,43	2,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100

Sumber Data : Hulu Sungai Utara Dalam Angka, 2025

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

b. PDRB perkapita ADHK

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 16.970 (Ribu) mengalami peningkatan sebesar Rp 640 (Ribu) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 16.330 (Ribu). Sumber pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK menurut lapangan usaha tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,14%, selanjutnya sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,67%.

Faktor pembentuk atau sumber pertumbuhan dan laju pertumbuhan PDRB tas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan Usaha Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2025

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Sumber Pertumbuhan		
	2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,63	3,06	7,27	0,88	0,48	1,14
B. Pertambangan dan Penggalian	1,09	0,83	3,08	0,00	0,00	0,01
C. Industri Pengolahan	0,72	1,90	4,12	0,07	0,17	0,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,74	7,78	7,62	0,01	0,01	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,12	5,06	4,48	0,05	0,05	0,04
F. Konstruksi	4,52	2,09	2,72	0,49	0,23	0,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,70	4,86	4,51	0,84	0,72	0,67
H. Transportasi dan Pergudangan	4,44	4,76	6,18	0,33	0,36	0,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,05	8,36	10,03	0,20	0,24	0,30
J. Informasi dan Komunikasi	5,52	4,37	8,12	0,28	0,22	0,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,97	6,27	5,51	0,28	0,19	0,17
L. Real Estat	5,61	4,59	4,63	0,22	0,18	0,18
M,N. Jasa Perusahaan	6,68	4,78	7,16	0,03	0,02	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	6,47	2,16	0,26	0,70	0,24
P. Jasa Pendidikan	3,07	5,92	4,37	0,30	0,58	0,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,25	4,15	4,83	0,14	0,11	0,13
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,19	6,98	6,71	0,13	0,15	0,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,51	4,41	5,02	4,51	4,41	5,02

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



4) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja tujuan:

- Ketergantungan terhadap sektor perdagangan yang rentan terhadap perubahan pasar seperti marketplace;
- Ketergantungan terhadap sektor pertanian yang rentan terhadap kondisi alam, perubahan cuaca dan harga komoditas;
- Keterbatasan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan irigasi;
- Perubahan ekonomi global;
- Kurangnya investasi karena kurang kompetitif dalam menarik investor.

5) Upaya yang dilaksanakan:

- Perbaikan infrastruktur seperti jalan dan irigasi;
- Peningkatan SDM sektor perdagangan seperti pelatihan penjualan online;
- Pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi;
- Promosi investasi.

6) Rencana tindaklanjut:

- ✓ Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- ✓ Meningkatkan SDM melalui program pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing ekonomi;
- ✓ Meningkatkan promosi investasi untuk menarik lebih banyak investor.

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Produksi Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Jasa

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Jasa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	(%)	-0,03	5,63	3,06	5,09	7,27	142,83	112,02
b	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	(%)	7,58	5,70	4,86	5,94	4,51	75,93	72,86
c	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	(%)	3,20	0,72	1,90	2,81	4,12	146,62	141,58
d	Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan	(%)	6,96	5,25	4,15	7	4,83	69,00	67,08



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Kegiatan Sosial								
e	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.132	10.491	10.981	10.021	11.168	111,44	110,01

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja sasaran dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
			HSU**	HST**	Batola**	Tabalong**	Provinsi*
a	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	(%)	7,27	2,19	8,15	8,31	4,16
b	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	(%)	4,51	9,07	5,01	8,87	6,36
c	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	(%)	4,12	3,11	2,88	9,56	4,83
d	Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(%)	4,83	5,38	5,03	7,80	5,57
e	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11.168	13.608	11.469	13.541	13.757

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah, 2025

Catatan: * Angka Sementara 2024

** Angka Sangat Sementara

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 7,27% dari target sebesar 5,09%, sehingga persentase capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 124,83%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 112,02%, ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung fluktuatif dimana tahun 2023 mengalami peningkatan dan tahun 2024 turun serta meningkat kembali pada tahun 2025.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,51% dari target sebesar 5,94%, sehingga persentase capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 75,93%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 72,86%, ini menunjukkan mecapai target yang ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung menurun dari tahun 2023 sampai tahun 2025.



c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,12% dari target sebesar 2,81%, sehingga persentase capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 146,62%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 141,58%, ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2025.

d. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,83% dari target sebesar 7%, sehingga persentase capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 69%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 57,64%, ini menunjukkan mencapai target yang ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial laju pertumbuhannya cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, dari 5,25 persen di tahun 2023 menjadi 4,15 persen di tahun 2024 dan meningkat menjadi 4,83 di tahun 2025.

e. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 11.168 (dalam ribu) dari target sebesar Rp.10.021 (dalam Ribu), sehingga persentase capaian Pengeluaran Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 111.44%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 108,18%, ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan. Pengeluaran Perkapita mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 7,27% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 4,16%, masih di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta masih dibawah capaian Kabupaten Barito Kuala dan Tabalong.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,51% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di



tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 6,36%, masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,12%, jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 4,83%, masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tabalong akan tetapi masih diatas capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala.

d. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,83%, jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 5,57 % masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

e. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 11.168 (dalam ribu), jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 13.757 (dalam ribu) masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Kabupaten Tabalong.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar 7,27% mengalami peningkatan sebesar 4,21% dari capaian tahun 2024 sebesar 3,06%. Peningkatan ini dari Subkategori usaha Perikanan yang merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh peningkatan produksi dalam subkategori peternakan, termasuk kenaikan hasil produksi telur ayam dan bebek, daging sapi, daging ayam, dan daging kerbau.

Faktor pembentuk dari capaian kinerja ini antara lain diperoleh dari Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan.



Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Keterbatasan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi dan jalan pertanian;
- Keterbatasan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian;
- Ketergantungan pada cuaca dan iklim yang tidak menentu;
- Keterbatasan akses ke pasar dan jaringan distribusi.

Upaya yang dilaksanakan:

- Pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi dan jalan pertanian
- Pemberian bantuan teknologi dan peralatan pertanian modern kepada petani;
- Peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan dan pendampingan;
- Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk pertanian;
- Pengembangan kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan akses pasar.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Meningkatkan akses petani ke teknologi dan peralatan pertanian modern;
- ✓ Mengembangkan program asuransi pertanian untuk mengurangi risiko kegagalan panen;
- ✓ Meningkatkan promosi produk pertanian lokal melalui media sosial dan pameran;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian melalui penerapan standar kualitas dan keamanan pangan;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan dan peternakan melalui penerapan standar kualitas dan keamanan pangan;
- ✓ Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan pengolahan makanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan peternakan.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar 4,51% mengalami penurunan sebesar 0,35% dari capaian tahun 2024 sebesar 4,86%. Selama 3 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 10 persen. Pada tahun 2024, kontribusi kategori ini mencapai 1.088,20 miliar rupiah atau sekitar 16,46 persen. Dari nilai tersebut,



sebagian besar merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Keterbatasan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pasar dan pusat perbelanjaan;
- Keterbatasan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha perdagangan;
- Ketergantungan pada pasar lokal yang terbatas dan keterbatasan akses ke pasar regional dan nasional.

Upaya yang dilaksanakan:

- Pembangunan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pasar dan pusat perbelanjaan;
- Peningkatan kemampuan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan;
- Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk perdagangan;
- Pengembangan kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan akses pasar.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Mengembangkan program promosi perdagangan melalui media sosial dan pameran;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan keamanan produk perdagangan melalui penerapan standar kualitas dan keamanan;
- ✓ Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan logistik untuk meningkatkan akses pasar regional dan nasional;
- ✓ Meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha perdagangan melalui pelatihan dan pendampingan.

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,12% dari target sebesar 2,81%, sehingga persentase capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 146,62%.

Industri Pengolahan berkembang dari 508,65 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 536,61 miliar rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan industri manufaktur di tahun 2024 naik dari tahun sebelumnya, dari 0,72 persen menjadi 1,90 persen. Dari sisi kontribusi, kategori Industri Pengolahan menyumbang 8,12 persen terhadap total PDRB Hulu Sungai Utara pada tahun 2024. Angka ini cenderung stabil, mengingat sejak tahun 2020, kontribusi kategori ini berkisar antara 8,1 hingga 9,5 persen dari total PDRB.



Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan dan penyimpanan;
- Keterbatasan kemampuan manajemen dan pemasaran;
- Kurangnya akses ke pasar dan jaringan distribusi;
- Ketergantungan pada bahan baku lokal yang terbatas

Upaya yang dilaksanakan:

- Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan dan penyimpanan;
- Peningkatan kemampuan manajemen dan pemasaran melalui pelatihan dan pendampingan;
- Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk UMKM;
- Pengembangan kerjasama dengan petani lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Meningkatkan promosi produk UMKM melalui media sosial dan pameran;
 - ✓ Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan akses pasar UMKM;
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bahan baku lokal melalui pelatihan dan pendampingan kepada petani;
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan keamanan produk melalui penerapan standar sanitasi dan keamanan pangan;
 - ✓ Mengembangkan produk-produk inovatif dan unik untuk meningkatkan daya saing
- Meningkatkan promosi produk melalui media sosial dan pameran.

d. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 4,83% mengalami peningkatan sebesar 0,68% dari capaian tahun 2024 sebesar 4,15%. Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2024, kontribusinya terhadap perekonomian HSU sebesar 2,59 persen dengan besaran nilai tambah sebesar 171,57 miliar rupiah. Selama tahun 2020– 2024, peranannya relatif stabil di sekitar angka 2 persen.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dan berpengalaman;
- Keterbatasan infrastruktur kesehatan yang memadai

**Upaya yang dilaksanakan:**

- Peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan
- Peningkatan investasi di sektor kesehatan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pengadaan peralatan medis.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat;
- ✓ Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan investasi di sektor kesehatan.

e. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 11.168 (dalam ribu) mengalami peningkatan sebesar Rp 187(dalam ribu) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 10.981.(dalam ribu). Pengeluaran Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Pertumbuhan ekonomi yang melambat yang berdampak pada permintaan domestik dan eksternal, serta kinerja sektor pertanian.
- Ketimpangan Pengeluaran: Meskipun ada peningkatan pengeluaran per kapita, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih cukup tinggi, dengan Gini Ratio.

Upaya yang dilaksanakan:

- Program Perlindungan Sosial: Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, sembako, dan bantuan untuk lansia dan disabilitas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan daya beli Masyarakat;
- Peningkatan Investasi: Pemerintah mendorong investasi melalui berbagai kebijakan seperti kemudahan berusaha, penguatan kawasan industri, dan harmonisasi peraturan untuk memberikan kepastian hukum;
- Peningkatan Kualitas SDM: Melalui program seperti Kartu Prakerja, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha;
- Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk menutup kesenjangan, meningkatkan konektivitas, dan membuka sumber ekonomi baru;

**Rencana tindaklanjut:**

- ✓ Stabilisasi harga pangan dan ketahanan energi;
- ✓ Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- ✓ Pemerataan pembangunan infrastruktur dan program pemerintah merata di seluruh wilayah untuk mengurangi ketimpangan;
- ✓ Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk memastikan dana digunakan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran sasaran "Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa" yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu

- Program Pemerdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- Program Penyuluhan Pertanian;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Program Perizinan Usaha Pertanian.



Sasaran 2.2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator Indeks ketahanan pangan daerah. Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ini diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks ketahanan pangan daerah	Indeks	62	74,24	81,20	71,05	79,74	112,23	111,52

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan			
		HSU	HST	Provinsi	Nasional
Indeks ketahanan pangan daerah	Indeks	79,74	85,67	81,98	74,00

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 79,74 dari target sebesar 71,05 sehingga capaian Indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 112,23%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 111,52%, ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan.

Indeks ketahanan pangan daerah mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung fluktuatif dimana tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2025 mengalami penurunan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terrealisasi sebesar 79,74. jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 81,98 % masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi masih diatas capaian Nasional.



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terrealisasi sebesar 79,74 mengalami penurunan sebesar 1,46, dibanding dengan realisasi tahun 2024 sebesar 81,20.

Faktor pembentuk dari capaian kinerja ini antara lain diperoleh dari 4 pilar yaitu (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Keterbatasan infrastruktur pangan yang memadai;
- Kurangnya akses ke teknologi dan peralatan pangan modern;
- Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha pangan;
- Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah;
- Keterbatasan akses ke informasi dan data pangan yang akurat.

Upaya yang dilaksanakan:

Sebagai upaya peningkatan Indeks ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis antara lain:

- Membangun dan memperkuat infrastruktur dan kelembagaan penyediaan pangan daerah;
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi;
- Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan;
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- Penanganan Kerawanan Pangan.
- Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Membangun dan memperkuat infrastruktur dan kelembagaan penyediaan pangan daerah dengan meningkatkan akses ke infrastruktur pangan yang memadai dan mengembangkan kelembagaan penyediaan pangan yang efektif
- ✓ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dengan meningkatkan akses ke pangan pokok dan pangan lainnya yang berkualitas dan mengembangkan sistem distribusi pangan;



- ✓ Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan dengan meningkatkan akses ke pasokan pangan yang stabil dan sistem pengelolaan cadangan pangan yang efektif;
- ✓ Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita;
- ✓ Penanganan Kerawanan Pangan dengan program penanggulangan kerawanan pangan yang efektif dan meningkatkan akses ke pangan yang bergizi serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pangan;
- ✓ Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan yang efektif dan akses ke pangan yang aman.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja Indeks ketahanan pangan daerah yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Sasaran 2.3 : Meningkatnya Sektor Pariwisata

Meningkatnya sektor pariwisata dengan indikator jumlah wisatawan. Merupakan jumlah perjalanan wisatawan nusantara berdasarkan Kabupaten/Kota tujuan. Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ini diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Akhir Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah wisatawan	Orang	-	167.627	163.978	106.934	150.225	140,48	129,57



Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Sektor Pariwisata dengan
Kabupaten Sekitar, dan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan			
		HSU	Banjarmasin	Banjar	Provinsi
Jumlah wisatawan	Orang	150.225	296.217	600.777	1.985.860

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah wisatawan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 150.225 dari target sebesar 106.034 sehingga capaian jumlah wisatawan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 140,48%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 129,57%, ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan. Jumlah wisatawan mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung menurun dimana tahun 2023 sampai 2025 mengalami penurunan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Jumlah wisatawan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terrealisasi sebesar 150.225. jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 1.985.860 masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah wisatawan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terrealisasi sebesar 150.225 mengalami penurunan sebesar 13.753, dibanding dengan realisasi tahun 2024 sebesar 163.978. Penurunan dapat disebabkan kualitas destinasi wisata yang kurang menarik, kemudahan akses ke daerah wisata yang tidak memadai termasuk transportasi dan akomodasi serta harga dan biaya yang tidak kompetitif.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas ke daerah wisata;
- Kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif;
- Harga dan biaya yang tidak kompetitif;
- Kurangnya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal;
- Kebijakan dan regulasi yang belum mendukung industri pariwisata;
- Kurangnya event dan kegiatan yang menarik;
- Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam industri pariwisata.

Upaya yang dilaksanakan:

Sebagai upaya peningkatan Indeks ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis antara lain:



- Pembangunan jalan dan akses ke daerah wisata;
- Penggunaan media sosial dan teknologi digital untuk promosi;
- Pengadaan pertemuan dan diskusi dengan stakeholder;
- Pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Meningkatkan infrastruktur wisata yang memadai;
- ✓ Meningkatkan promosi dan pemasaran yang efektif;
- ✓ Meningkatkan harga dan biaya yang kompetitif;
- ✓ Mengadakan revisi kebijakan dan regulasi;
- ✓ Mengadakan festival dan event budaya;
- ✓ Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja Jumlah wisatawan yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Program Pemasaran Pariwisata.

Sasaran 2.4 : Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu di Serap Lapangan Kerja

Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka. Salah satu faktor penting untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan menurunkan atau mengurangi angka pengangguran. Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ini diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.27

Capaian Kinerja Akhir Sasaran Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu di Serap Lapangan Kerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat pengangguran terbuka	%	4,64	3,85	3,75	3,9	3,79	102,82	94,72

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Menciptakan Tenaga Kerja Produktif yang Siap dan Mampu di Serap Lapangan Kerja dengan Kabupaten Sekitar, dan Provinsi Kalimantan Selatan Serta Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan					
		HSU	HST	Batola	Tabalong	Provinsi	Nasional
Tingkat pengangguran terbuka	%	3,79	3,12	3,23	3,79	4,16	4,74

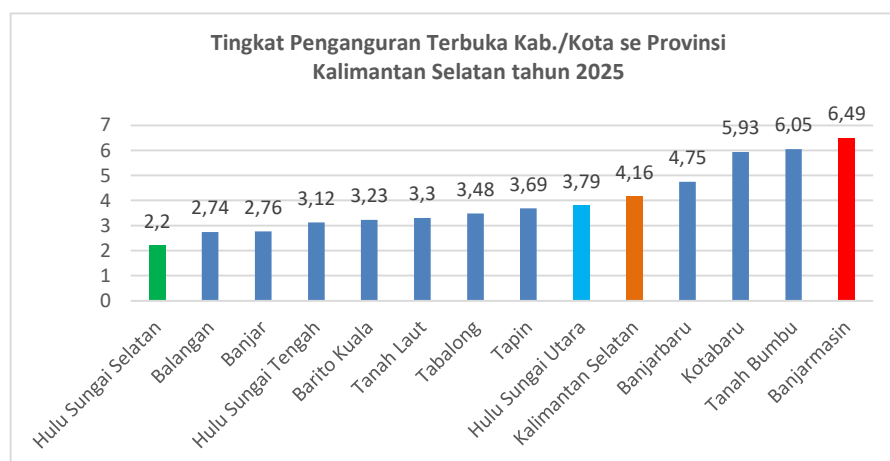
1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 3,79% dari target sebesar 3,9% sehingga capaian Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 102,82%. Capaian sampai akhir periode RPD sebesar 94,75%, dengan kategori 'Berhasil'. Hal ini menunjukkan capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, namun indikator kinerja ini dilanjutkan pada periode perencanaan selanjutnya. Tingkat pengangguran terbuka mengalami capaian realisasi kinerja yang cenderung menurun atau lebih baik mulai tahun 2022 sampai tahun 2024 namun mengalami peningkatan sebesar 0,04% tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terrealisasi sebesar 3,79%. jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja dibawah provinsi dan nasional sebesar 4,16 dan 4,74. masih dibawah atau lebih baik capaiannya. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, maka pada Tahun 2025 ada di Peringkat ke 9 terendah dari 13 Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kab./Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terrealisasi sebesar 3,79% mengalami peningkatan sebesar 0,04%, dibanding dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3,75%. Peningkatan ini dapat disebabkan Jumlah penduduk produktif yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, dan penurunan daya beli dan peningkatan biaya hidup, sehingga meningkatkan pengangguran.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan masyarakat;
- Kurangnya keterampilan dan pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- Kurangnya investasi yang menyebabkan penurunan lapangan kerja dan peningkatan pengangguran.

Upaya yang dilaksanakan:

Sebagai upaya penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis antara lain:

- Pelatihan tenaga kerja;
- Pemberian bantuan peralatan kerja produktif pasca pelatihan;
- Kerjasama dengan dunia usaha dalam penyaluran tenaga kerja;
- Pemagangan pencari kerja ke perusahaan ;
- Fasilitasi dan penyebaran informasi lowongan kerja.

Gambar 3.7
Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja



Pelatihan Berbasis Kompetensi



Pelatihan Menjahit



Pelatihan Kue dan Roti



Pelatihan Desain Grafis



Pelatihan Service Sepeda Motor



Pelatihan Perbaikan Mobil



Pelatihan Meubel kayu



Pelatihan Las Listrik

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar kerja;
- ✓ Meningkatkan lapangan kerja dengan meningkatkan investasi dan pengembangan ekonomi;
- ✓ Meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar kerja;



- ✓ Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Program Penempatan Tenaga Kerja;
- Program Hubungan Industrial.

Sasaran 2.5 : Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah

Sasaran Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah di ukur dengan indikator Rasio Kemandirian Fiskal. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah umumnya dihitung dengan rumus :

$$\text{PAD} : \text{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 yaitu Rp 177.421.006.451,26. Dan dana transfer daerah sebesar Rp 1.532.458.002.610,00. Sehingga, Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di hitung berdasarkan rumus di atas adalah 11,58%.

Pada tahun 2025 Rasio Kemandirian Fiskal di targetkan 12,29%, dengan realisasi 11,58%. Sehingga tingkat capaiannya adalah 94,22%.

Interpretasi tingkat kemandirian secara umum adalah sebagai berikut.

- 0%-25% : Sangat rendah (instruktif)
- 25%-50% : Rendah (konsultatif)
- 50-75% : Sedang (partisipatif)
- 75-100% : Tinggi (mandiri)

Dengan angka 11,58% Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk kategori sangat rendah (instruktif). Artinya dalam pemerintahan daerah belum mandiri secara fiskal. Kegiatan pemerintahan sangat tergantung pada dana transfer pusat (DAU, DAK, dll).



3) Tujuan 3 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran 3.1 : Penurunan Kemiskinan

Sasaran Penurunan Kemiskinan di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.29
Realisasi Indikator Persentase Kemiskinan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Kinerja pada Periode 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Kemiskinan	%	6,83	6,49	6,25	5,75	6,53	4,81	126,34

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan keberhasilan yang melampaui target indikator makro. Realisasi persentase kemiskinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,81%, jauh lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 6,53%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126,34%. Dalam lima tahun terakhir terdapat tren penurunan kemiskinan yang positif, dimana angka 6,83% pada tahun 2021 berhasil ditekan hingga menjadi 4,81% pada tahun 2025. Penurunan paling signifikan terjadi pada periode satu tahun terakhir dengan pengurangan kemiskinan sebesar 0,94%. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat telah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penduduk di bawah garis kemiskinan.

a) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan keberhasilan yang melampaui target indikator makro. Realisasi persentase kemiskinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,81%, jauh lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 6,53%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126,34%. Dalam lima tahun terakhir terdapat tren penurunan kemiskinan yang positif, dimana angka 6,83% pada tahun 2021 berhasil ditekan hingga menjadi 4,81% pada tahun 2025. Penurunan paling signifikan terjadi pada periode satu tahun terakhir dengan pengurangan kemiskinan sebesar 0,94%. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat telah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penduduk di bawah garis kemiskinan.



b) Analisis Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Kemiskinan tahun 2025 sebesar 4,81% telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 5,46%. Hal ini menunjukkan performa kinerja yang melampaui ekspektasi perencanaan tahunan. Keberhasilan menekan angka kemiskinan di bawah target 5% merupakan pencapaian strategis yang mencerminkan ketajaman intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43%. Realisasi saat ini (4,81%) telah jauh melampaui target akhir RPD tersebut. Persentase capaian terhadap target akhir RPD mencapai 125,19% dikategorikan sangat berhasil. Pencapaian sebesar 125,19% ini mengindikasikan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyelesaikan target jangka menengahnya lebih cepat dua tahun dari waktu yang ditentukan.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Persentase Kemiskinan Tahun 2023-2025
dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian s/d 2025 Terhadap target RPD 2026 (%)
			2023	2024	2025		
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	5,46	6,25	5,75	4,81	6,43	125,19

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

➤ Upaya yang telah Dilakukan

- Melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala untuk meminimalisir salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
- Menyelaraskan program bantuan sosial konsumtif dengan program pemberdayaan ekonomi produktif dan pelatihan keterampilan kerja guna menciptakan kemandirian ekonomi.
- Kolaborasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Dinas PU untuk program Bedah Rumah (RTLH) yang terintegrasi dengan akses air bersih dan sanitasi.
- Membuka aksesibilitas pada wilayah-wilayah terisolasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas ekonomi bagi rumah tangga sasaran.



➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- Adanya kantong-kantong kemiskinan ekstrem di lokasi spesifik yang memerlukan model intervensi khusus dengan dukungan biaya operasional yang lebih tinggi.
- Adanya fluktuasi harga komoditas pangan pokok yang secara langsung mendistorsi daya beli rumah tangga sasaran dan memengaruhi stabilitas garis kemiskinan.
- Karakteristik wilayah HSU yang didominasi rawa seringkali menyebabkan kerentanan ekonomi musiman (saat banjir/musim kemarau panjang) bagi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan pertanian.
- Sebagian masyarakat miskin masih memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal, sehingga terjebak pada skema pinjaman informal (rentenir).

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Mendorong BUMDes untuk menjadi unit usaha pengumpul hasil produksi masyarakat miskin agar harga jual di tingkat petani tetap stabil.
- Mengalihkan skema intervensi dari bantuan yang bersifat konsumtif ke arah pemberdayaan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang spesifik pada potensi lokal HSU (misal: pengolahan eceng gondok atau perikanan air tawar) yang langsung terhubung dengan akses pasar.
- Mempertajam pemetaan kantong kemiskinan berbasis sistem informasi geografis (*Geographic Information System/GIS*) untuk memastikan intervensi program lebih presisi dan tepat lokasi.

4) Tujuan 4 : Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Sasaran 4.1 : Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar

Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar di ukur dengan Indikator berikut.

Tabel 3.31
Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	41-60 (cukup)	21-40 (Sedang)	--



a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar diukur dengan Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar serta target yang telah ditetapkan atas indikator tersebut adalah 41-60 (cukup). Adapun realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan Adalah sebesar 21-40 (sedang). Capaian ini menggambarkan kinerja yang “belum cukup baik” Dimana realisasi kinerja belum memenuhi target yang ditentukan.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 3.32

Realisasi Perbandingan Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks	69,438	21-40 (Sedang)	41-60 (cukup)	21-40 (Sedang)	--

Adapun Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami kenaikan berada pada kategori 21-40 (sedang). Sehingga perlu beberapa perbaikan dan kinerja yang lebih dalam mendorong capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

c. Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja

1) Upaya yang dilaksanakan

- peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan;
- peningkatan layanan dan infrastruktur kesehatan;
- insfrastruktur sanitasi air minum layak; dan

2) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- akses jalan masih belum bisa 100% dapat dilalui dengan kendaraan roda 2 dan roda 4;
- kondisi topografi (alam);
- kemampuan keuangan daerah; dan
- dan seringkali terjadi bencana banjir.

3) Rencana tindaklanjut

- Melakukan mitigasi risiko bencana banjir tahunan;
- Melakukan kajian untuk meningkatkan PAD
- Memperkuat koordinasi dan komonikasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan menggunakan program-program yang di luncurkan oleh pemerintah pusat seperti sekolah rakyat



d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Faktor pembentuk dari capaian kinerja ini antara lain diperoleh dari dengan beberapa komponen sebagai berikut :

Tabel 3.33
Faktor Pembentuk Capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar

No	Sasaran / Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengendali banjir dan irigasi yang berfungsi optimal	Persentase infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik	28,32	0
		Persentase infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi baik	60,13	0
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak	94	0
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	2,00	0
3	Meningkatnya pemanfaatan bangunan/gedung pemerintah	Persentase bangunan/gedung pemerintah yang termanfaatkan	80,91	0
4	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,24	0,265
		Indeks Aksesibilitas Jembatan	0,11	0,108
5	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang memenuhi standar penyelenggaraan jasa konstruksi	15	15,3
6	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	84,35	0

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu ;

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Indikator : Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Indikator : Persentase akses sistem penyediaan air minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Indikator : Persentase akses air limbah domestik
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Indikator : persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota
- Program Penataan Bangunan Gedung
Indikator : persentase bangunan berizin yang laik fungsi
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Indikator : Cakupan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

- Program Penyelenggaraan Jalan
Indikator : Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Indikator : Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Indikator : Persentase Tertib Tata Ruang

Gambar 3.8
Dokumentasi Kegiatan Pembangunan



Pembangunan Titian Ds Sungai Durait Hilir



Pembangunan Dermaga Angkutan Sungai



Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum



Pembangunan RSUD Baru

Sasaran 4.2 : Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.34
Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	%	80	75	74,64	99,52	93,3

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika ditetapkan sebesar 75%, dengan realisasi



sebesar 74,64%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 99,52%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan informatika telah berjalan efektif dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Selisih capaian yang relatif kecil mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah telah mendapatkan akses layanan yang memadai.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 80%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 93,3%, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sektor komunikasi dan informatika berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target akhir perencanaan.

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target, antara lain:

1. Keterbatasan Investasi Belum optimalnya minat investasi dari penyedia layanan di wilayah dengan potensi pasar yang rendah.
2. Kendala Teknis Jaringan Gangguan teknis dan keterbatasan kapasitas jaringan di beberapa titik layanan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Memprioritaskan wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.
2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Swasta
Meningkatkan sinergi program dengan kementerian/lembaga serta penyedia layanan telekomunikasi.
3. Pengembangan Teknologi Alternatif
Mendorong penggunaan teknologi seperti VSAT atau jaringan berbasis satelit untuk wilayah terpencil.
4. Peningkatan Dukungan Infrastruktur Dasar
Mendorong pembangunan listrik dan akses transportasi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Memperkuat sistem pemantauan capaian kinerja untuk memastikan percepatan pencapaian target.

Sasaran 4.3 : Meningkatnya Jaringan Interkoneksi Daerah

Dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan akses informasi, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan indikator

Jumlah Desa yang Terjangkau Jaringan Internet (4G) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur digital.

Tabel 3.35
Realisasi Indikator Jumlah desa yang Terjangkau Jaringan Internet (4G)

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G)	Desa	214	211	210	99,52	98,13

Pada tahun 2025, target jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G) ditetapkan sebanyak 211 desa, dengan realisasi sebesar 210 desa. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 99,52%, yang termasuk kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 214 desa, maka capaian Tahun 2025 telah mencapai 98,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jaringan internet telah hampir mencapai target akhir perencanaan.

Gambar 3.9
Kegiatan Perbaikan Jaringan Oleh Bidang Egovernment Dan Infrastruktur Teknologi Informasi



Sasaran 4.4 : Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.36
Realisasi Indikator Persentase SKPD yang menerapkan SPBE

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase SKPD yang menerapkan SPBE	%	100	86,84	86,84	100	86,84



Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase SKPD yang menerapkan SPBE” ditetapkan sebagai salah satu ukuran keberhasilan dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Target akhir periode RPD tahun 2026 adalah sebesar 100%, yang mencerminkan harapan agar seluruh SKPD telah mengimplementasikan SPBE secara menyeluruh.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 86,84% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 86,84%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target tahunan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPBE telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar SKPD telah berhasil mengadopsi SPBE, meskipun masih terdapat sekitar 13,16% SKPD yang belum menerapkannya. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 baru memenuhi 86,84% dari target akhir tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh berbagai upaya, antara lain peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan teknis, serta penguatan infrastruktur dan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti perbedaan tingkat kesiapan SDM, keterbatasan infrastruktur pada beberapa SKPD, serta belum optimalnya integrasi sistem yang ada.

Untuk itu, pada tahun berikutnya perlu dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM, percepatan integrasi sistem SPBE, penguatan komitmen pimpinan SKPD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan penerapan SPBE pada seluruh SKPD sehingga target 100% pada akhir periode tahun 2026 dapat tercapai.

5) Tujuan 5 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Atas dasar inilah Indeks Reformasi Birokrasi dijadikan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tabel 3.37
Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

IKU Tujuan	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	65	*76,16	*117,16	*108,8

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi mencatatkan hasil yang sangat impresif. Instansi tidak hanya berhasil melampaui target tahunan 2025, melainkan juga telah melewati batas Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 setahun lebih awal. Pada tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 65.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasinya berhasil menyentuh angka 76,16 (angka sementara), atau setara dengan tingkat capaian tahunan sebesar 117,16%. Menariknya, realisasi tahun 2025 ini juga telah melampaui Target Akhir RPD Tahun 2026 yang dipatok pada angka 70 (capaian mencapai 108,8%). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola birokrasi di lingkungan instansi berjalan melompat lebih cepat dari proyeksi perencanaan.

Sasaran 5.1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.38
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	67,5	67	65,85	98,28	97,5
2	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Pencegahan Korupsi (MCP)/ KORSUPGAH	%	80%	78%	93%	119,23%	116,25

Dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah, ditetapkan beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur



keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Indikator tersebut meliputi **Nilai SAKIP Kabupaten, Opini BPK, dan Persentase Pencegahan Korupsi (MCP/KORSUPGAH)**. Untuk sasaran Nilai SAKIP Kabupaten dan Opini BPK disampaikan pada Analisis Capaian Kinerja RPJMD.

Analisis IKU Sasaran : Persentase Pencegahan Korupsi (MCP/KORSUPGAH)

Persentase capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Korsupgah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Tahun 2025, target capaian indikator ini ditetapkan sebesar 78%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 93%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai 119,23% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan korupsi di pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat. Upaya peningkatan capaian MCP dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Secara umum, capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan mempertahankan Opini WTP, capaian Nilai SAKIP yang mendekati target, serta tingkat implementasi program pencegahan korupsi yang cukup tinggi.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih perlu melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan agar seluruh indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Sasaran 5.2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN

Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN di ukur dengan indikator



berikut.

Tabel 3.39
Realisasi Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN

Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	%	95	90	100	111,11	105,3

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pemerintah daerah menetapkan indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan aparatur sipil negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN ditetapkan sebesar 90%, sebagai bagian dari tahapan pencapaian menuju target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 sebesar 95%. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya manusia aparatur melalui penerapan sistem manajemen ASN yang berbasis merit, profesional, dan bebas dari intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN pada Tahun 2025 mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 111,11% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan dengan sangat baik dan mampu melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 95%, capaian pada Tahun 2025 telah mencapai 105,2%, yang berarti target akhir perencanaan telah berhasil terlampaui sebelum akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat sistem manajemen ASN, antara lain melalui penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian, peningkatan transparansi dalam proses pengisian jabatan, penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur, serta peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara.

Selain itu, implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan juga turut mendukung peningkatan kualitas manajemen ASN, sehingga mampu mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Meskipun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, pemerintah daerah tetap perlu menjaga konsistensi pelaksanaan manajemen ASN yang berbasis merit dan terus melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN dapat terus terjaga dan ditingkatkan pada periode pembangunan selanjutnya.

6) Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 6.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di ukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian dan analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan di sampaikan pada penjelasan capaian RPJMD 2025-2029.

Sasaran 6.2 : Meningkatnya Kesesuaian Peruntukkan Lahan

Meningkatnya Kesesuaian Peruntukkan Lahan adalah kondisi di mana penggunaan lahan di suatu wilayah semakin sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini berarti pembangunan fisik (seperti perumahan, industri, atau perkebunan) dilakukan tepat di lokasi yang memang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut, bukan di area lindung atau resapan air.

Tabel 3.40
Capaian Indikator Kinerja Tertib Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tertib Penataan Ruang	Nilai	100	100	100	100	100%

a. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian sasaran Meningkatnya Kesesuaian Peruntukkan Lahan diukur dengan indikator Tertib Penataan Ruang serta target yang telah ditetapkan atas indikator tersebut adalah 100 Adapun realisasi kinerja dari target yang telah



ditetapkan adalah sebesar 100 dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “cukup baik” Dimana realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditentukan. Keberhasilan dalam mewujudkan tertib penataan ruang sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, pengawasan dan partisipasi publik. Dalam tertib penataan ruang diperlukan sistem pengendalian yang kuat terkait kesesuaian dalam pemanfaatan ruang hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan ekonomi atau pembangunan wajib selaras dengan rencana tata ruang sebelum izin terbit. Penataan yang tertib menjamin keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi dalam tertib penataan ruang pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2023 s.d 2025 telah sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1) Upaya yang dilaksanakan

- Melakukan koordinasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- Proses revisi RTRW masih belum selesai sampai dengan penetapan.

3) Rencana Tindaklanjut

- Memperkuat kerangka regulasi dalam penataan ruang dan pengembangan data spasial

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program yang berkontribusi terhadap naik/turunnya capaian kinerja serta efektifitasnya yaitu:

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- Program Penataan Bangunan dan Gedung;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; dan
- Program Penyelenggaraan Jalan.



Sasaran 6.3 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana di ukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana. Capaian dan analisis Indeks Risiko Bencana akan di jelaskan pada capaian RPJMD 2025-2029.

Sasaran 6.4 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana

Capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut.

Tabel 3.41
Realisasi Indikator Indeks Kapasitas Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,44 (Rendah)	0,68 (Sedang)	0,38 (Rendah)	0,66 (Sedang)	173,68

a. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Tolak ukur capaian tujuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana diukur dengan Indeks Kapasitas Daerah serta target yang telah ditetapkan atas indikator tersebut adalah 0,38 (rendah). Adapun realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan Adalah sebesar 0,68 (Sedang).

Capaian ini menggambarkan kinerja yang "cukup baik" Dimana realisasi kinerja melampaui target yang ditentukan meskipun masih dalam kategori sedang Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Hulu Sugai Utara dari Tahun 2023 (0,44) s.d Tahun 2024 (0,68) mengalami kenaikan indeks yang cukup signifikan sebesar (0,24) dan Tahun 2025 (0,66) mengalami sedikit penurunan sebesar (0,02). Faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja ini antara lain adalah Meningkatnya Mitigasi, Penanganan dan



Pemulihan Bencana merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya daerah yang tangguh terhadap bencana.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1) Upaya yang dilaksanakan

- pelaksanaan program mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana Peningkatan;
- Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor;
- penerapan sistem, standar operasional prosedur, serta dokumen perencanaan kebencanaan; dan
- Peningkatan SDM pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang kebencanaan.

2) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi personel kebencanaan
- Beban kerja yang tinggi, rotasi pegawai, serta belum meratanya akses terhadap pelatihan dan sertifikasi.
- keterbatasan anggaran serta belum memadainya sarana dan prasarana kebencanaan
- koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam beberapa kondisi masih belum berjalan secara optimal.
- integrasi sistem informasi, maupun kapasitas SDM dalam pengelolaannya
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atas risiko bahaya kebakaran.
- Terlambatnya pelayanan karena wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat dikarenakan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki unit pemadam untuk wilayah perairan.

3) Rencana Tindaklanjut

- Pelibatan Relawan Dan Komunitas Siaga Bencana Yang Terlatih.
- Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Risiko Bencana Serta Prioritas Kebutuhan Daerah.
- Penguatan Tata Kelola Kebencanaan.
- Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Yang Terintegrasi Antarperangkat Daerah.
- Harmonisasi Kebijakan Daerah Dengan Regulasi Yang Lebih Tinggi Secara Proaktif Dan Adaptif.
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
- Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Operasional
- Peningkatan Koordinasi Dan Sinergi Dengan Instansi Terkait



- Penguatan Upaya Pencegahan Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Tabel 3.42

Realisasi Indikator Penunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana

Sasaran / Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Mitigasi, Penanganan dan Pemulihan Bencana Daerah	Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,79	0,65
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,44	0,45
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,69	0,73

Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas merupakan elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada aspek pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko. Perkembangan capaian pada periode awal pelaksanaan RPD mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas yang ditopang oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan, serta pembentukan dan pembinaan kelembagaan siaga bencana di tingkat masyarakat.

Namun demikian, peningkatan tersebut masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya kapasitas antarwilayah, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi program secara lintas sektor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan telah memberikan dampak positif, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi kualitas, cakupan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah melalui pendekatan berbasis risiko, peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan, serta penguatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna memastikan peningkatan kapasitas yang lebih merata, terukur, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penanganan Bencana

Gambar 3.10
Dokumentasi Kegiatan dalam Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah



Apel Kesiap Siagaan Mitigasi Bencana



Pemulihan Pasca Bencana



Latihan Relawan Pencegahan dan Mitigasi Bencana



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2025-2029

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian yang kuat dan stabil

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Indikator Tujuan Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Stabil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
			2022	2023	2024*	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,08	4,51	4,41	4,52	5,02**	111,06	100,6
b	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	24,46	26,13	27,91	28,42	29,88**	105,14	40,6
c	Indeks Gini	Persen	0.301	0,271	0,276	0,260	0,276**	93,85	82,55

Sumber Data: Data diolah, BPS 2025

Catatan: * Angka Sementara 2024

** Angka Sangat Sementara



Tabel 3.44
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Stabil Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
			HSU**	HST**	Batola**	Tabalong**	Provinsi
a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,01	5,27	4,69	5,05*
b	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	29,88	37,59	36,34	126,52	70,58*
c	Indeks Gini	Persen	0,276	0,251	0,272	0,300	0,287**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah, 2025

Catatan: * Angka Sementara 2024

** Angka Sangat Sementara 2025

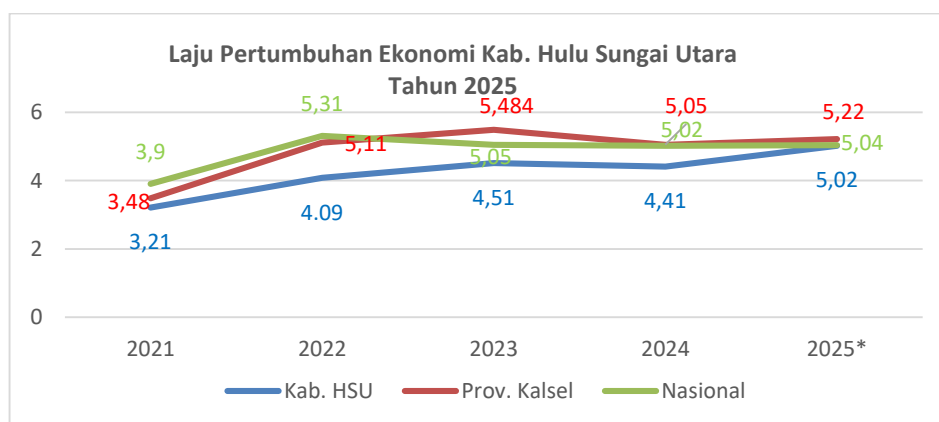
1) Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja tujuan Meningkatnya perekonomian daerah diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi serta target yang telah ditetapkan atas indikator tersebut sebesar 4,52%. Adapun realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar 5,02% dengan tingkat capaian 111,06%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “Sangat Berhasil”, dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan.

Capaian sampai akhir periode RPJMD tahun 2030 sebesar 100,6% dari target sebesar 4,99%, Hal ini menunjukkan progres yang positif dan melebihi target sehingga perlu dilakukan evaluasi atas target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.5
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dibandingkan dengan Prov. Kalsel dan Nasional



Sumber : Hulu Sungai Utara Dalam Angka, 2025

Catatan * : Angka Sangat Sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun



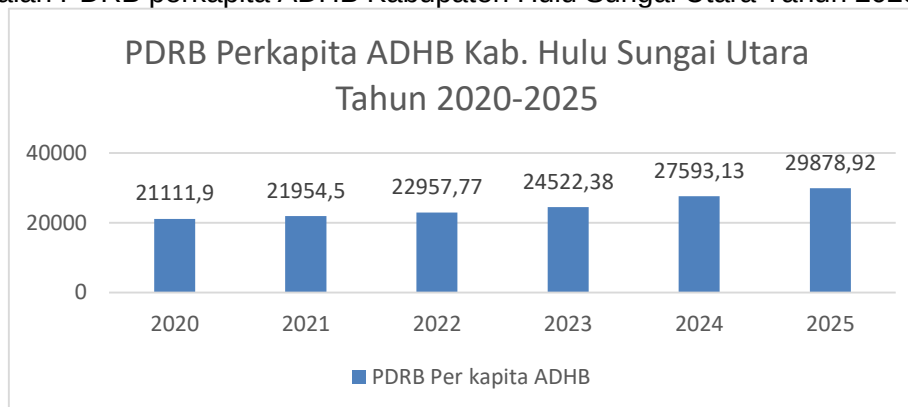
memiliki tren peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,41 persen.

b. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita dihitung berdasarkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku. Realisasi kinerja PDRB Perkapita sebesar Rp.29,88 (Juta) dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.28,42 (Juta) dengan tingkat capaian 105,14%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “Sangat Berhasil”, dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. Capaian sampai akhir periode RPJMD tahun 2029 sebesar 45,22% dari target tahun 2029 sebesar Rp 66,07 (Juta), Hal ini menunjukkan masih berprogres yang sehingga perlu usaha yang optimal dalam mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.6

Capaian PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025



Sumber: BPS, 2025

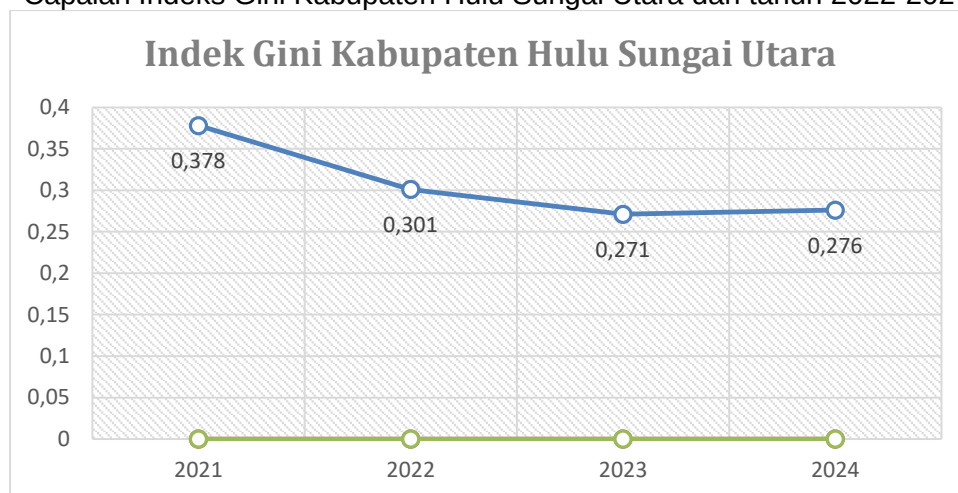
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB perkapita ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung naik dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi pertumbuhannya di banding pertumbuhan penduduk.

c. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 0,276% dari target sebesar 0,26%, sehingga persentase capaian Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 93,85%. Capaian sampai akhir periode RPJMD tahun 2029 sebesar 82,55% dari target sebesar 0,235%. Hal ini menunjukkan progres yang positif dan sebagai bahan evaluasi atas target yang ditetapkan. Capaian Indeks Gini Kab. Hulu Sungai Utara tahun 2021-2024 per 25 Juli 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3. 7
Capaian Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2022-2024



Sumber: BPS, 2025

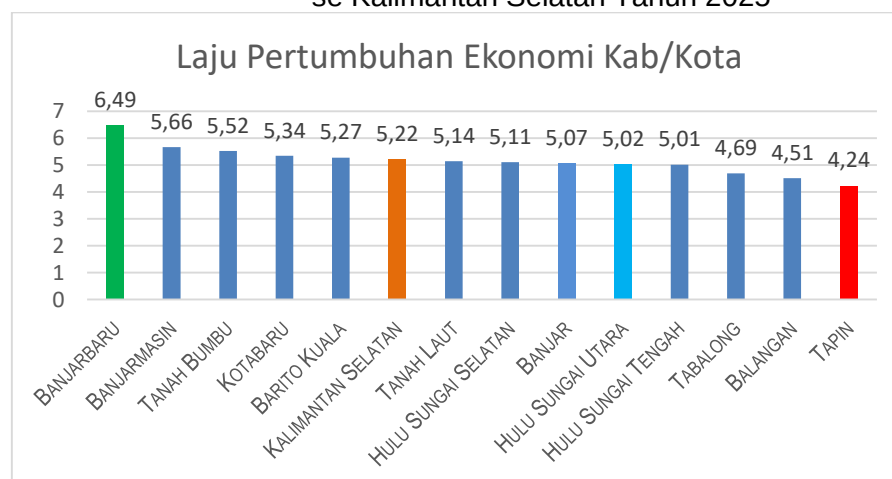
2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 5,02% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 5,05% maka masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong, akan tetapi masih diatas Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dibandingkan dengan Kab./Kota Se Kalimantan Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Kab/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2025



Sumber: BPS, 2025

Pada Tahun 2025 sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan. Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di urutan ke 9 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, meningkat dua peringkat di bandingkan dengan capaian tahun 2024.

b. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp29.878,92 (Ribu) jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar Rp70.576,83 (Ribu), masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dibandingkan dengan Kab./Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 9
Capaian PDRB Perkapita Kab./Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025

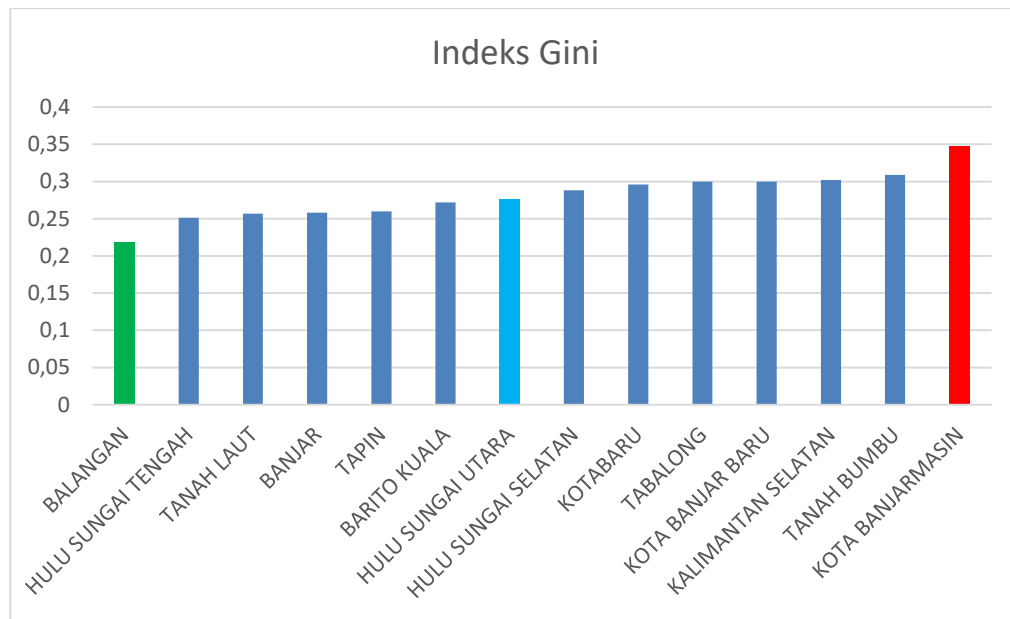


Sumber: BPS, 2025

c. Indeks Gini

Indek Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar 0,276% jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi tingkat capaiannya sebesar 0,276%, masih di bawah atau lebih baik dari capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,287 dan Kabupaten Tabalong sebesar 0,300%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala masih diatasnya. Indek Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dibandingkan dengan Kab./Kota Se-Kalimantan Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 10
Capaian Indeks Gini Kab./Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025

Catatan : Data Tahun 2025 belum publikasi.

Indek Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di urutan ke 7 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar 5,02% mengalami peningkatan sebesar 0,61% dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 4,41%.

Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025:

- Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7.160,06 miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp 29,87 juta.
- Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp 4.066,51 miliar.
- Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,61



persen.

- Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dari sisi produksi didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16,53 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 88,74 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran sebagai berikut:

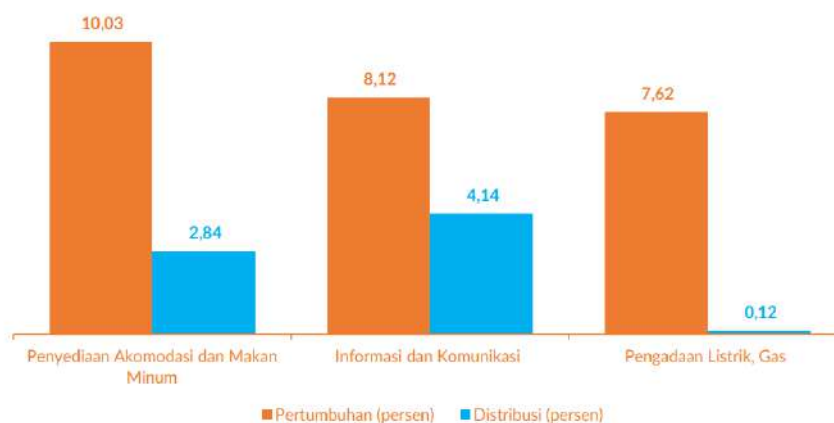
c) PDRB Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tumbuh sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 10,03 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,12 persen; serta Pengadaan Listrik, Gas sebesar 7,62 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi beserta besaran distribusinya terhadap total PDRB terlihat pada gambar dibawah:

Gambar 3.11

Pertumbuhan dan distribusi ekonomi beberapa Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun (persen),2025



Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,14 persen; diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,67 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,46 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari kategori lainnya sebesar 0,63 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut.

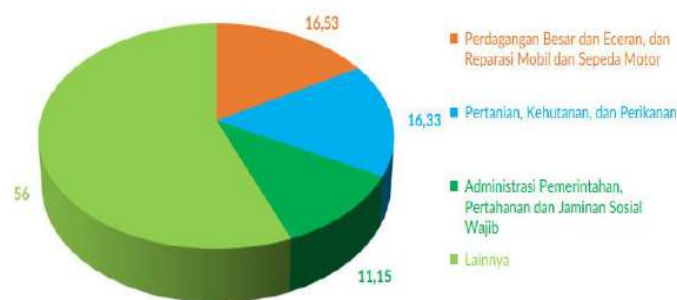
Gambar 3.12
Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025



2) Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,53 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,33 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,15 persen. Sementara itu, kategori lainnya menyumbang sebesar 56,00 persen. Struktur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.13
Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut lapangan usaha (persen), 2025



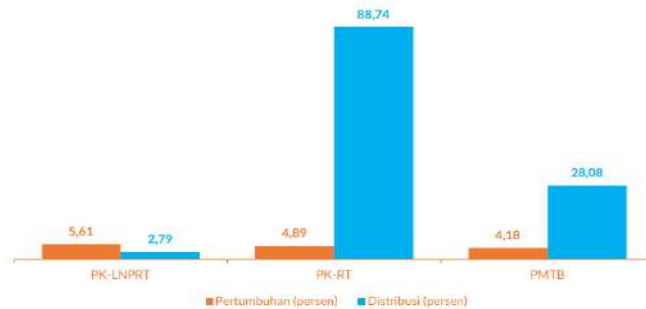
d) PDRB Menurut Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 terhadap tahun 2024 terjadi pada sebagian besar komponen. Tiga komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani

Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,61 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,18 persen. Pertumbuhan dan Distribusi per komponen dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14
Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen Pengeluaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara (persen), 2025



Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,50 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,15 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,62 persen. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2023–2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.15
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) Tahun
2023–2025



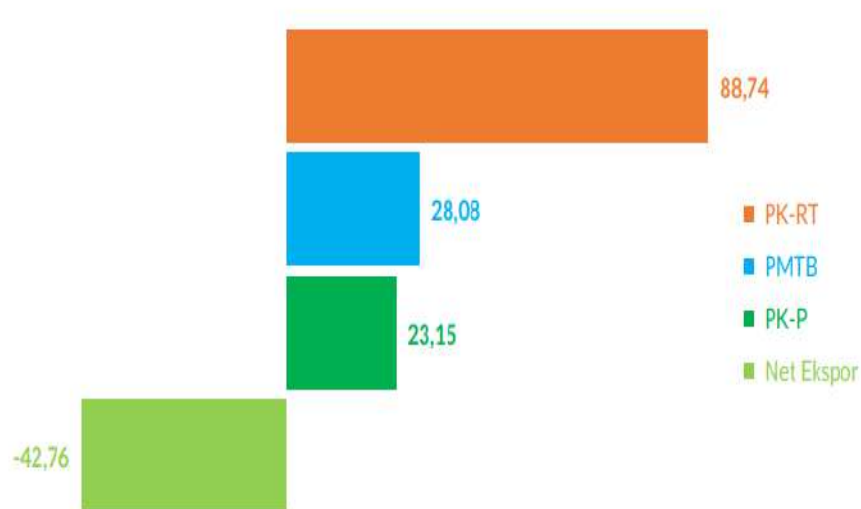
2) Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang

mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar 88,74 persen.

Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Model Tetap Bruto (PMTB) sebesar 28,08 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 23,15 persen. Sementara Komponen Net Ekspor memiliki share sebesar -42,76 persen. Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.16
Struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran (persen), 2025



b. PDRB perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 29.878 (Ribu) mengalami peningkatan sebesar Rp1.968,01 (Ribu) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 27.909,99 (Ribu). Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan membaiknya perekonomian.

Penyumbang terbesar berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 16,53 persen atau setara dengan 1.183,46 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,33 persen atau setara dengan 1.168,90 miliar rupiah. Hampir semua kategori mengalami pertumbuhan positif.

Faktor pembentuk atau Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 -2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.45
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-
2025

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,99	16,30	15,81	16,33
B	Pertambangan dan Penggalan	0,21	0,20	0,19	0,19
C	Industri Pengolahan	9,22	8,30	8,11	8,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,82	0,83	0,82
F	Konstruksi	10,84	10,72	10,15	10,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	16,28	16,54	16,53
H	Transportasi dan Pergudangan	7,30	7,67	8,07	8,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,72	2,73	2,76	2,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,18	4,15	4,11	4,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,20	3,21	3,18
L	Real Estate	3,53	3,49	3,47	3,47
M.N	Jasa Perusahaan	0,42	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,57	11,40	11,79	11,15
P	Jasa Pendidikan	9,48	9,20	9,37	9,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	2,64	2,59	2,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,29	2,35	2,43	2,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100

Sumber Data : Hulu Sungai Utara Dalam Angka, 2025

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

c. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 menggunakan data 2024 karena belum ada publikasi dari BPS, terealisasi sebesar 0,276% mengalami peningkatan sebesar 0,005% dari capaian tahun 2023 sebesar 0,271. Peningkatan ini dipengaruhi masih tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja tujuan:

- Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tinggi;
- Masih tingginya angka kemiskinan;
- Kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan;
- Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata membuat kesenjangan antara kelompok masyarakat semakin lebar.

Upaya yang dilaksanakan:

- Melaksanakan program pengentasan kemiskinan, seperti program bantuan sosial dan program pelatihan keterampilan;



- Perbaiki akses ke pendidikan dan kesehatan, seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Meningkatkan program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan;
- ✓ Meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM;
- ✓ Meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	883,00	997,92	1.094,79	1.197,02	1.183,46	98,87	60,28
Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	522,16	508,66	536,61	544,42	583,45	107,17	99,7
Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	907,00	998,92	1.046,48	1.126,39	1.168,90	103,77	72,25

Tabel 3.47
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
		HSU**	HST**	Batola**	Tabalong**	Provinsi*
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	1.183,46	1.355,26	1.679,46	2.856,85	28.179,44
Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	583,45	1.272,19	1.715,27	2.206,18	31.410,22
Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	1.168,90	2.337,63	3.251,31	2.898,01	33.119,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah, 2025

Catatan: * Angka Sementara 2024

** Angka Sangat Sementara



1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 1.183,46 (miliar) dari target sebesar Rp 1.197,02 (miliar), sehingga persentase capaian Nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 98,87%, Capaian ini menggambarkan kinerja yang “Berhasil”, dimana realisasi kinerja hampir mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan capaian sampai akhir periode RPJMD Tahun 2029 sebesar 60,28% atas target sebesar Rp 1.963,23 (miliar), hal ini menunjukkan progres yang cukup dan perlu dilakukan evaluasi serta upaya perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Nilai PDRB Sektor Perdagangan mengalami capaian realisasi kinerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2025.

b. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 583,45 (miliar) dari target sebesar Rp 544,42 (miliar), sehingga persentase capaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 107,17%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “Sangat Berhasil”, dimana realisasi kinerja hampir melebihi dari target yang ditentukan.

Capaian sampai akhir periode RPJMD tahun 2030 sebesar 99,7%, hal ini menunjukkan progres yang positif dan melebihi target sehingga perlu dilakukan evaluasi atas target yang telah ditetapkan.

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan mengalami capaian realisasi kinerja yang fluktuatif dimana mengalami penurunan tahun 2023 dan meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2025.

c. Nilai PDRB Sektor Pertanian

Nilai PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 1.168,90 (miliar) dari target sebesar Rp 1.126,39 (miliar) sehingga persentase capaian Nilai PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 103,77%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “Berhasil”, dimana realisasi kinerja hampir mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan capaian sampai akhir periode RPJMD Tahun 2029 sebesar 72,25% atas target sebesar Rp 1.617,84 (miliar), hal ini menunjukkan progres yang cukup dan perlu dilakukan evaluasi serta upaya perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami capaian realisasi kinerja yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 1.183,46 (miliar) jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi capaiannya sebesar Rp 28.179,44 (miliar), masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

b. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 583,45 (miliar), jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi capaiannya sebesar Rp 31.410,22 (miliar), masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

c. Nilai PDRB Sektor Pertanian

Nilai PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 1.168,90 (miliar), jika diperbandingkan dengan realisasi kinerja di tingkat provinsi capaiannya sebesar Rp 33.119,22 (miliar), masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala serta Tabalong.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.183,46 (miliar) mengalami peningkatan sebesar 88,67 (miliar) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 1.094,79 (miliar). Berdasarkan data tahun 2024 Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 10 persen. Sehingga kontribusi kategori ini mencapai 1.088,20 miliar rupiah atau sekitar 16,46 persen. Dari nilai tersebut, sebagian besar merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Keterbatasan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pasar dan pusat perbelanjaan;
- Keterbatasan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha perdagangan;



- Ketergantungan pada pasar lokal yang terbatas dan keterbatasan akses ke pasar regional dan nasional.

Upaya yang dilaksanakan:

- Pembangunan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pasar dan pusat perbelanjaan;
- Peningkatan kemampuan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan;
- Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk perdagangan;
- Pengembangan kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan akses pasar.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Mengembangkan program promosi perdagangan melalui media sosial dan pameran;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan keamanan produk perdagangan melalui penerapan standar kualitas dan keamanan;
- ✓ Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan logistik untuk meningkatkan akses pasar regional dan nasional;
- ✓ Meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola usaha perdagangan melalui pelatihan dan pendampingan

b. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terealisasi sebesar Rp 583,45 (miliar) mengalami peningkatan sebesar 46,84 (miliar) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 536,61 (miliar).

Peningkatan pada Industri Pengolahan berkembang dari 508,65 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 536,61 miliar rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan industri manufaktur di tahun 2024 naik dari tahun sebelumnya, dari 0,72 persen menjadi 1,90 persen.

Dari sisi kontribusi, kategori Industri Pengolahan menyumbang 8,12 persen terhadap total PDRB Hulu Sungai Utara pada tahun 2024. Angka ini cenderung stabil, mengingat sejak tahun 2020, kontribusi kategori ini berkisar antara 8,1 hingga 9,5 persen dari total PDRB.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan dan penyimpanan;
- Keterbatasan kemampuan manajemen dan pemasaran;
- Kurangnya akses ke pasar dan jaringan distribusi;
- Ketergantungan pada bahan baku lokal yang terbatas



Upaya yang dilaksanakan:

- Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan dan penyimpanan;
- Peningkatan kemampuan manajemen dan pemasaran melalui pelatihan dan pendampingan;
- Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk UMKM;
- Pengembangan kerjasama dengan petani lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Meningkatkan promosi produk UMKM melalui media sosial dan pameran;
- ✓ Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan akses pasar UMKM;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bahan baku lokal melalui pelatihan dan pendampingan kepada petani;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan keamanan produk melalui penerapan standar sanitasi dan keamanan pangan
- ✓ Mengembangkan produk-produk inovatif dan unik untuk meningkatkan daya saing
- ✓ Meningkatkan promosi produk melalui media sosial dan pameran

c. Nilai PDRB Sektor Pertanian

Nilai PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.168,90 (miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp 122,42 (miliar) dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 1.046,48 (miliar). Peningkatan ini dari Subkategori usaha Perikanan yang merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh peningkatan produksi dalam subkategori peternakan, termasuk kenaikan hasil produksi telur ayam dan bebek, daging sapi, daging ayam, dan daging kerbau.

Faktor pembentuk dari capaian kinerja ini antara lain diperoleh dari Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

**Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja:**

- Keterbatasan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi dan jalan pertanian;
- Keterbatasan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian;
- Ketergantungan pada cuaca dan iklim yang tidak menentu;
- Keterbatasan akses ke pasar dan jaringan distribusi.

Upaya yang dilaksanakan:

- Pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi dan jalan pertanian
- Pemberian bantuan teknologi dan peralatan pertanian modern kepada petani;
- Peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan dan pendampingan;
- Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk pertanian;
- Pengembangan kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan akses pasar.

Rencana tindaklanjut:

- ✓ Meningkatkan akses petani ke teknologi dan peralatan pertanian modern;
- ✓ Mengembangkan program asuransi pertanian untuk mengurangi risiko kegagalan panen;
- ✓ Meningkatkan promosi produk pertanian lokal melalui media sosial dan pameran;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian melalui penerapan standar kualitas dan keamanan pangan;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan dan peternakan melalui penerapan standar kualitas dan keamanan pangan;
- ✓ Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan pengolahan makanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan peternakan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran "Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa" yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;



- Program Penyuluhan Pertanian;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Sasaran 1.2 : Meningkatnya Investasi dan Kewirausahaan

Sasaran Meningkatnya Investasi dan Kewirausahaan di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.48

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Investasi dan Kewirausahaan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Kinerja pada Periode 2025			Target Akhir RPJMD 2030	Realisasi Capaian Akhir RPJMD 2030
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Peningkatan Investasi	Persen	1	1	1,29	129	6	21,50
Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,49	4,72	4,44	94,06	5,29	83,93

a) Perbandingan Realisasi dengan Target

1) Persentase Peningkatan Investasi

Berdasarkan tabel di atas, indikator persentase peningkatan investasi pada tahun 2025 menetapkan target sebesar 1%, dengan realisasi capaian sebesar 1,29%. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 129%, yang merepresentasikan kategori Sangat Berhasil. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa strategi penarikan investasi serta kebijakan kemudahan berusaha yang diimplementasikan telah berjalan secara efektif dan melampaui proyeksi perencanaan tahunan yang telah ditetapkan.



2) Rasio Kewirausahaan

Berdasarkan data di atas, indikator Rasio Kewirausahaan pada tahun 2025 menetapkan target sebesar 4,72 dengan realisasi capaian sebesar 4,44. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 94,06%, yang menurut kriteria penilaian LAKIP termasuk dalam kategori Berhasil (Tinggi). Meskipun belum mencapai target 100%, tren pertumbuhan menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 2,49, terjadi kenaikan signifikan sebesar 1,95 poin atau tumbuh sekitar 78,3%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa program penumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan secara efektif.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

1) Persentase Peningkatan Investasi

Realisasi tahun 2024 sebesar 1%, dan tahun 2025 sebesar 1,29%, terjadi peningkatan pertumbuhan 0,29% dalam setahun. Ini menunjukkan tren yang positif dan akseleratif, dimana kemampuan daerah/instansi dalam meningkatkan investasi terus menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2025 tidak hanya lebih baik dari tahun lalu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap target jangka panjang RPJMD.

Analisis realisasi terhadap target akhir RPJMD Tahun 2029 dengan target akhir 6%, sehingga realisasi capaian akhir saat ini 21,50%. Meskipun capaian tahunan melampaui 100%, akselerasi investasi perlu terus dijaga secara konsisten untuk mengejar akumulasi target 6% di akhir periode 2029.

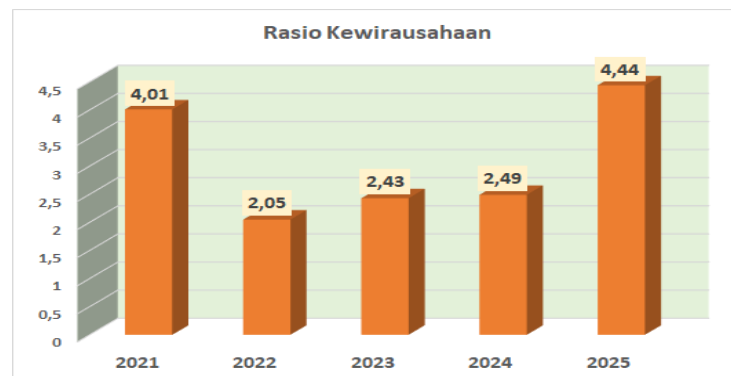
2) Rasio Kewirausahaan

Peningkatan signifikan indikator kewirausahaan dari angka 2,05 pada tahun 2022 menjadi 4,44 pada tahun 2025 menggambarkan efektivitas intervensi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa upaya stimulasi dan pendampingan yang dilakukan telah berhasil membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di daerah.

Merujuk pada target akhir periode tahun 2029 sebesar 5,29, progres capaian saat ini telah menyentuh angka 83,93%. Realisasi ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam memenuhi target jangka panjang. Dengan tren pertumbuhan yang positif ini, optimisme untuk melampaui target sebelum berakhirnya periode RPJMD sangat terbuka lebar, didukung oleh penguatan integrasi program pemberdayaan

ekonomi lokal yang terus ditingkatkan.

Gambar 3.17
Realisasi Capaian Kinerja Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025



(Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan LAKIP DPMPTSP 2026)

Dari Grafik terlihat secara keseluruhan indikator rasio kewirausahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2025 menunjukkan fluktuasi yang dinamis. Pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan signifikan dari angka 4,01 di tahun 2021 menjadi 2,05 di tahun 2022. Hal ini terjadi sebagai dampak lanjutan pasca pandemi yang memicu penutupan usaha mikro serta validasi ulang data pelaku usaha yang lebih selektif. Mulai tahun 2022-2024, rasio menunjukkan tren pertumbuhan positif yang stabil, naik ke 2,43 (2023) dan 2,49 (2024). Ini menunjukkan efektivitas awal dari program stimulus ekonomi dan pelatihan UMKM. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2025 di angka 4,44, dalam setahun, ini merupakan rekor tertinggi selama enam tahun terakhir. Terjadi kenaikan sebesar 78,3% dibandingkan tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa program intervensi (seperti pelatihan kewirausahaan muda atau bantuan modal) memiliki daya ungkit (*leverage*) yang sangat tinggi terhadap pencapaian target sasaran ekonomi.

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Persentase Peningkatan Investasi

➤ Upaya yang telah dilakukan :

- Digitalisasi perizinan dengan mengoptimalkan layanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang terintegrasi untuk mempercepat penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Penyusunan Peta Peluang Investasi melalui Pemutakhiran data potensi dan peluang investasi daerah yang akurat dan mudah diakses oleh calon investor.
- Pemetaan potensi investasi daerah yang spesifik (seperti pengolahan



produk turunan rawa) untuk dipromosikan kepada calon investor.

- Penyederhanaan Birokrasi, dengan Implementasi layanan bantuan pemenuhan komitmen perizinan melalui "Garda Terdepan" pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- Pembentukan satgas pengawalan investasi untuk membantu penyelesaian kendala yang dihadapi investor eksisting (fasilitasi debottlenecking).
- Pelaksanaan forum bisnis dan *market sounding* yang mempertemukan investor dengan proyek-proyek strategis potensial di daerah.
- Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha lokal maupun luar daerah melalui fasilitasi non-fiskal dan pendampingan kepatuhan laporan (LKPM).

➤ Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Meskipun realisasi melampaui target, terdapat beberapa tantangan yang membatasi akselerasi investasi agar bisa lebih tinggi lagi:

- Keterbatasan Infrastruktur Penunjang, Belum optimalnya konektivitas infrastruktur (jalan/listrik/air) menuju kawasan industri atau lokasi investasi baru.
- Masih ditemukannya kendala dalam proses pembebasan lahan dan kesesuaian tata ruang (KKPR) di beberapa titik proyek strategis.
- Masih terdapat pelaku usaha (khususnya skala menengah) yang belum tertib dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik.
- Tantangan dalam penyediaan lahan investasi yang bebas konflik serta sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW) yang terus berkembang.

➤ Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan mengejar target RPJMD 2029 (6%), langkah-langkah berikut akan diambil:

- Menyusun kebijakan pemberian insentif pajak daerah atau kemudahan non-fiskal bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
- Melakukan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS untuk kepastian lokasi usaha.
- Digitalisasi promosi, dengan Mengembangkan *Virtual Expo* dan platform digital interaktif yang menampilkan profil proyek investasi siap bangun (*ready to offer*).
- Memperkuat fungsi *helpdesk* perizinan untuk merespons keluhan investor secara *real-time*.



Peningkatan investasi daerah dilakukan secara terpadu termasuk dalam pemberian pelayanan publik yang prima dan berbasis digital. Peningkatan investasi pasca implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan akan tumbuh semakin efektif dan efisien dalam rangka menggerakkan semua sektor perekonomian. Dari sisi lapangan usaha, perlu perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi sumber daya alam. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

2) Rasio Kewirausahaan

➤ Upaya yang telah dilakukan

- Penyediaan sarana dan prasarana, dengan optimalisasi pusat promosi kerajinan dan produk unggulan daerah sebagai wadah pemasaran kolektif.
- Penyederhanaan perizinan melalui Sosialisasi masif dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA hingga ke tingkat desa.
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang terfokus pada pemuda dan perempuan (Wirausaha Baru/WUB).
- Adanya event promosi, berupa pameran tingkat provinsi dan nasional setiap tahunnya

➤ Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Prosedur administrasi dan birokrasi yang rumit dalam proses perizinan, pembiayaan, atau pengawasan koperasi seringkali menjadi hambatan dalam melaksanakan pembinaan koperasi secara efisien.
- Terbatasnya modal pelaku usaha Kecil Menengah dan pelaku usaha industri kecil menengah.
- Masih adanya kendala bagi wirausaha pemula dalam memenuhi persyaratan administratif perbankan (permodalan formal).
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam strategi pemasaran, promosi dan branding, dan Keterbatasan kemampuan manajerial dan inovasi kemasan produk bagi pelaku usaha di wilayah pelosok.
- Kenaikan biaya produksi yang seringkali tidak sebanding dengan daya beli masyarakat lokal, sehingga mengancam keberlangsungan usaha kecil.
- Persaingan ketat dan kurangnya akses pasar
- Masih rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, sehingga daya saing produk unggulan di tingkat nasional belum optimal.



➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Meningkatkan jalinan kerja sama antar koperasi serta dengan sektor lain (seperti Pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan) akan mempermudah Koperasi dalam menjalankan usaha dan memperluas pasar.
- Program pelatihan keterampilan bagi anggota dan pengurus koperasi seperti pelatihan manajemen simpan pinjam, atau akses pasar yang lebih baik, dapat mendorong pembinaan koperasi untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Melakukan strategi peningkatan kinerja dengan Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
- Pengembangan kerjasama dengan stakeholder termasuk masyarakat dan Lembaga pemerintah lainnya.
- Memperkuat kemitraan dengan Menjalin kerja sama dengan perbankan dan sektor swasta (CSR) untuk skema pembiayaan mikro yang lebih mudah dijangkau.
- Melaksanakan pendampingan berkelanjutan dengan menggeser pola pelatihan dari sekadar "*short-course*" menjadi pendampingan intensif (*mentoring*) hingga usaha benar-benar mandiri.
- Integrasi data melalui sinkronisasi data wirausaha antara Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian, dan DPMPSTSP untuk memastikan intervensi program tepat sasaran.
- Mendorong sertifikasi ekspor bagi produk unggulan HSU (seperti kerajinan purun dan eceng gondok) agar tidak hanya bergantung pada pasar domestik.

d) Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Program yang menunjang kinerja sasaran meningkatnya investasi dan kewirausahaan sebagai berikut.

- Program Peningkatan Iklim Investasi: Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan bimbingan teknis tata cara pengisian LKPM bagi pelaku usaha.
- Program Promosi Penanaman Modal: Partisipasi dalam pameran investasi skala regional/nasional serta pembuatan profil investasi berbasis digital.
- Program Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal: Kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal untuk memastikan keberlanjutan operasional investasi.
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Menengah, dan Usaha



Mikro (UMKM) : kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, berupa pelatihan teknis produksi dan standarisasi mutu produk (PIRT, Halal).

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal: Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- Program Promosi Penanaman Modal: Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pelayanan Penanaman Modal: Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 1.3 : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.49

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Investasi dan Kewirausahaan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Kinerja pada Periode 2025			Target Akhir RPJMD 2030	Realisasi Capaian Akhir RPJMD 2030
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,75	5,46	4,81	111,90	4,23	86,29
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73	3,66	3,79	96,45	3,30	85,15

Rumus Perhitungan :

Tingkat Kemiskinan: $\text{Jumlah Penduduk Miskin} / (\text{Jumlah Penduduk Total}) \times 100\%$

Definisi Operasional : Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu



memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka: $\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja} / (\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}) \times 100\%$

Definisi Operasional : Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

a) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

1) Tingkat Kemiskinan

Realisasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 5,75%. Keberhasilan pencapaian target tahunan sebesar 111,90% merepresentasikan efektivitas berbagai program intervensi kemiskinan yang telah dijalankan secara terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Meskipun menunjukkan performa yang optimal, tantangan strategis tetap terfokus pada pencapaian target akhir periode RPJMD tahun 2029 sebesar 4,23%. Dengan progres capaian saat ini yang telah menyentuh angka 86,29%, diperlukan konsistensi serta penguatan sinergi program lintas sektor guna memastikan akselerasi penurunan angka kemiskinan tetap terjaga dan target jangka panjang dapat terealisasi tepat waktu.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebesar 3,79%. Angka ini menunjukkan fluktuasi peningkatan sebesar 0,06% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada pada angka 3,73%. Dengan capaian kinerja sebesar 96,45%, target tahunan yang telah ditetapkan belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga diperlukan evaluasi komprehensif terhadap program perluasan kesempatan kerja serta penguatan relevansi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelarasan antara keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja lokal menjadi agenda prioritas guna mengakselerasi penurunan angka pengangguran demi mencapai target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 3,30%.

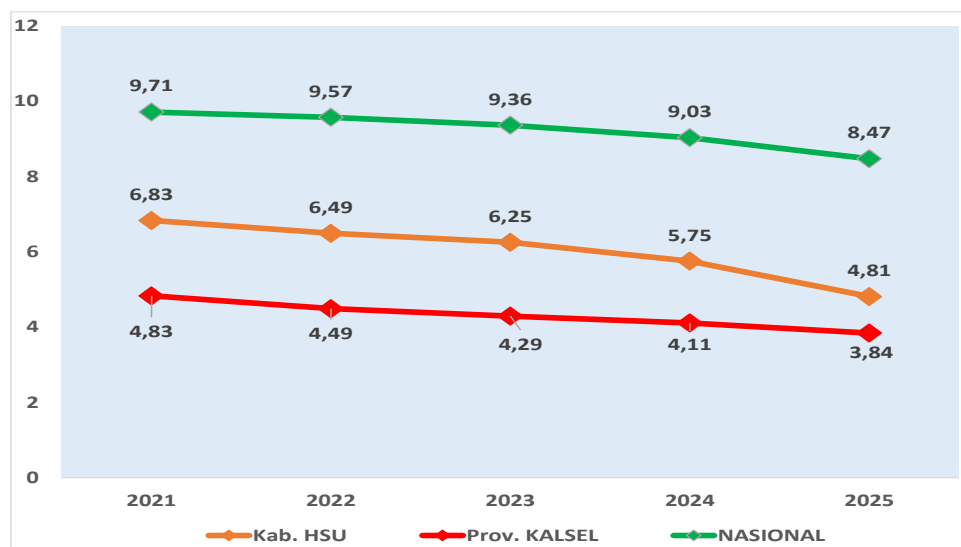


b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

1) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2021-2025, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dimana angka persentase penurunan tertinggi pada tahun 2025 (5,75%) sebesar 0,94% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 (5,75%). Ini menunjukkan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan pada tahun terakhir meningkat hampir dua kali lipat dibanding rata-rata tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa tekanan yang mendorong peningkatan kemiskinan pada periode sebelumnya mulai mereda, baik melalui perbaikan aktivitas ekonomi, penyesuaian pasar kerja, maupun faktor lain yang mempengaruhi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.

Gambar 3.17
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021- 2025



Sumber : BPS, 2026

Berdasarkan posisi relatif, persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025 berada di posisi 12 dari 13 Kabupaten/Kota atau nomor 2 tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5,03%) dan masih lebih tinggi dari persentase kemiskinan provinsi (3,84%). Angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional (8,47%).

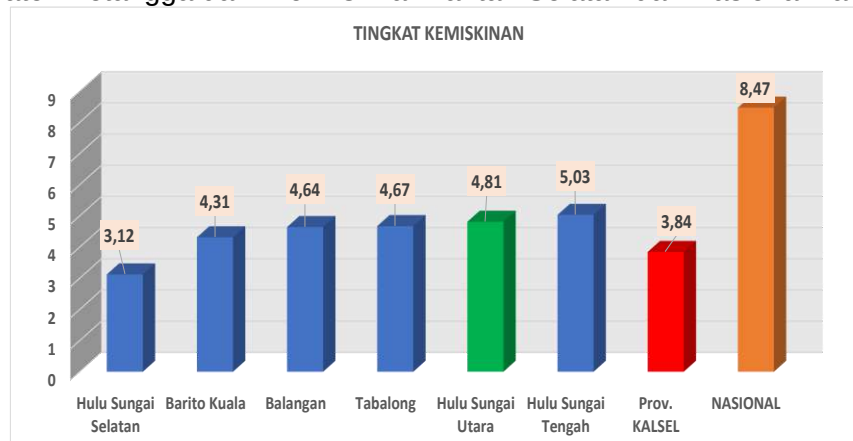
Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 4,81% merupakan pencapaian terbaik dalam 5 tahun terakhir. Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan secara konsisten di tengah dinamika ekonomi menunjukkan bahwa strategi intervensi bantuan sosial dan

pemberdayaan ekonomi tepat sasaran. Namun, posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih berada di atas rata-rata Provinsi menuntut penguatan sinergi program lintas sektor, khususnya dalam menangani kantong-kantong kemiskinan di wilayah perairan/rawa yang menjadi karakteristik unik daerah.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara (4,81%) masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 3,84%. Terdapat gap sebesar 0,97% yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan akselerasi program agar selaras dengan rata-rata capaian provinsi.

Secara makro, tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih jauh lebih baik dibandingkan capaian Nasional yang berada pada angka 8,47%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kondisi kerentanan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh lebih terkendali dibandingkan rata-rata kondisi di tingkat nasional.

Gambar 3.18
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2025



Sumber : BPS, 2026.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara (4,81) masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Utara (5,03). Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif lebih mampu menekan laju kemiskinan dibanding wilayah tetangga terdekat tersebut. Namun angka tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada di atas Kabupaten Hulu Sungai Selatan (3,12%), Barito Kuala (4,31%), Balangan (4,64%), dan Tabalong (4,67%). Terdapat selisih sebesar 1,69% dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.

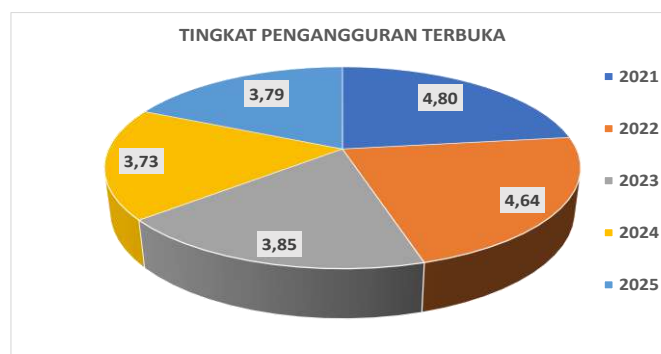
2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan tahun

2021 (4,80%), angka pengangguran pada tahun 2025 (3,79%) telah mengalami penurunan sebesar 1,01 poin persentase. Ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam pemulihan pascapandemi dan penyerapan tenaga kerja secara bertahap. Terdapat kenaikan tipis pada angka TPT dari 3,73% di tahun 2024 menjadi 3,79% di tahun 2025 (naik 0,06 poin). Kenaikan ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam penyerapan tenaga kerja baru atau peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja pada periode tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki angka pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (4,16%). Ini merupakan capaian positif di mana HSU berkontribusi dalam menjaga angka pengangguran provinsi tetap rendah. Selain itu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara (3,79%) berada jauh di bawah angka Nasional (4,85%). Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, kondisi ketenagakerjaan di HSU masih jauh lebih stabil dibandingkan rata-rata nasional.

Gambar 3.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara 2021- 2025



Sumber : BPS, 2026.

Gambar 3.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2025



Sumber : BPS, 2026.



Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 3,79% menunjukkan performa yang baik secara makro karena tetap berada di bawah angka rata-rata Provinsi (4,16%) dan Nasional (4,85%). Namun, tren kenaikan sebesar 0,06 poin dari tahun sebelumnya serta posisi TPT yang tertinggi di antara kabupaten tetangga menjadi catatan penting. Hal ini menuntut perlunya optimalisasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penguatan sektor UMKM/Informal sebagai penyerap tenaga kerja utama di HSU guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten sekitar.

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025 penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berhasil dengan rata-rata penurunan kemiskinan sebesar 0,51%. Salah satu yang mendorong penurunan ini adalah program-program pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin.

➤ Upaya yang sudah dilakukan

- Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi lansia terlantar dan masyarakat miskin
- Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi masyarakat miskin berupa purun, jukung dan bantuan permodalan untuk usaha ekonomi produktif lainnya.
- Penyaluran bantuan pangan dan PKH dari Kementerian Sosial
- Bantuan kebutuhan pangan dan lainnya bagi anak terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Pemberian bantuan sosial permakanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan gelandangan pengemis
- Pemberian bantuan sosial kursi roda bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas;
- Rujukan untuk mengikuti pelatihan praktek belajar kerja bagi anak terlantar;
- Pemberian layanan penelusuran keluarga dan reunifikasi bagi orang terlantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis;
- Pemberian layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi kelompok rentan;
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lansia terlantar;
- Pemberian Layanan Kedaruratan.



- Pemberian layanan data dan pengaduan.
- Bantuan sarana pertanian seperti benih, alat dan mesin pertanian, pupuk dan obat-obatan.
- Bantuan prasarana pertanian seperti rehabilitasi balai penyuluhan pertanian, pembangunan jalan usaha tani dan gudang alsintan.
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada petani dan peternak.

➤ **Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja**

Beberapa faktor yang menghambat laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

- Karakteristik wilayah rawa yang luas membatasi aksesibilitas ekonomi masyarakat pedalaman dan meningkatkan biaya distribusi logistik bahan pokok.
- Mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian/perikanan air tawar yang sangat bergantung pada musim dan kondisi alam (banjir atau kemarau panjang).
- Masih terdapat kelompok masyarakat (desil 4 sebanyak 23.649 orang). yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang sangat rentan kembali menjadi miskin jika terjadi guncangan ekonomi (seperti inflasi pangan atau kenaikan harga BBM).
- Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah keluarga miskin menjadi kendala dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.
- Angka pengangguran yang masih tinggi, terutama di kalangan usia produktif.
- Tidak meratanya akses terhadap perumahan layak, sanitasi yang memadai, dan air bersih turut berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan.
- Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga terkendala oleh keterbatasan anggaran baik dari APBD, APBN maupun sumber dana lainnya seperti CSR.
- Bencana alam yang terjadi di Kabupaten HSU juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan menghambat upaya pengentasannya.
- Pengelola Koperasi tidak mempunyai dasar pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan koperasi, kewirausahaan, dan keuangan sehingga dapat menyebabkan koperasi sulit berkembang.
- Kurangnya keterlibatan anggota, ketika anggota koperasi tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan atau kegiatan koperasi, ini dapat mengurangi kepercayaan dan komitmen anggota terhadap koperasi sehingga pembinaan sulit untuk dilaksanakan.



- Tata kelola koperasi yang tidak baik padahal koperasi yang sehat memiliki sistem tata kelola yang baik, dimana ada pemisahan tugas yang jelas antara pengurus, pengawas, dan manager, serta transparansi dalam pengelolaan koperasi.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Verifikasi dan validasi data DTKS agar bantuan sosial yang diberikan lebih tepat sasaran.
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, seperti membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- Melakukan pemutakhiran data P3KE secara berkala agar intervensi program kemiskinan tidak "salah sasaran".
- Adanya kesepakatan dan komitmen semua pihak sesuai arahan Presiden untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan sasaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Ekstrem;
- Memfasilitasi pengolahan pasca-panen (industri rumah tangga) agar nilai jual produk meningkat.
- Sinkronisasi program antara Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Koperasi-UMKM melalui satu peta jalan penanggulangan kemiskinan yang terpadu.
- SKPD agar melaksanakan percepatan realisasi kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk kegiatan-kegiatan fisik agar bisa dilaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa lebih dini.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

➤ **Upaya yang Telah Dilakukan**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan berbagai intervensi strategis untuk menjaga stabilitas pasar kerja, antara lain:

- Peningkatan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kejuruan teknis (menjahit, otomotif, desain grafis) guna menyesuaikan *supply* tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
- Penguatan Sektor UMKM melalui Pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan manajerial bagi wirausaha pemula untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor informal.
- Pemanfaatan potensi lahan rawa melalui program intensifikasi pertanian



dan perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi lulusan pendidikan (khususnya tingkat menengah/kejuruan) dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang didominasi sektor pertanian dan perdagangan skala kecil membuat penyerapan tenaga kerja formal masih terbatas.
- Adanya peningkatan angkatan kerja dimana Pertumbuhan jumlah lulusan sekolah baru setiap tahunnya lebih cepat dibandingkan dengan laju penciptaan lapangan kerja di tingkat regional.
- Adanya perlambatan pada sektor-sektor pendukung di kabupaten tetangga yang biasanya menjadi tempat migrasi pekerja dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Menyesuaikan jenis kejuruan di BLK dengan tren ekonomi digital dan kebutuhan industri spesifik di wilayah Kalimantan Selatan.
- Memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) untuk program magang agar lulusan memiliki pengalaman kerja riil.
- Sinkronisasi Data Pencari Kerja dengan memperkuat koordinasi data antar desa dan kecamatan untuk memetakan kantong pengangguran secara lebih presisi (*By Name By Address*).

d) Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Keberhasilan indikator ini didukung oleh sinergi beberapa program unggulan:

- Program Pendidikan dan Latihan Koperasi: kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah.
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi: kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah.
- Program Penilaian Kesehatan KSP/ Koperasi: kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah.
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Dalam Daerah.
- Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial



Daerah

- Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah.
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta, dan Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
- Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah, Kegiatan Pemberdayaan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah, dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sasaran 1.4 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan

Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Perdesaan di ukur dengan indikator Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Persentase desa mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara



pada tahun 2024 mencapai 24,30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak desa di wilayah ini yang perlu dikembangkan sehingga dapat mencapai status desa mandiri. Indeks Desa diharapkan dapat menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa di Indonesia. Indeks Desa dipergunakan dalam RPJPN 2025-2045 untuk mengukur kemandirian desa melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Capaian kinerja atas sasaran " Meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut.

a. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Indikator Indeks Desa Tahun 2025

IKU Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Desa	432	490,5	113,54%

Capaian Indeks Desa menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di Desa mengalami kemajuan dan kemandirian dan telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 432, realisasi yang dicapai adalah 490,5 dengan capaian persentase realisasi 113,54%, Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian desa pada setiap indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Desa dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Desa	Indeks	N/A	N/A	427,034	432	490,5	113,54%

Adapun nilai Indeks Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 adalah 427,034 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar 490,05 maka ada kenaikan sebanyak 63,02 antara capaian tahun 2024 dengan realisasi tahun 2025.

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Upaya yang dilaksanakan

- perlu memetakan desa-desa yang berpotensi naik status pada tahun 2026;
- menyusun program intervensi yang terukur bagi masing-masing desa;
- Kolaborasi dengan Bappeda dalam pemutakhiran data Indeks Desa.



2) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- Ada beberapa Desa yang hanya bisa di akses menggunakan transportasi air.
- Adanya beberapa desa yang masih sulit untuk mengakses internet.

3) Rencana tindaklanjut

- Melakukan akselerasi program desa mandiri dan penguatan kemandirian desa;
- Pemutakhiran data indeks desa secara berkala;
- Replikasi praktik antar desa untuk pertukaran pengalaman antar desa.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu ;

- Program Penataan Desa;
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; dan
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Indikator Tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Kinerja pada Periode 2025			Target Akhir RPJMD 2030	Realisasi Capaian Akhir RPJMD 2030
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,12	72,79	72,67	99,84	76,30	95,24

(Sumber BPS, 2026)

a) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2025, target kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebesar 72,79. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai adalah sebesar 72,67. Meskipun terdapat selisih tipis sebesar 0,12 poin dari target yang direncanakan, angka 72,67 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 71,12, maka terjadi peningkatan sebesar 1,55 poin pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif yang signifikan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar



hidup layak secara berkelanjutan.

Mengingat sisa waktu periode RPJMD masih cukup panjang dan capaian saat ini sudah mencapai 95,24%, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peluang besar untuk melampaui target akhir tersebut sebelum tahun 2029, asalkan konsistensi program penguatan daya beli dan kualitas pendidikan tetap terjaga. Untuk memastikan target 76,30 pada tahun 2029 tercapai, perlu dilakukan penguatan pada komponen penyusun IPM yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar, seperti peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran Perkapita, Harapan Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup.

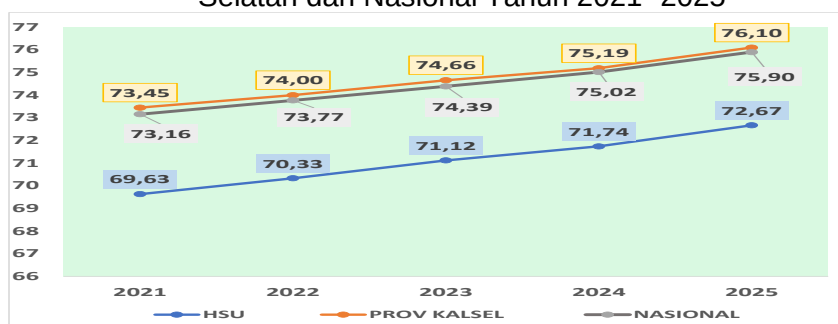
b) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan grafik garis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari Gambar dibawah terlihat mengalami perbaikan angka, dimana IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 hanya sebesar 69,63 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi 72,67. Dalam lima tahun terakhir, terdapat kenaikan total sebesar 3,04 poin. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2024 ke 2025, yaitu sebesar 0,93 poin (dari 71,74 ke 72,67). Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pembangunan manusia di HSU semakin efektif dan berakselerasi di tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program-program yang mendukung terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat dikatakan sesuai harapan dan sasaran.

Walaupun IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap program-program yang telah dilaksanakan dengan melakukan intervensi terhadap variabel-variabel dari Indeks Pembangunan Manusia.

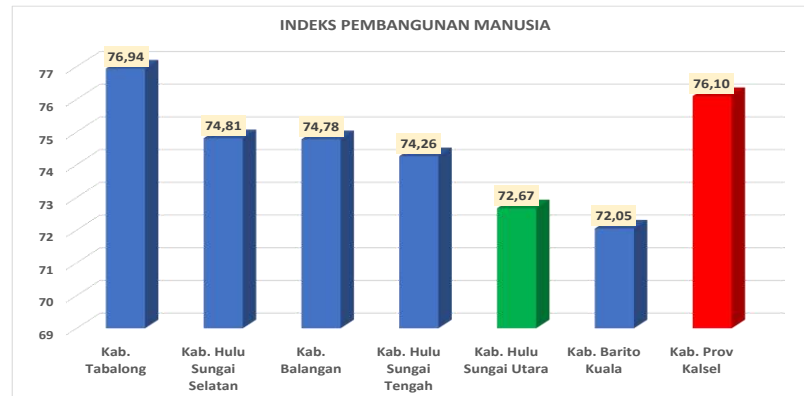
Gambar 3.21

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021- 2025



Sumber: BPS, 2026

Gambar 3.22
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara
dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun
2025



Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2026

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten tetangga dari Gambar 3.2 terlihat bahwa IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota, dan berada setingkat di atas Kabupaten Barito Kuala (72,05) dengan selisih angka sebesar 0,62. Namun tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk dalam kategori “tinggi”, karena Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah diatas 70.

Terdapat selisih sebesar 1,59 poin dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (74,26) dan selisih sebesar 4,27 poin dengan Kabupaten Tabalong yang memimpin di angka 76,94. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten HSU perlu melakukan akselerasi lebih kuat pada indikator-indikator penyusun IPM (seperti pendidikan dan ekonomi) untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten tetangga di wilayah Banua Anam.

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mengalami kenaikan, dimana sejak tahun 2022 status pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup berhasil berada pada kategori “tinggi” dengan nilai 70,33. Pada 2022-2025, IPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara rata-rata meningkat 0,78 persen per tahun, dari 70,33 tahun 2022 menjadi 72,67 pada tahun 2025. Peningkatan IPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk, antara lain:

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 (72,67) mengalami peningkatan sebesar 0,93 tahun dibandingkan tahun 2024 (71,74). Tren peningkatan yang berkelanjutan selama kurun waktu 2021–2025 ini



merepresentasikan keberhasilan dalam penguatan derajat kesehatan masyarakat, di mana rata-rata penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara saat lahir diproyeksikan memiliki usia harapan hidup hingga 72-73 tahun.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 (13,47) mengalami peningkatan sebesar 0,26 tahun dari angka 13,21 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program perluasan akses pendidikan formal bagi anak usia sekolah serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjamin keberlanjutan masa studi penduduk.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian Rata-rata Lama sekolah pada tahun 2025 sebesar 8 tahun, meningkat sebesar 0,22 tahun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 7,78 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas modal manusia melalui akumulasi jenjang pendidikan yang berhasil dituntaskan oleh penduduk usia dewasa.

4) Pengeluaran Per Kapita

Berbeda dengan indikator lainnya, Pengeluaran Per Kapita tahun 2025 (Rp.1.223.897,-) mengalami penurunan tipis sebesar Rp 1.971,- dibandingkan tahun 2024 (Rp. 1.225.868,-). Pengeluaran per kapita merupakan indikator untuk mengukur dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*). Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak perbaikan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran per kapita, semakin tinggi tingkat kemakmuran seseorang. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menduduki peringkat terendah di antara 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan penguatan kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran guna mengakselerasi penanggulangan kemiskinan dan meminimalkan ketimpangan ekonomi.

Tabel 3.53
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Hulu Sungai Utara	72,95	13,47	8,00	1.223.897	72,67
Barito Kuala	72,85	12,69	7,99	1.326.935	72,05
Hulu Sungai Tengah	73,02	12,58	8,45	1.492.858	74,26
Tabalong	74,95	13,18	9,37	2.110.399	76,94
Hulu Sungai Selatan	73,27	12,78	8,18	1.307.079	74,81
Balangan	74,14	13,35	8,34	1.575.883	74,78
Prov. Kalsel	74,49	13,12	8,81	1.603.501	76,10
Nasional	75,54	13,30	9,07	1.569.088	75,90

Sumber : BPS, 2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Umur Harapan Hidup (UHH)



berada pada peringkat ke 12 dari Kabupaten/Kota, diatas Kabupaten Barito Kuala, dan masih dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di peringkat ke 3 dari Kabupaten/Kota, dan berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pencapaian ini sangat berhasil dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.

Komponen Rata-rata lama sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada pada peringkat ke 10 dari Kabupaten/Kota, diatas Kabupaten Barito Kuala dan Kotabaru, dan masih berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, sedangkan untuk Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di peringkat ke 13 dari Kabupaten/Kota, dan dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, ini menjadi tantangan ekonomi riil yang menahan laju peningkatan IPM.

Berdasarkan hasil analisa di atas diketahui bahwa peningkatan nilai IPM dengan didukung oleh komponennya di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih ada 3 komponen IPM yang perlu ditingkatkan kembali yaitu Umur Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Penduduk Per Bulan.

➤ **Upaya Yang Telah Dilakukan**

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penyediaan obat, BMHP dan alat Kesehatan, memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin melalui perlindungan Masyarakat miskin dan integrasi jaminan kesehatan untuk mencapai UHC.
- Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri dari Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, DBD, TB dan penyakit lainnya, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular seperti kanker, hipertensi, diabetes dan lain-lain, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
- Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat dan Percepatan penurunan stunting terdiri dari Peningkatan Pendidikan gizi yaitu melalui penyuluhan gizi kepada Masyarakat, anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, Pemberian PKMK dan Protein hewani berupa telur untuk pencegahan maupun pengobatan masalah gizi, dan Kegiatan konvergensi stunting yang dilaksanakan mulai di tingkat kecamatan hingga kabupaten.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah
- Rehabilitasi gedung sekolah, Ruang Kelas, Unit Kesehatan Sekolah, perpustakaan sekolah
- Pengadaan Mebel sekolah, Alat Praktik dan Peraga Siswa, perlengkapan siswa



- Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan
- Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
- Pemberian Bantuan Usaha ekonomi Produktif bagi masyarakat miskin berupa purun, jukung dan bantuan permodalan untuk usaha ekonomi produktif lainnya
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lansia terlantar

➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

- **Komponen Kesehatan: Umur Harapan Hidup**

Dalam peningkatan kesehatan masyarakat secara umum, serta kualitas nutrisi dan lingkungan, masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Hal ini karena beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor Geografis dan lingkungan, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa perairan/rawa menjadi tantangan tersendiri untuk sanitasi, penyediaan air bersih, dan penanganan penyakit menular berbasis lingkungan.
- b. Masih adanya Kurang Gizi dan stunting, dimana pola konsumsi dan edukasi gizi yang belum merata berpotensi mempertahankan angka *stunting* atau gizi buruk pada balita, yang berdampak langsung pada UHH.
- c. Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan meskipun telah ditempatkan Tenaga Kesehatan melalui Program Penugasan Khusus (Tugsus). Hal ini disebabkan beberapa tenaga mengalami pemindahan lokasi kerja dan peningkatan status menjadi PNS dan PPPK.

- **Komponen Pendidikan: Rata-rata Lama Sekolah**

Angka Rata-rata Lama Sekolah (8 tahun) ini setara kelas 2 SMP, berbanding terbalik dengan Harapan Lama Sekolah yang mencapai 13,47 tahun. ini berarti anak-anak saat ini sudah sekolah tinggi, tetapi populasi penduduk dewasa HSU rata-rata putus sekolah di tingkat SMP. Ada beberapa faktor penghambat dalam peningkatan Rata-rata Lama Sekolah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana banyaknya penduduk usia produktif (25 tahun ke atas) yang pada masa mudanya harus putus sekolah untuk langsung bekerja (bertani, nelayan sungai/rawa) membantu ekonomi keluarga.
- b. Kurangnya kesadaran atau motivasi dari masyarakat dewasa yang putus sekolah untuk kembali mengikuti program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket).



- **Komponen Pengeluaran Penduduk Per Kapita**

Pengeluaran per kapita (daya beli) Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat rendah dibandingkan kabupaten lain dan jauh di bawah rata-rata provinsi. Ini adalah penyumbang terbesar ketertinggalan IPM Kab. Hulu Sungai Utara. Ada beberapa faktor penghambat antara lain adalah:

- a. Perekonomian masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan rawa yang nilai tambahnya rendah dan rentan terhadap fluktuasi musim/iklim.
- b. Kurangnya Inovasi Produk Lokal, dimana komoditas unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara (seperti ikan air tawar, itik Alabio, kerajinan anyaman purun) banyak dijual mentah tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga margin keuntungan bagi masyarakat kecil.
- c. Keterbatasan lapangan kerja, dimana minimnya sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, membuat masyarakat terjebak pada pekerjaan informal dengan pendapatan pas-pasan.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Peningkatan Infrastruktur Sanitasi berupa penyediaan sarana air bersih dan sanitasi (Jamban Sehat) yang adaptif terhadap kondisi lingkungan rawa (misalnya, jamban komunal atau teknologi tepat guna).
- Meningkatkan fasilitas Puskesmas Keliling (Pusling) air/perahu untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
- Memperkuat kolaborasi lintas SKPD (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan) untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting dan intervensi gizi secara spesifik.
- Memperkuat dan memberikan insentif untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) guna menjaring penduduk dewasa mengikuti program Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA).
- Melakukan integrasi pelatihan kinerja dan ijazah, dengan menggabungkan program Kejar Paket dengan pelatihan vokasi/keterampilan kerja (misalnya melalui BLK). Penduduk akan lebih tertarik ikut Paket C jika diiringi dengan pelatihan yang bisa langsung meningkatkan pendapatan mereka.
- Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pemberian stimulus modal, teknologi tepat guna, dan pelatihan untuk pengolahan pasca-panen (contoh: pembuatan abon ikan, pengemasan modern kerajinan purun) agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
- Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui jaringan pengaman sosial, dengan memastikan bantuan sosial (Bansos), subsidi BLT, dan



program padat karya tunai dari Dana Desa tepat sasaran untuk mendorong konsumsi masyarakat lapisan bawah.

- Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata/ekonomi kreatif, dengan mendorong promosi wisata lokal (seperti Candi Agung atau wisata rawa) untuk menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) bagi pendapatan pedagang kecil dan jasa lokal.

Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Capaian Akhir RPJMD Tahun 2030

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Kinerja pada Periode 2025			Target Akhir RPJMD 2030	Realisasi Capaian Akhir RPJMD 2030
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	9,6	8	83,33	10,24	78,13
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	14,25	13,47	94,53	14,55	92,58
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,49	72,50	72,95	100,62	73,62	99,09
Prevalensi Stunting	Persen	27,6	27,40	18,93	130,91	22,50	115,87
Penurunan Daerah Rawan Narkoba	Jumlah Kelurahan/ Desa	140	140	140	100	115	78,26

Rumus Perhitungan:

- Angka Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Prevalensi Stunting: Jumlah Anak Stunting)/(Jumlah Anak dalam Populasi) x100%

Definis Operasional: Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana

panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan.

a) Rata-Rata Lama Sekolah

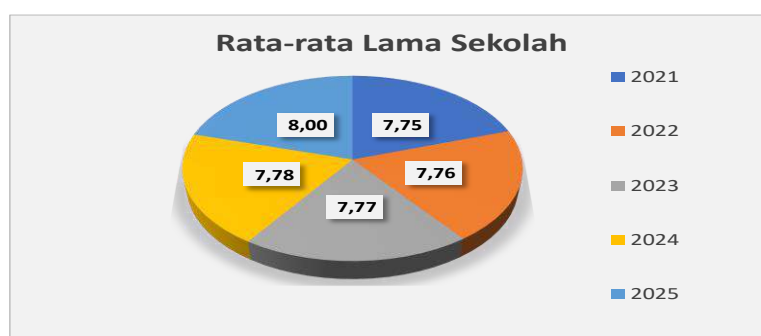
1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 8 tahun dari target 9,6 tahun (83,33%). Meskipun meningkat dibandingkan tahun 2024 (7,78), capaian ini adalah yang terendah secara persentase. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi pada program pendidikan kesetaraan atau upaya penekanan angka putus sekolah.

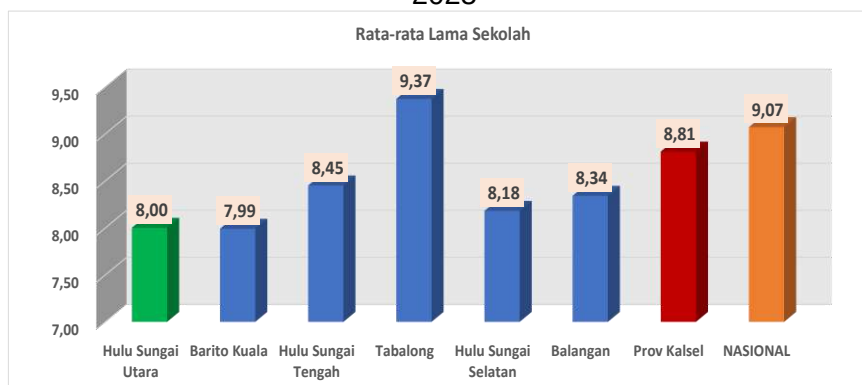
2) Analisis Perbandingan Realisasi 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi capaian Rata-rata lama sekolah tahun 2021-2024 kenaikan rata-rata sekitar 0,01 poin. Secara khusus, pada tahun 2025 (8 tahun) terjadi akselerasi capaian sebesar 0,22 poin, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan tren positif yang meningkat secara berkelanjutan dari tahun 2021 (7,75 tahun).

Gambar 3.23
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025



Gambar 3.24
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025



Perbandingan dari Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, realisasi (8,00) ini telah mengungguli Kabupaten Barito Kuala (7,99), namun masih dibawah wilayah



kabupaten lain. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (8,81 tahun) dan Nasional (9,07 tahun). Kesenjangan (gap) antara capaian daerah dengan angka nasional sebesar 1,07 tahun perlu menjadi atensi dalam perencanaan program pendidikan ke depan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

➤ Upaya yang telah Dilakukan

- Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal melalui SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk memfasilitasi penduduk usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/menengah (Paket A, B, dan C
- Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk menekan angka putus sekolah (*drop-out*).
- Rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan sarana pendidikan guna memastikan pemerataan layanan pendidikan.
- Sosialisasi intensif mengenai pentingnya pendidikan minimal 12 tahun kepada masyarakat di tingkat perdesaan
- Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dan administrasi untuk peningkatan kualitas pendidikan.

➤ Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Masih tingginya kecenderungan anak usia sekolah untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif (membantu orang tua bertani atau mencari ikan di rawa) sehingga pendidikan terabaikan
- Masih ditemukannya kasus pernikahan di usia sekolah yang menjadi penyebab utama berhentinya proses pendidikan formal, khususnya pada anak perempuan.
- Rata-rata Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas, sehingga peningkatan capaian memerlukan waktu karena sangat bergantung pada keberhasilan program pendidikan kesetaraan bagi orang dewasa

➤ Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan penyisiran (*sweeping*) anak putus sekolah melalui kolaborasi aparat desa dan Dinas Pendidikan untuk dikembalikan ke jalur formal atau non-formal.
- Sinkronisasi data kemiskinan dengan data anak putus sekolah agar intervensi bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
- Menambah jumlah titik layanan pendidikan kesetaraan yang mendekat ke

basis pemukiman penduduk di wilayah rawa.

- Edukasi kepada orang tua mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini dan pentingnya modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan.

b) Harapan Lama sekolah

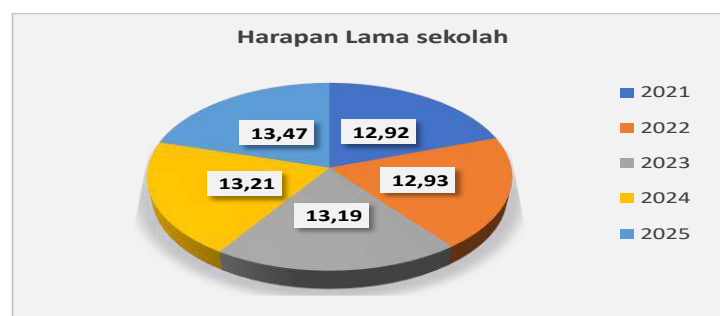
1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Realisasi indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dengan capaian sebesar 94,53% (Realisasi 13,47 tahun dari target 14,25 tahun). Angka ini menunjukkan bahwa secara administratif anak-anak di HSU diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga tingkat Diploma I/II, namun belum mencapai target maksimal yang ditetapkan.

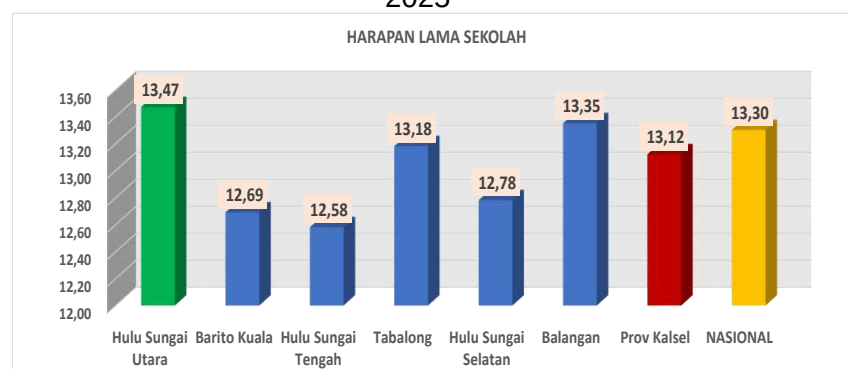
2) Analisis Perbandingan Realisasi 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2021-2025, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan total kenaikan sebesar 0,55 poin dalam lima tahun. Keberhasilan paling signifikan terlihat pada tahun 2025, di mana realisasi mampu menembus angka 13,47 tahun, sekaligus memposisikan daerah sebagai wilayah dengan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertinggi dibandingkan kabupaten tetangga di sekitarnya.

Gambar 3.25
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025



Gambar 3.26
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025





Capaian Harapan Lama Sekolah ini memberikan kontribusi positif terhadap daya saing daerah karena telah berhasil melampaui standar Nasional (13,30 tahun) dan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (13,12 tahun). Tingginya angka Harapan Lama Sekolah ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan daerah mampu memberikan jaminan bahwa anak usia sekolah memiliki peluang besar untuk menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Terdapat kesenjangan (gap) yang positif antara Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,47 tahun dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,00 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selisih sebesar 5,47 tahun ini memberikan gambaran objektif mengenai optimisme peningkatan kualitas SDM di masa depan.

Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini memiliki peluang dan ekspektasi untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma II atau awal Perguruan Tinggi, jauh melampaui capaian generasi sebelumnya yang secara rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 2. Transformasi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas aksesibilitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan setinggi mungkin.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

➤ Upaya yang telah Dilakukan

- Peningkatan daya tampung sekolah melalui penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk memastikan lulusan SD/Sederajat dapat melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA/Sederajat.
- Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu guna menurunkan angka putus sekolah pada transisi jenjang pendidikan.
- Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dengan konstruksi yang sesuai dengan kondisi geografis lahan rawa agar proses belajar mengajar tetap optimal sepanjang tahun.
- Sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan melampaui tingkat dasar untuk meningkatkan daya saing generasi muda HSU.

➤ Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Sebagian orang tua masih memprioritaskan anak untuk segera masuk ke dunia kerja (membantu usaha perikanan/pertanian keluarga) daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



- Budaya pernikahan di usia sekolah masih menjadi kendala utama yang menyebabkan anak-anak (khususnya perempuan) berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang menengah atas.
- Jarak tempuh menuju sekolah menengah atas atau kejuruan yang terkonsentrasi di pusat kecamatan menjadi hambatan bagi penduduk yang tinggal di pelosok wilayah perairan/rawa.
- Adanya persepsi perbedaan kualitas antar sekolah yang menyebabkan penumpukan siswa di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peminat.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Memperluas cakupan bantuan transportasi sekolah atau pengadaan bus sekolah air/darat untuk mempermudah akses siswa dari wilayah terpencil.
- Mendorong kesesuaian kurikulum sekolah dengan potensi ekonomi lokal (seperti pengolahan hasil perikanan/kerajinan rawa) agar siswa lebih termotivasi sekolah karena memiliki prospek kerja yang jelas.
- Pembentukan tim pemantau di tingkat desa untuk mendeteksi anak yang berisiko putus sekolah dan memberikan pendampingan khusus.
- Berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menekan angka pernikahan dini melalui edukasi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan pemuda.

c) Usia Harapan Hidup

1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

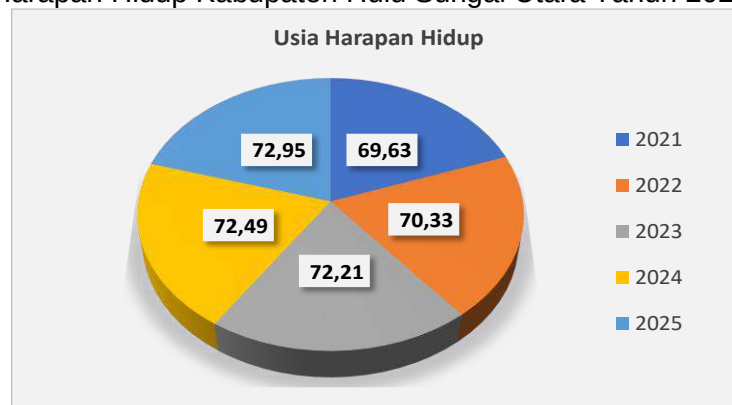
Realisasi indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 72,95 tahun berhasil melampaui target 72,50 tahun dengan capaian 100,62%. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kualitas akses layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat yang stabil di HSU.

2) Analisis Perbandingan Realisasi 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2021-2025 mengalami peningkatan tren positif. Kenaikan paling signifikan terlihat pada periode 2022 ke 2023 dengan peningkatan sebesar 1,88 poin. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program intervensi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

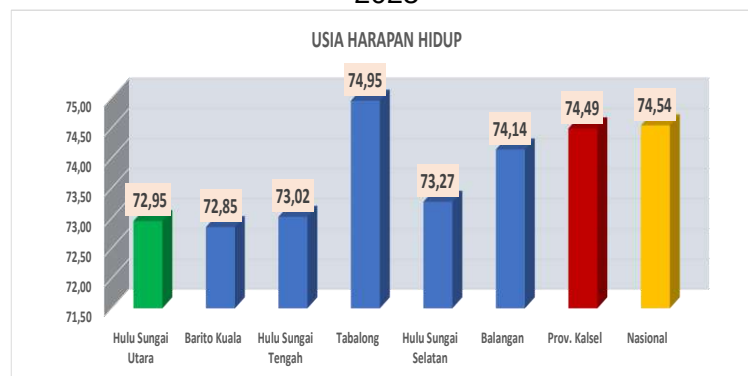
Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 menunjukkan performa yang meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan mencapai angka 72,95 tahun mencerminkan adanya perbaikan dalam akses layanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta program penurunan angka kematian ibu dan bayi di daerah.

Gambar 3.27
Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025



(Sumber: BPS, 2026)

Gambar 3.28
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025



(Sumber: BPS, 2026)

Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (72,95) berada dibawah beberapa kabupaten tetangga seperti Tabalong (74,95), Balangan (74,14), dan Hulu Sungai Tengah (73,02), tetapi Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2025 sebesar 72,95 tahun menunjukkan tren pertumbuhan positif, melampaui capaian Kabupaten Barito Kuala (72,85). Namun demikian, angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (74,49) dan Nasional (74,54), serta terdapat selisih capaian jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Tabalong (74,95), Balangan (74,14), dan Hulu Sungai Tengah (73,02).

Kondisi ini menjadi tantangan strategis bagi Pemerintah Kabupaten HSU untuk melakukan akselerasi kinerja melalui intervensi pada faktor determinan kesehatan. Fokus utama perbaikan akan diarahkan pada perluasan akses air bersih, peningkatan cakupan sanitasi layak, serta penguatan program pemenuhan gizi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil gap capaian antarwilayah serta mendorong konvergensi angka UHH Kabupaten HSU menuju



rata-rata capaian provinsi dan nasional.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Usia Harapan Hidup yaitu umur anak yang baru lahir secara rata-rata yang akan hidup sampai tahun tertentu dan merupakan salah satu indikator komponen pembentuk indeks pembangunan manusia sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan penduduk. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Di Indonesia UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

➤ Upaya yang telah Dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

(1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

- Menjamin ketersediaan obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta modernisasi alat kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan.
- Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin melalui perlindungan Masyarakat miskin dan integrasi jaminan kesehatan untuk mencapai UHC
- Peningkatan akses Kesehatan secara menyeluruh dengan tersedianya 2 Rumah Sakit dan 13 Puskesmas, 143 Poskesdes dan 318 Posyandu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

(2) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup

- Berupaya menurunkan kematian Ibu dan bayi di Fasilitas Kesehatan melalui penguatan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan;
- Peningkatan pelayanan ANC pada ibu hamil resiko tinggi oleh dokter spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
- Kunjungan dokter spesialis anak ke Puskesmas dalam rangka penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir
- Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga pada usia produktif
- Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil
- Pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah

(3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, DBD, TB dan penyakit lainnya



- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular seperti kanker, hipertensi, diabetes dan lain-lain
 - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
- (4) Percepatan penurunan stunting dan masalah gizi lainnya
- Peningkatan Pendidikan gizi yaitu melalui penyuluhan gizi kepada Masyarakat, anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
 - Pemberian PKMK dan Protein hewani berupa telur untuk pencegahan maupun pengobatan masalah gizi
 - Kegiatan konvergensi stunting yang dilaksanakan mulai di tingkat kecamatan hingga kabupaten.
- (5) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Peningkatan kualitas lingkungan sehat.
 - Peningkatan konsumsi pangan sehat (perbanyak makan buah dan sayur)
 - Peningkatan aktivitas fisik/olahraga

➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan meskipun telah ditempatkan Tenaga Kesehatan melalui Program Penugasan Khusus (Tugsus). Hal ini disebabkan beberapa tenaga mengalami pemindahan lokasi kerja dan peningkatan status menjadi PNS dan PPPK.
- Kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang baik di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- Beban penyakit tidak menular seiring dengan perubahan gaya hidup.
- Penyakit menular yang berkaitan dengan perubahan musim dan akibat Bencana Alam.
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat yang masih rendah. PHBS menjadi salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat yang berujung pada peningkatan Usia Harapan Hidup manusia.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga Kesehatan dan fasilitas Kesehatan agar mampu menangani permasalahan-permasalahan Kesehatan.
- Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang kurang merata dengan



memperhatikan kebutuhan standar setiap fasilitas pelayanan.

- Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pelaksanaan PHBS dan menggalakkan germas di lapisan Masyarakat
- Penerapan integrasi layanan kesehatan dengan program Integrasi Layanan Primer (ILP)

d) Prevalensi Stunting

1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

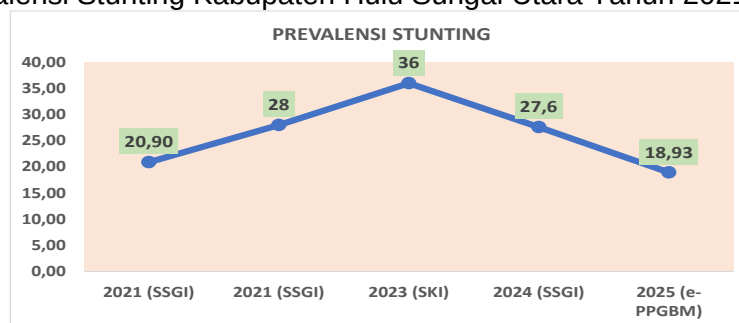
Realisasi prevalensi stunting pada akhir tahun 2025 mencapai angka 18,93%. Angka ini jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 27,40%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 130,91%. Kinerja ini masuk dalam kategori sangat berhasil. Prevalensi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya mencapai target, tetapi melampauinya secara signifikan. Selisih sebesar 8,47% dibawah target menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan sangat efektif.

2) Analisis Perbandingan Antara Realisasi 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan tinjauan capaian kinerja tahun 2025, fluktuasi prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Secara historis, angka prevalensi tercatat sebesar 20,9% (SSGI 2021) dan mengalami kenaikan menjadi 28% (SSGI 2022), hingga mencapai titik puncak tertinggi pada tahun 2023 sebesar 36% (SKI). Angka tersebut menjadi indikator tantangan besar yang dihadapi daerah pada periode tersebut.

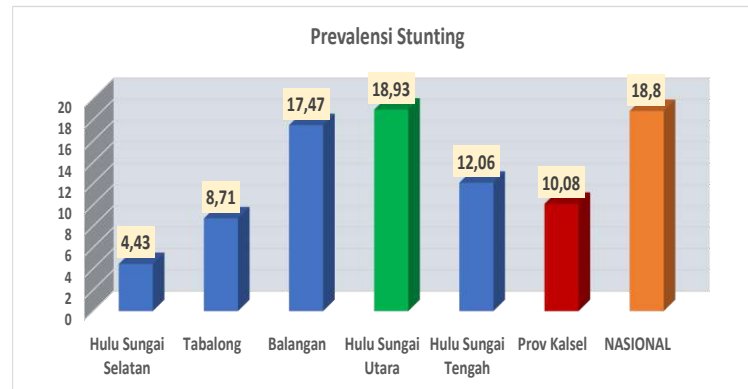
Namun demikian, melalui penguatan koordinasi lintas sektor, terjadi tren penurunan yang sangat positif pada tahun 2024 (SSGI) menjadi 27,6%, dan berlanjut turun secara tajam pada tahun 2025 (e-PPGBM) menjadi 18,93%. Keberhasilan menurunkan angka prevalensi sebesar 17,07% dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan secara efektif dan membuahkan hasil nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Gambar 3.29
Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021- 2025



(Sumber: BPS, 2026)

Gambar 3.30
Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2025



(Sumber: BPS, 2026)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berhasil menunjukkan tren penurunan stunting yang signifikan secara internal, capaian sebesar 18,93% pada tahun 2025 masih menempatkan HSU pada posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga di wilayah Banua Anam. Namun, angka tersebut menunjukkan performa yang bagus karena telah hampir sejajar dengan rata-rata Nasional (18,8%). Meskipun capaian ini masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (10,08%), efektivitas program kerja yang telah dijalankan memberikan fondasi kuat untuk intervensi ke depan. Pemerintah Kabupaten HSU berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan pemanfaatan data berbasis masyarakat secara optimal. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat upaya mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Kalimantan Selatan serta memastikan keberlanjutan penurunan prevalensi stunting di masa mendatang.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena kekurangan gizi kronis, infeksi berulang/ penyakit kronis, kondisi dan kesehatan ibu, lingkungan dan sanitasi yang buruk, faktor sosial ekonomi dan pendidikan serta pola asuh dan praktek pemberian makan yang salah.

Stunting memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak dan juga perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dampak stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sangat merugikan. Stunting dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia di bawah dua tahun. Anak-anak yang mengalami stunting pada umumnya akan



mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motoriknya yang akan mempengaruhi produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, anak stunting juga memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa.

➤ **Upaya yang telah Dilakukan**

Untuk menekan prevalensi stunting, beberapa upaya yang telah dilakukan adalah:

- Pemberian edukasi untuk Peningkatan konsumsi protein hewani dan makanan beraneka ragam setiap hari serta pentingnya ASI Eksklusif.
- Adanya inovasi HSU CERIA (Cegah Stunting Bersama) melalui Pemberian telur dengan slogan Sebiji Telur menambah gizi bagi Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil.
- Pemantau rutin BB/TB di Posyandu setiap bulan, dilanjutkan konseling gizi untuk keluarga anak stunting (bagaiman memperbaiki pola makan sehari-hari)
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita stunting dan anak berisiko stunting, biasanya berupa makanan tinggi protein dan energi berbasis pangan lokal serta pemberian PMT untuk ibu hamil KEK.
- Rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit bila anak stunting juga mengalami gizi buruk, penyakit berat atau perlambatan stimulasi.
- Pendampingan dokter spesialis anak dan psikolog klinis ke Puskesmas pada balita terduga stunting.
- Perbaikan sanitasi dan akses air bersih (jamban sehat, air minum aman dan PHBS) untuk mencegah infeksi berulang yang menyebabkan stunting.
- Pemanfaatan program bantuan pangan (PKH, BPNT, BPNT PK) untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di rumah tangga miskin
- Koordinasi antar OPD (Dinkes, Dinsos, Dinas PMD, Dinas pertanian dan Dinas pendidikan) melalui Forum/TP2S untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan konvergen.

➤ **Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

Hambatan dalam pelaksanaan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- Masih adanya ego sektoral dan kurang sinergi antar OPD (dinkes, Dinsos, Dinas Pertanian, PMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan) sehingga intervensi kurang konvergen dan terjadi tumpang tindih;
- TP2S (Tim Percepatan Penurunan Stunting) belum optimal fungsi



koordinasinya, karena keterbatasan waktu dan SDM di lapangan;

- Partisipasi masyarakat (khususnya keluarga dengan Balita berisiko stunting ataupun stunting) ke Posyandu rendah;
- Kurangnya pemahaman ibu dan keluarga tentang stunting dan gizi 1000 HPK, sehingga pola makan anak dan ibu hamil masih kurang terutama protein hewani dan masakan beragam;
- Faktor sosial seperti kemiskinan dan ketidakmampuan membeli makanan bergizi, serta keyakinan budaya/ kebiasaan yang kurang mendukung ASI dan MP-ASI;
- Pola asuh keluarga yang belum berubah dan orang tua yang belum paham dan peduli terhadap stunting.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Pemantauan status gizi balita melalui pelaksanaan operasi timbang Balita yang dilakukan bulan Februari dan Agustus.
- Pendampingan Dokter Spesialis Anak dan Psikolog Klinis tetap dilaksanakan untuk screening Balita terduga stunting agar dapat langsung diintervensi
- Pelaksanaan Makanan Tambahan (MT) Lokal untuk Balita dan Ibu Hamil KEK.
- Dukungan pelaksanaan HSU Ceria melalui pemberian kegiatan telur dengan slogan sebiji telur menambah gizi.
- Penyediaan PMT untuk ibu hamil KEK berupa susu ibu hamil untuk ibu hamil KEK yang mengandung nutrisi makro dan mikro yang diformulasikan khusus untuk membantu pemenuhan gizi selama kehamilan dan menurunkan resiko stunting.
- Mengkoordinasikan rapat TP2S secara berkala (minimal pertriwulan) untuk sinkronisasi program, evaluasi kinerja dan penyelesaian hambatan lintas sektor.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting di kecamatan dan desa/ kelurahan secara berkala (minimal setiap semester).
- Melakukan penyesuaian target (target setting) yang lebih progresif di tahun berikutnya karena target lama (27,40%) sudah jauh terlampaui.
- Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan memperluas keterlibatan sektor swasta dan ASN untuk menjadi donatur gizi bagi anak-anak di keluarga kurang mampu.
- Memperkuat sistem pelaporan berbasis aplikasi di tingkat kader desa agar



data *real-time* dapat segera diintervensi oleh dinas teknis.

e) Penurunan Daerah Rawan Peredaran Narkoba

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Indikator Penurunan Daerah Rawan Peredaran Narkoba

IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Penurunan Daerah Rawan Peredaran narkoba	Jumlah Desa/ Kelurahan	115	140	140	100	82,14

1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Target batas maksimal jumlah daerah rawan peredaran narkoba pada tahun 2025 adalah 140 desa/kelurahan. Pada akhir tahun 2025, realisasi di lapangan mencatatkan angka yang persis sama, yaitu 140 desa/kelurahan. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat capaian kinerja tahunan untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

Capaian 100% ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menahan laju persebaran peredaran narkoba agar tidak melebihi ambang batas maksimal yang telah ditoleransi untuk tahun 2025. Tidak adanya penambahan desa rawan baru di atas target tahunan merupakan indikasi berjalannya program preventif, sosialisasi bahaya narkoba, pengawasan ketat, serta intervensi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan binaan.

Dari tabel capaian indikator sasaran tersebut diatas bahwa target dapat dicapai dengan maksimal menunjukkan besarnya usaha dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk pemberantasan peredaran narkoba dimasyarakat. Selain itu juga menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berhasil mengurangi daerah rawan peredaran narkoba.

Ini adalah capaian yang luar biasa dan menunjukkan bahwa:

- Efektivitas penegakan hukum: Penegakan hukum yang efektif dan kuat telah berhasil menghilangkan persedaran narkoba di daerah tersebut.
- Kerjasama masyarakat: Masyarakat telah berperan aktif dalam melaporkan dan mencegah persedaran narkoba, sehingga membantu menghilangkan daerah rawan.
- Pencegahan yang efektif: Program pencegahan yang efektif telah berhasil mengurangi permintaan dan penawaran narkoba di daerah tersebut.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjadi lebih aman dan sehat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Namun, perlu diingat bahwa pencegahan dan penegakan hukum harus terus dilakukan untuk mencegah kembalinya persedaran narkoba.

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

.Indikator Penurunan Daerah Rawan Peredaran Narkoba Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan indikator baru yang pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2025. Sehingga, belum ada realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Target jangka panjang pada akhir periode RPJMD (tahun 2030) adalah menekan angka daerah rawan peredaran narkoba secara masif hingga menyentuh angka 115 desa/kelurahan. Jika realisasi tahun 2025 (140 desa/kelurahan) dibandingkan dengan target akhir tahun 2030 (115 desa/kelurahan), persentase kesenjangan/progres pencapaiannya tercatat sebesar 82,14%.

Angka 82,14% menunjukkan bahwa daerah masih memiliki sisa pekerjaan rumah (*gap*) sebesar kurang lebih 17,86% (setara dengan menurunkan status kerawanan di 25 desa/kelurahan lagi) untuk mencapai target ideal di tahun 2030. Mengingat batas waktu RPJMD masih tersisa beberapa tahun ke depan, laju penurunan ini dinilai berada pada jalur yang benar (*on-track*), namun memerlukan akselerasi yang lebih massif.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan sekolah (SD/SMP), pembinaan perpustakaan desa/kelurahan, serta pengembangan perpustakaan digital.
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan



untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga, Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah, 3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah.
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB, Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah,
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan



dan Kesejahteraan Keluarga.

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
- Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah,
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader, Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Keharmonisan Sosial

Sasaran Meningkatnya Keharmonisan Sosial di ukur dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia. Pada indikator Indeks Harmoni Indonesia, target yang ditetapkan sebesar 6, namun realisasi tidak dapat diukur sehingga tingkat capaian tercatat 0%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan survei yang dilakukan belum memenuhi jumlah responden minimal yang dipersyaratkan dalam metodologi pengukuran Indeks Harmoni Indonesia. Dengan demikian hasil survei belum dapat digunakan sebagai dasar penghitungan indeks secara valid.



Sasaran 2.3 : Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pengarusutamaan Gender

Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pengarusutamaan Gender

No.	IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	69,00	65,16	74,96	115,04	108,64
2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,345	0,445	0,465	95,51	65,22

Dari tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 74,96 menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif baik. Indeks pembangunan keluarga biasanya mengukur aspek-aspek seperti:

- Kesejahteraan ekonomi: kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar
- Pendidikan: tingkat pendidikan anggota keluarga
- Kesehatan: akses dan kualitas layanan kesehatan
- Hubungan keluarga: kualitas hubungan antar anggota keluarga

Dengan capaian 74,96, keluarga di daerah tersebut cenderung memiliki :

- Kesejahteraan ekonomi yang relatif stabil;
- Akses pendidikan yang baik;
- Akses kesehatan yang memadai; dan
- Hubungan keluarga yang harmonis.

Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang lebih rentan, seperti keluarga miskin atau keluarga dengan anak-anak. Upaya dapat difokuskan pada:

- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Pemberdayaan ekonomi keluarga
- Peningkatan kualitas hubungan keluarga melalui program parenting dan konseling keluarga

Sedangkan untuk capaian indikator Indeks Ketimpangan gender sebesar 0,465



menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan gender yang signifikan di daerah tersebut. Indeks ketimpangan gender mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek seperti:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi
- Partisipasi politik

Dengan capaian 0,465, ini berarti bahwa perempuan masih memiliki akses yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam beberapa aspek tersebut. Ketimpangan gender dapat berdampak pada:

- Kualitas keluarga: Ketimpangan gender dapat mempengaruhi kualitas hubungan keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
- Pemberdayaan perempuan: Ketimpangan gender dapat menghambat pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka dalam pembangunan.

Upaya peningkatan target capaian dapat difokuskan pada:

1. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan akses ke sumber daya.
3. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan politik.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur

Tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	3,63	*	*

Catatan : * Realisasi Kab. HSU Masih Dalam Proses

Tabel 3.59
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	N/A	3,61	3,63	*	*

Catatan : * Realisasi Kab. HSU Masih Dalam Proses



Berdasarkan data indikator kinerja pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan target Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 3,63. Angka ini menjadi acuan standar kualitas pelayanan yang harus dicapai dalam periode berjalan. Hingga saat pelaporan ini disusun, data realisasi dan persentase capaian (%) masih berada dalam tahap pengolahan (dalam proses). Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data lapangan, survei kepuasan, atau verifikasi administratif yang masih berjalan untuk memastikan akurasi data akhir. Sehingga analisis perbandingan antara target dengan realisasi belum dapat dilakukan.

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu ;

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Sasaran 3.1 : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar

Capaian kinerja atas sasaran “Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar” diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut.

Tabel 3.60
Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur	Indeks	N/A	N/A	0,834	0,851	*	*

Catatan : * Realisasi Kab. HSU Masih dalam Proses

Realisasi Indeks Infrastruktur tercatat sebesar 0,834 pada tahun 2024. Angka ini menjadi data dasar (*baseline*) pengujian performa infrastruktur instansi/wilayah. Target



yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 0,851. Terdapat ekspektasi kenaikan sebesar 0,017 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, bukan sekadar mempertahankan kondisi yang ada.

Hingga saat penyusunan laporan ini, kolom realisasi dan capaian (%) tahun 2025 masih bertanda bintang (*), yang menandakan data masih dalam proses penghitungan, survei, atau verifikasi faktual di lapangan. Sehingga analisisnya belum dapat dilakukan.

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu ;

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sasaran 3.2 : Meningkatnya Konektivitas Daerah

Sasaran Meningkatnya Konektivitas Daerah di ukur dengan indikator berikut.

1. Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Rasio Konektivitas	0,65	0,65	100

Pada Tahun 2025, target Rasio Konektivitas ditetapkan sebesar 0,65, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,65. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang termasuk dalam kategori sangat baik karena target tahunan tercapai secara optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan konektivitas wilayah, baik dari



sisi infrastruktur transportasi maupun jaringan pendukung lainnya, telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 3.62
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD (2030)	Persentase Tingkat Capaian terhadap Target Akhir RPJMD (%)
Rasio Konektivitas	0,65	0,65	0,80	81,25

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, indikator Rasio Konektivitas menunjukkan progres yang sangat baik dan berada pada jalur yang tepat (*on-track*) menuju pemenuhan target jangka menengah daerah. Pada tahun 2025, indikator Rasio Konektivitas berhasil merealisasikan angka indeks sebesar 0,65. Capaian ini tidak hanya memenuhi target tahunan 2025 secara presisi (100%), melainkan juga telah mencakup 81,25% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2030 yang dipatok pada angka 0,80. Terdapat gap indeks sebesar 0,15 poin lagi yang harus dikejar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2026–2030). Artinya, dibutuhkan pertumbuhan rata-rata sekitar 0,03 poin per tahun untuk mencapai angka 0,80 secara sempurna pada tahun 2030.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang direncanakan

Keberhasilan mencapai rasio 0,65 (100% dari target tahunan) didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Ketepatan Eksekusi Infrastruktur Fisik: Rampungnya pembangunan atau pemeliharaan jalan, jembatan, dan simpul transportasi utama sesuai jadwal (*on-time delivery*).
- Integrasi Antar-Wilayah: Pembukaan akses jalan sirip (jalan penghubung/penyangga) yang efektif memperpendek waktu tempuh antar-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman.
- Sinergi Pendanaan yang Baik: Kolaborasi pemanfaatan anggaran yang optimal, baik dari APBD murni, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan keuangan provinsi/pusat.

Untuk mencapai sisa target (0,15 poin menuju 0,80 di tahun 2030), pemerintah daerah harus mewaspadai beberapa risiko berikut yang bisa menghambat pertumbuhan:



- Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan: Membangun jalan baru tanpa diimbangi anggaran pemeliharaan rutin akan membuat jalan cepat rusak, sehingga menurunkan rasio kemantapan dan konektivitas.
- Kendala Pembebasan Lahan: Konflik atau lambatnya proses pembebasan lahan sering kali menjadi penyebab utama proyek infrastruktur konektivitas mangkrak atau tertunda.
- Faktor Cuaca Ekstrem dan Bencana Alam: Kerusakan infrastruktur akibat banjir atau tanah longsor dapat memutus konektivitas yang sudah ada secara tiba-tiba.

Untuk menutup sisa gap 0,15 poin dalam kurun waktu 2026–2030 (membutuhkan pertumbuhan konstan minimal 0,03 poin per tahun), berikut adalah langkah strategisnya:

- Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan (Masterplan Konektivitas): Memfokuskan anggaran pada pembangunan rute-rute jalan yang memiliki dampak ekonomi paling tinggi (menghubungkan sentra produksi dengan pasar/pelabuhan).
- Penguatan Pemeliharaan Preventif: Menggeser paradigma dari sekadar "membangun baru" menjadi "merawat yang sudah ada" agar usia pakai jalan dan jembatan bertahan lebih lama.
- Sinkronisasi Tata Ruang (RTRW): Memastikan pembangunan jaringan jalan baru selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak memicu masalah lingkungan di masa depan.
- Kolaborasi Pembiayaan Non-APBD: Menjajaki skema pembiayaan kreatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk proyek skala besar yang sulit didanai APBD murni.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan Indikator Konektivitas Daerah adalah sebagai berikut.

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran

5. Tujuan 4 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Tabel 3.63
Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70,34	*76,16	108,27



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 dengan target sebesar 70,34 dengan Predikat Sangat Baik (BB). Namun demikian, realisasi indikator tersebut belum tersedia karena nilai akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 belum rilis sehingga analisis kuantitatif terhadap tingkat pencapaiannya belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, sampai saat ini sudah ada nilai sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 76,16. Hal tersebut menunjukkan tingkat capaian sementara sebesar 108,27%.

Meskipun capaian saat ini tercatat melampaui target tahunan (surplus sebesar 5,82 poin), angka ini masih berpotensi mengalami penyesuaian (naik/turun) setelah proses verifikasi, validasi, atau audit final selesai dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Secara administratif, indikator Indeks Reformasi Birokrasi telah memenuhi target dengan predikat sangat memuaskan. Langkah selanjutnya adalah mengawal proses penilaian hingga nilai ini ditetapkan menjadi nilai final/definitif.

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.64
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi				
		2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70,34	*76,16	70,29	53,86	53,78	51,92

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sebesar 51,92 meningkat menjadi 53,78 pada tahun 2022 dan 53,86 pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 70,29. Adapun target tahun 2025 ditetapkan sebesar 70,34.

Jika dibandingkan dengan target 2025, capaian tahun 2024 telah mendekati target dengan selisih yang sangat tipis. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian internal, serta implementasi reformasi birokrasi telah memberikan dampak positif yang signifikan. Tren peningkatan ini juga mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nilai sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 yaitu 76,16.



Berdasarkan data historis realisasi Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif dan konsisten secara berkelanjutan. Dalam kurun waktu lima tahun (2021-2025), Indeks Reformasi Birokrasi telah meningkat total sebanyak 24,24 poin (dari 51,92 menjadi 76,16). Loncatan paling signifikan terjadi pada periode 2023–2024, yang kemudian berhasil dipertahankan dan ditingkatkan kembali pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi berjalan secara progresif dan efektif.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 3.65
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD (2030)	Persentase Tingkat Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70,34	*76,16	70,61	*107,86

Berdasarkan komparasi data antara realisasi tahun berjalan dengan proyeksi jangka panjang pada dokumen RPJMD, berikut adalah hasil analisisnya:

- **Tingkat Capaian yang Melampaui Proyeksi Jangka Panjang:** Target akhir Indeks Reformasi Birokrasi pada akhir periode RPJMD (tahun 2030) dipatok sebesar 70,61. Sementara itu, realisasi di tahun 2025 tercatat sudah menyentuh angka 76,16.
- **Persentase Capaian:** Dengan membandingkan realisasi 2025 terhadap target akhir 2030, maka tingkat persentase ketercapaian target jangka panjang saat ini berada di angka 107,86%.

Perlu ditekankan bahwa angka realisasi tahun 2025 (*76,16) dan persentase capaiannya (*107,86%) masih ditandai dengan tanda bintang, yang mengindikasikan statusnya sebagai **nilai sementara**.

Secara administratif, pencapaian di tahun 2025 ini memberikan sinyal yang sangat positif bahwa arah reformasi birokrasi berjalan lebih cepat dari proyeksi awal di RPJMD. Namun, untuk menjaga validitas data laporan kinerja, evaluasi final atas pelampauan target jangka panjang ini tetap harus menunggu rilis nilai definitif hasil audit/penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.



4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang direncanakan

Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara 70,29 dengan predikat BB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 belum keluar karena masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun saat ini sudah ada nilai sementara, yaitu 76,16 (BB). Hal tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih belum maksimal.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

- a) Komitmen pimpinan yang kuat dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kebijakan, arahan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
- b) Implementasi program RB yang lebih terstruktur, seperti penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
- c) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d) Penguatan sistem akuntabilitas kinerja, melalui penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur serta pelaporan kinerja yang lebih sistematis.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan belum optimalnya pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

- a) Belum optimalnya implementasi program RB di seluruh unit kerja, sehingga pelaksanaan reformasi belum merata.
- b) Kurangnya pemahaman pegawai terhadap konsep reformasi birokrasi, terutama terkait area perubahan dan indikator penilaian RB.
- c) Dokumentasi dan eviden pendukung yang belum lengkap, sehingga beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat dinilai secara maksimal.
- d) Monitoring dan evaluasi yang belum berjalan secara konsisten, sehingga permasalahan yang muncul tidak segera ditindaklanjuti.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode berikutnya, beberapa langkah perbaikan yang direncanakan antara lain:

- a) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai guna meningkatkan pemahaman terhadap indikator dan area perubahan RB.
- b) Meningkatkan kualitas dokumentasi kegiatan RB, termasuk penyusunan laporan, eviden kegiatan, serta pengarsipan dokumen secara sistematis.
- c) Mengoptimalkan penerapan sistem digital dan SPBE, khususnya dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, dan pelayanan publik.



- d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RB, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja.
- e) Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang lebih terarah dan terukur, sehingga setiap kegiatan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Riset Dan Inovasi Daerah
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti Konsultasi dan Koordinasi oleh Tim RB Kabupaten ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, melakukan pendampingan dengan SKPD pengampu indikator-indikator Reformasi Birokrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Gambar 3.31
Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian dan Pendampingan dengan SKPD



Sasaran 4.1 : Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

No.	IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Tahun 2025			Capaian terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai LHE AKIP Daerah	Nilai	73	66,12	65,85	99,6	90,20
2	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	100

a) Nilai LHE AKIP Daerah

1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Nilai **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** merupakan indikator yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Pada Tahun 2025 target Nilai AKIP Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebesar **66,12** sesuai dengan target akhir RPJMD Tahun 2026. Berdasarkan hasil



evaluasi, realisasi yang dicapai sebesar **65,85**. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai **99,6%** dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat selisih dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan pengukuran kinerja, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.67
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai LHE AKIP Daerah Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Target 2025	Realisasi				
		2025	2024	2023	2022	2021
Nilai LHE AKIP Daerah (Nilai)	66,12	65,85	64,82	64,40	64,20	63,34

Berdasarkan data yang tersedia, target Nilai LHE AKIP Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **66,12**, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar **65,85**. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai **99,59%** dari target yang telah ditetapkan, atau terdapat selisih sebesar **0,27 poin** di bawah target.

Jika dilihat dari tren capaian selama periode 2021–2025, nilai LHE AKIP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 nilai tercatat sebesar **63,34**, kemudian meningkat menjadi **64,20** pada tahun 2022, **64,40** pada tahun 2023, dan **64,82** pada tahun 2024, hingga mencapai **65,85** pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan pemerintah daerah.

Meskipun target tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai, selisih yang relatif kecil menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas sudah berada pada jalur yang tepat. Peningkatan signifikan pada tahun 2025 juga mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang lebih intensif, baik dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, maupun pelaporan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain optimalisasi kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan



kualitas evaluasi internal. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah perlu terus melakukan perbaikan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian Nilai LHE AKIP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun-tahun mendatang dapat melampaui target yang ditetapkan.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 3.68
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai LHE AKIP Daerah Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD (2030)	Persentase Tingkat Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
Nilai LHE AKIP Daerah (Nilai)	66,12	65,85	73	90,20%

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2030 sebesar **73**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **90,20%** dari target jangka menengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa progres pencapaian indikator berada pada jalur yang cukup baik dan konsisten menuju sasaran akhir yang telah ditetapkan.

Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang lebih terukur, keterkaitan antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis, serta penyusunan laporan kinerja yang semakin akuntabel.

Namun demikian, untuk mencapai target RPJMD secara optimal, masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa aspek, antara lain penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja (*result-oriented*), peningkatan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi internal. Selain itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu terus diperkuat dalam memastikan implementasi SAKIP berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam



pengelolaan kinerja, serta penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian Nilai LHE AKIP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terus meningkat dan mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang direncanakan

Dari analisis perbandingan capaian kinerja yang telah disajikan di atas dapat dilakukan beberapa analisa terkait faktor penyebab keberhasilan/pendukung pencapaian kinerja, faktor penyebab kegagalan/penghambat pencapaian kinerja serta upaya alternatif yang dapat dilakukan dengan rincian sebagai berikut.

Nilai LHE AKIP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan:

- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada beberapa perangkat daerah belum berjalan secara optimal.
- Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya selaras.
- Kualitas penyusunan indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah masih perlu diperbaiki agar lebih terukur dan berorientasi hasil.
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja masih belum maksimal.

Sebagai upaya perbaikan untuk terus meningkatkan Nilai LHE AKIP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam implementasi SAKIP.
- Memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
- Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait penyusunan indikator kinerja dan pengelolaan kinerja.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan Nilai LHE AKIP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut.

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Riset Dan Inovasi Daerah
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota

Dalam rangka meningkatkan Nilai LHE AKIP Daerah banyak kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan Asistensi Penyusunan CSF (*Critical Success Factor*) Pohon Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah, Asistensi Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Koordinasi dan Konsultasi oleh Tim SAKIP Kabupaten terkait Penguatan Implementasi SAKIP di Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Gambar 3.32

Kegiatan Asistensi Penyusunan Pohon Kinerja dengan Kementerian



b) Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan merupakan salah satu indikator utama yang merepresentasikan kualitas tata kelola keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada suatu instansi pemerintah.

Terdapat empat tingkatan opini yang diberikan oleh BPK:

1. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP / *Unqualified Opinion*)**: Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi.
2. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP / *Qualified Opinion*)**: Laporan keuangan disajikan secara wajar, kecuali untuk beberapa pos/transaksi tertentu yang dikecualikan.
3. **Tidak Memberikan Pendapat (TMP / *Disclaimer of Opinion*)**: Auditor tidak dapat mengumpulkan bukti pemeriksaan yang cukup untuk menarik kesimpulan (akibat batasan ruang lingkup pemeriksaan).



4. **Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**: Laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan banyak terjadi penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku.

1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Tabel 3.69
Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2025

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian (%)
Opini BPK	WTP	WTP	100

Berdasarkan data tabel kinerja di atas, berikut adalah hasil analisis perbandingan antara target dan realisasi indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025:

- **Kesesuaian Target dan Realisasi**: Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah meraih predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Realisasi yang berhasil dicapai pada tahun berjalan juga menunjukkan predikat **WTP**.
- **Persentase Tingkat Capaian**: Keberhasilan menyelaraskan realisasi dengan target ini menghasilkan tingkat capaian kinerja yang sempurna, yakni sebesar **100%**

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian 100% ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset instansi telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.70
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Target 2025	Realisasi				
		2025	2024	2023	2022	2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada tahun 2025, Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mempertahankan predikat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, sama seperti pencapaian pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan tahun berjalan tidak mengalami penurunan dan tetap memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Jika ditarik garis ke belakang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan rekam jejak yang sangat stabil.



Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mempertahankan opini **WTP secara berturut-turut selama lima tahun terakhir (2021–2025)**. Mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah, ini mengindikasikan bahwa:

1. Budaya transparansi, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas keuangan telah mengakar kuat di lingkungan instansi.
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berjalan secara konsisten, efektif, dan adaptif terhadap perubahan regulasi keuangan negara/daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP beruntun ini sering kali menjadi indikator positif bagi perolehan dana insentif atau apresiasi fiskal dari pemerintah pusat.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 3.71
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD (2030)	Persentase Tingkat Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%

Berdasarkan komparasi data antara realisasi tahun berjalan dengan proyeksi jangka panjang pada dokumen RPJMD, berikut adalah hasil analisisnya:

- **Kesesuaian dengan Target Jangka Panjang:** Target akhir yang dipatok dalam RPJMD (tahun 2030) untuk indikator Opini BPK adalah meraih predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Realisasi pada tahun 2025 tercatat sudah berhasil mencapai predikat **WTP**.
- **Persentase Ketercapaian:** Dengan membandingkan realisasi tahun 2025 terhadap target akhir tahun 2030, tingkat ketercapaian jangka panjang indikator ini telah menyentuh angka **100%**.

Pencapaian predikat WTP di tahun 2025 ini memberikan sinyal positif bahwa instansi telah berhasil mendahului atau memenuhi standar tata kelola keuangan tertinggi yang dicita-citakan dalam RPJMD 2030 lebih awal dari batas akhir periodenya.

Keberhasilan mencapai 100% dari target akhir ini bukan berarti program kerja berhenti. Sebaliknya, tantangan ke depan bergeser dari "meraih" menjadi "mempertahankan" predikat tersebut secara konsisten hingga akhir periode



RPJMD tahun 2030. Fluktuasi kepatuhan akuntansi atau keteledoran administratif sekecil apa pun di tahun-tahun mendatang berpotensi menurunkan capaian ini.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang direncanakan

Pencapaian opini **WTP** ini mencerminkan komitmen kuat seluruh jajaran dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan ini didorong oleh:

- Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi.
- Kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan aset dan anggaran.
- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) secara tepat waktu."

Untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas opini ke depan, beberapa langkah strategis yang perlu terus dilakukan adalah:

- Mempertahankan komitmen pimpinan dan kedisiplinan administratif dalam pengelolaan anggaran.
- Melakukan percepatan penyelesaian sisa Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) BPK yang masih berjalan.
- Melakukan *update* berkala atas penatausahaan aset tetap yang kerap menjadi area temuan berulang.
- Konsistensi dalam penatausahaan dan inventarisasi aset daerah/negara secara berkala.
- Memperkuat fungsi pengawasan internal (Inspektorat) untuk mendeteksi dini potensi salah saji administratif.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan Indikator Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut.

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



Sasaran 4.2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.72

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima

No.	IKU Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Capaian terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,78	3,45	91,26	82,14
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,6	2,9	111,53	-
3	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	-	-

a) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu komponen yang dihitung dalam penentuan nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Nilai indeks pelayanan publik memberikan gambaran kinerja pelayanan publik di sebuah organisasi.

a) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Tabel 3.73

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,78	3,45	91,26

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Dari target sebesar 3,78, realisasi yang dicapai adalah 3,45, sehingga terdapat selisih yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya aspek pelayanan yang perlu diperbaiki, seperti standar pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan upaya evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepuasan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.



b) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.74
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Target 2025	Realisasi				
		2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,78	3,45	3,69	3,07	3,4	-

Berdasarkan data historis realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP), terjadi fluktuasi kinerja dari tahun ke tahun. Berikut adalah rincian analisis perbandingannya:

Pada tahun 2025, realisasi IPP tercatat sebesar **3,45**. Angka ini menunjukkan adanya **penurunan sebesar 0,24 poin** dibandingkan realisasi pada tahun 2024 yang mencapai **3,69**. Penurunan ini juga menyebabkan target tahun 2025 (yaitu 3,78) belum berhasil terpenuhi.

Melihat rekam jejak historisnya, nilai IPP mengalami pola fluktuatif (naik-turun):

- Tahun 2021: Data tidak tersedia karena belum ada penilaian.
- Tahun 2022: 3,40
- Tahun 2023: 3,07 (turun -0,33 poin dari 2022)
- Tahun 2024: 3,69 (naik signifikan +0,62 poin dari 2023)
- Tahun 2025: 3,45 (turun -0,24 poin dari 2024)

Penurunan nilai IPP dari 3,69 di tahun 2024 menjadi 3,45 di tahun 2025 mengindikasikan adanya kendala atau penurunan kualitas pada unit-unit pelayanan publik yang menjadi sampel penilaian pada tahun berjalan. Fluktuasi nilai ini mencerminkan perlunya konsistensi standarisasi mutu pelayanan di seluruh unit kerja.

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 3.75
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD (2030)	Persentase Tingkat Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,78	3,45	4,20	82,14



Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2025 tercatat sebesar **3,45**. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD tahun 2030 yang ditetapkan sebesar **4,20**, maka tingkat capaian kinerja kumulatif hingga tahun 2025 telah mencapai **82,14%**. Pada tahun 2025, realisasi (3,45) tercatat masih berada di bawah target tahunan 2025 yang dipatok pada angka 3,78. Hal ini menunjukkan adanya deviasi atau kesenjangan yang perlu dikejar pada sisa periode berjalan.

Meskipun realisasi tahun 2025 belum memenuhi target tahunannya, secara umum progres menuju target akhir RPJMD (2030) sudah berjalan di jalur yang positif (di atas 80%). Untuk menutup sisa kesenjangan sebesar **17,86%** (atau sebesar 0,75 poin indeks) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dibutuhkan akselerasi program kerja yang konsisten.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang direncanakan

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 belum mencapai target bahkan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan:

- Kualitas pelayanan pada beberapa unit layanan masih belum optimal.
- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik belum sepenuhnya memadai.
- Standar pelayanan dan inovasi pelayanan publik belum diterapkan secara optimal pada seluruh perangkat daerah.
- Kurangnya data dukung OPD penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian.

Sebagai upaya perbaikan untuk terus meningkatkan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
- Melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan indikator Indeks Pelayanan Publik adalah sebagai berikut.

- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendampingan Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Sosialisasi Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Biro Organisasi Bagian Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik ke Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan.

Gambar 3.33
Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Kalsel
dan Sosialisasi Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik



b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini diukur dalam poin dan merupakan data tahunan.



1) Analisis Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Tabel 3.76
Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2025

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian (%)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,9	111,53

Berdasarkan data pemantauan dan evaluasi kinerja tahun 2025, indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan hasil yang sangat positif dengan melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator Indeks SPBE pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,9 dari target yang ditetapkan sebesar 2,6. Keberhasilan mencapai angka 111,53% ini mengindikasikan komitmen kuat instansi dalam mendorong transformasi digital. Akselerasi ini didorong oleh optimalisasi infrastruktur digital, integrasi sistem aplikasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam mengoperasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.77
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Target 2025	Realisasi				
		2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,9	2,51	2,18	1,76	N/A

Berdasarkan data realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) beberapa tahun terakhir, indikator ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten secara berkelanjutan (*sustainable growth*).

Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,90. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, indeks ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten secara beruntun. Pada tahun 2022 realisasi indeks SPBE berada pada angka 1,76, kemudian naik menjadi 2,18 di tahun 2023, dan berlanjut naik menjadi 2,51 di tahun 2024. Puncaknya pada tahun 2025 berhasil menyentuh angka 2,90. Kenaikan berkelanjutan ini merepresentasikan keberhasilan instansi dalam menjaga ritme transformasi birokrasi digital.



3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 2,9 pada tahun 2025 ini sekaligus menandai tahun terakhir evaluasi menggunakan instrumen Indeks SPBE. Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat melakukan transformasi indikator penilaian menjadi Indeks Pemerintahan Digital (IPD).

Pergeseran ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan paradigma dari yang sebelumnya berfokus pada penyediaan sistem elektronik sektoral (aplikasi masing-masing instansi), kini bergeser pada aspek keterpaduan layanan nasional, interoperabilitas data, dan pengalaman pengguna (*user experience*). Oleh karena itu, keberhasilan mencapai angka 2,9 di tahun 2025 meletakkan fondasi yang kuat bagi instansi untuk siap beradaptasi dengan standar penilaian IPD tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang direncanakan

Keberhasilan melampaui target Indeks SPBE (mencapai 2,9 dari target 2,6) didorong oleh beberapa faktor kunci berikut:

- Komitmen Pimpinan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya dukungan kuat dari pimpinan tinggi serta regulasi internal (seperti Peraturan Kepala Daerah/Lembaga) yang mempercepat digitalisasi.
- Integrasi dan Interoperabilitas Sistem: Berhasilnya penggabungan beberapa aplikasi mandiri (*silo*) menjadi sistem yang saling terhubung, sehingga mengurangi tumpang tindih data.
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur: Pelatihan literasi digital yang masif bagi ASN untuk beradaptasi dengan sistem kerja berbasis elektronik.
- Keamanan Informasi yang Lebih Baik: Penerapan standar keamanan data (seperti sertifikasi ISO atau pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi) yang meningkatkan nilai audit SPBE.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun 2026, berikut adalah langkah strategis yang direkomendasikan:

- Peningkatan Skala Indeks (Menuju Predikat "Baik"): Menargetkan nilai indeks di atas 3,0 (skala predikat "Baik" nasional) melalui pembenahan domain Arsitektur SPBE.
- Konsolidasi Pusat Data: Memastikan seluruh aplikasi instansi menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) atau pusat data terstandarisasi untuk efisiensi anggaran.



- Audit Keamanan Informasi Berkala: Rutin melakukan uji penetrasi (*pentest*) dan penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mencegah kebocoran data.
- Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital: Memastikan aplikasi layanan publik tidak hanya sekadar ada, tetapi benar-benar mudah digunakan masyarakat (*user-friendly* dan minim gangguan).

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025 yaitu :

- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- Program Perekonomian Dan Pembangunan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

c) Indeks Pemerintahan Digital

Untuk indikator Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator baru pada RPJMD 2025-2029 yang akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sebagai pengganti dari Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran 4.3 : Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Sasaran ini di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.78
Capaian Indikator Indeks Sistem Merit

No.	IKU Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2030)	Tahun 2025			Capaian Terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,75	0,61	-	-	-



Pada indikator Indeks Sistem Merit yang merupakan indikator tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,61. Namun demikian, pada tahun 2025 indikator tersebut belum dapat diukur realisasinya karena adanya perubahan kebijakan pada tingkat nasional terkait kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sebelumnya menjadi instansi yang melakukan penilaian terhadap penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Dengan adanya perubahan tersebut, proses evaluasi dan penilaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2025 belum dapat dilaksanakan sehingga realisasi capaian indikator tersebut belum dapat disajikan.

5. Tujuan 5 : Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah

Tujuan Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.79
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah

IKU Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah	1) Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	2,21	-	-
	2) Indeks Risiko Bencana	97,67	52,63	54%

a) Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Untuk indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menghitung indikator tersebut pada tahun 2025. Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melakukan perhitungan Indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2026.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan yaitu ;

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Dan
- Pengelolaan Persampahan.



b) Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.80
Capaian Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Risiko Bencana	Indeks	N/A	N/A	97,69	97,67	52,63	146,12%

Indeks risiko bencana menggunakan rumus semakin rendah nilainya, semakin bagus kinerjanya, rumus yang digunakan adalah rumus efisiensi atau "semakin kecil semakin baik. Angka 146,12% membuktikan bahwa kinerjanya sangat memuaskan karena berhasil menekan risiko jauh di bawah batas toleransi target.

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 97,67. Realisasi di lapangan berhasil ditekan secara drastis hingga menyentuh angka 52,63. Mengingat indikator ini bersifat semakin kecil semakin baik (negatif), penurunan nilai riil yang jauh di bawah target menghasilkan capaian kinerja yang sangat signifikan, yaitu sebesar 146,12%.

Keberhasilan melampaui target hingga 146,12% ini mencerminkan keberhasilan masif dalam program pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan kerentanan bencana. Penurunan indeks sebesar 45,04 poin dari target menunjukkan adanya intervensi mitigasi yang sangat efektif sepanjang tahun 2025.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja yaitu:

- Meningkatnya pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari dan menurunkan kualitas air Sungai.
- Meningkatkan pemantauan terhadap air Sungai.
- Memperkuat laboratorium lingkungan sebagai fungsi pengawasan dan pemantauan.
- Mengelola pengaduan Masyarakat terkait gangguan dan pencemaran.
- pelaksanaan program mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana Peningkatan;
- Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor;
- penerapan sistem, standar operasional prosedur, serta dokumen perencanaan kebencanaan; dan
- Peningkatan SDM pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang kebencanaan.

Hambatan/kendala yang terjadi dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

- Tingginya nilai pencemar mikrobiologi pada sungai-sungai yang menjadi titik pantau akibat air limbah domestik, serta Sungai di Kab.HSU merupakan bagian hilir dari



Sungai Tabalong dan Sungai Balangan sehingga kondisi Sungai di HSU tergantung kegiatan/aktivitas bantaran Sungai di hulunya.

- Masih terjadinya alih fungsi lahan dan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil.
- keterbatasan jumlah dan kompetensi personel kebencanaan
- keterbatasan anggaran serta belum memadainya sarana dan prasarana kebencanaan
- koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam beberapa kondisi masih belum berjalan secara optimal.
- integrasi sistem informasi, maupun kapasitas SDM dalam pengelolaannya
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atas risiko bahaya kebakaran.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk terus meningkatkan kinerja, beberapa hal yang akan dilakukan yaitu:

- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk mencari Solusi mengenai pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan di perumahan dan permukiman serta fasilitas umum terutama yang berada di daerah sepanjang aliran sungai.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan terkait penambangan pasir di sungai.
- Meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang menghasilkan polusi udara.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis risiko bencana serta prioritas kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola kebencanaan.
- Pengembangan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi antarperangkat Daerah.
- Harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi secara proaktif dan adaptif.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur
- Optimalisasi sarana dan prasarana operasional

Program/kegiatan yang menunjang kinerja sebagai berikut.

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persampahan.
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penanganan Bencana



Sasaran 5.1 : Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sasaran Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.81
Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	64,74	66,5	69,16	74,70	108.0
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan)	Ton CO ₂ eq	N/A	N/A	N/A	41.054,95	33.357	119,48
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	Ton CO ₂ eq	N/A	N/A	N/A	1.422.849,92	528.136	37,12

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah kondisi di mana unsur-unsur pembentuk lingkungan seperti air, udara, dan lahan berada dalam status yang semakin baik, sehat, dan mampu menyangga kehidupan secara berkelanjutan. Dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, pencapaian ini diukur secara kuantitatif melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian kinerja atas sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut.

Tabel 3.82
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,74	66,5	69,16	74,70	108.0

1) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta target yang telah ditetapkan atas indikator tersebut adalah 69,16. Adapun realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar 74,70 dengan tingkat capaian 108%. Capaian ini menggambarkan kinerja yang “cukup baik”. Dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berkualitas sedang



dimana kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong sedang, karena tingkat pencemaran air masih sedang. Pencemaran air ini lebih dipengaruhi oleh aliran sungai dari hulu akibat adanya pertambangan karena wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa cekungan yang didominasi rawa dan merupakan tempat berkumpulnya aliran air dari wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

2) Analisis Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Jika dilihat capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami kenaikan yang mana itu menggambarkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mengalami perbaikan meskipun masih dalam kategori sedang. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam yang mana sungai Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bertemunya Sungai Balangan dan Sungai Tabalong sehingga pencemaran air yang ada pada pertambangan di daerah Tabalong dan Balangan ikut mencemari lingkungan perairan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3) Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja

(a) Upaya yang dilaksanakan

- Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- Perbaikan kualitas air melalui pengawasan izin pembuangan limbah cair ke badan air, menurunkan jamban-jamban apung dan pembersihan sampah di badan sungai;
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa pengganti jamban apung;
- Perbaikan kualitas udara melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengawasan izin emisi pada perusahaan dan atau buangan kendaraan bermotor

(b) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- Tingginya nilai pencemar mikrobiologi pada sungai-sungai yang menjadi titik pantau akibat air limbah domestik, serta Sungai di Kab.HSU merupakan bagian hilir dari Sungai Tabalong dan Sungai Balangan sehingga kondisi Sungai di HSU tergantung kegiatan/aktivitas bantaran Sungai di hulunya.
- Masih terjadinya alih fungsi lahan dan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil.
- Masih terjadinya alih fungsi lahan, dari lahan kebun/sawah/rawa menjadi



perumahan.

- Terjadinya pembakaran lahan/rawa akibat masih adanya asumsi masyarakat kalau dibakar maka lahan akan subur.

(c) Rencana Tindaklanjut

- Meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang menghasilkan polusi udara.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
- Melaksanakan koordinasi dengan dinas PU untuk mencari Solusi mengenai pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan di perumahan dan permukiman serta fasilitas umum terutama yang berada di daerah sepanjang aliran sungai.
- Meningkatkan penyuluhan pelestarian lahan/rawa dalam rangka mencegah terjadinya pembakaran lahan/rawa.
- Pengendalian kerusakan lahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti kegiatan rehabilitasi lahan, pengawasan pemanfaatan ruang, serta peningkatan koordinasi dalam pencegahan karhutla.
- Melakukan pembangunan WC sehat
- Melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk menyatakan kualitas lingkungan hidup meningkat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara biasanya memantau beberapa komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 3.83
Realisasi Capaian Sasaran/Indikator Penunjang Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran / Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
			Target	Realisasi
1	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	70,1	69,78
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	70,79	84,58
2	Terjaganya Kawasan konservasi kewenangan kabupaten	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,54	64,88

- Indikator Indeks Kualitas Air pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditargetkan 70,10 dengan capaian sebesar 69,78 selisih 0,32 poin.
- Indikator Indeks Kualitas Udara pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditargetkan 70,79 dengan capaian sebesar 84,58 selisih 13,79 poin.
- Indikator Indeks Kualitas Lahan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditargetkan 64,54 dengan capaian sebesar 64,88 selisih 0,34 poin.

Program/kegiatan yang menunjang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut.

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Gambar 3.34
Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air dan Kualitas Udara Tahun 2025



b) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam rangka menurunkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengurangan emisi. Strategi pengurangan emisi merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan polutan lainnya di atmosfer. Jenis emisi adalah gas rumah kaca, polutan udara dan partikel padat yang masing-masing memiliki sumber dan dampak lingkungannya sendiri. Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O) dari bahan bakar fosil, peternakan, dan penggunaan pupuk berkontribusi signifikan

terhadap pemanasan global, perubahan iklim, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, mencairnya lapisan es di kutub dan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Teknik pengurangan emisi merupakan komponen penting dalam upaya seluruh dunia untuk memerangi perubahan iklim dan menjamin kelestarian lingkungan. Emisi Gas Rumah Kaca dapat dikurangi dengan menggunakan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan efisiensi energi, peralihan ke energi terbarukan, penerapan teknologi ramah lingkungan.

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin nyata dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam rangka mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan memenuhi komitmen nasional maupun internasional, pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) menjadi sangat penting. Inventarisasi gas rumah kaca dilakukan pada 5 (lima) sektor yaitu energi, industri, pertanian, kehutanan dan limbah. Tahun 2025 Disperkimh Kab. HSU tidak menganggarkan inventarisasi gas rumah kaca, jadi tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara memakai data provinsi.

Program yang menunjang kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut.

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- Program Pengelolaan Persampahan

Sasaran 5.2 : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana di ukur dengan indikator berikut.

Tabel 3.84
Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	N/A	N/A	0,68	0,70	0,66	94,28%



a. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2025, target Indeks Ketahanan Daerah ditetapkan sebesar 0,70. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 0,66, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 94,28%.

Meskipun capaian berada di bawah target yang ditetapkan (mengalami deviasi minus 0,04 poin dari target), persentase capaian di angka 94,28% ini secara umum masih masuk dalam kategori baik (mendekati target). Hal ini menunjukkan sebagian besar program penguatan ketahanan daerah berjalan sesuai rencana, meski belum mencapai titik optimal yang diharapkan.

b. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang bernilai 0,68, realisasi tahun 2025 yang bernilai 0,66 menunjukkan adanya sedikit penurunan sebesar 0,02 poin. Penurunan tren dari tahun sebelumnya ini memberikan sinyal perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor penyusun indeks ketahanan daerah (seperti aspek kapasitas daerah, kesiapsiagaan sistem, atau alokasi sumber daya) agar tren penurunan ini tidak berlanjut di periode berikutnya.

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Upaya yang dilaksanakan

- pelaksanaan program mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana Peningkatan;
- Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor;
- penerapan sistem, standar operasional prosedur, serta dokumen perencanaan kebencanaan; dan
- Peningkatan SDM pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang kebencanaan.

2) Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- keterbatasan jumlah dan kompetensi personel kebencanaan
- Beban kerja yang tinggi, rotasi pegawai, serta belum meratanya akses terhadap pelatihan dan sertifikasi.
- keterbatasan anggaran serta belum memadainya sarana dan prasarana kebencanaan
- koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam beberapa kondisi masih belum berjalan secara optimal.
- integrasi sistem informasi, maupun kapasitas SDM dalam pengelolaannya



- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atas risiko bahaya kebakaran.
- Terlambatnya pelayanan karena wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat dikarenakan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki unit pemadam untuk wilayah perairan.

3) Rencana Tindaklanjut

- Pelibatan Relawan dan Komunitas Siaga Bencana yang Terlatih.
- Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Risiko Bencana Serta Prioritas Kebutuhan Daerah.
- Penguatan Tata Kelola Kebencanaan.
- Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan yang Terintegrasi Antarperangkat Daerah.
- Harmonisasi Kebijakan Daerah Dengan Regulasi Yang Lebih Tinggi Secara Proaktif Dan Adaptif.
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
- Optimalisasi Sarana dan Prasarana Operasional
- Peningkatan Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait
- Penguatan Upaya Pencegahan melalui Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2025, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.85
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pendapatan Daerah	1.495.153.248.421,00	1.755.490.676.576,26	117,41
1.1	Pendapatan Asli Daerah	154.667.191.652,00	177.421.006.451,26	114,71
1.2	Pendapatan Transfer	1.340.486.056.769,00	1.532.458.002.610,00	114,32
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	45.611.667.515,00	0,00
2	Belanja Daerah	1.931.943.134.250,92	1.575.033.306.514,00	81,53
2.1	Belanja Operasi	1.266.955.331.299,92	1.008.566.917.205,00	79,61
2.2	Belanja Modal	392.298.655.159,00	310.342.757.125,00	79,11
2.3	Belanja Tidak Terduga	9.243.488.000,00	1.030.600.000,00	11,15
2.4	Belanja Transfer	263.445.659.792,00	255.093.032.184,00	96,83
	Surplus / Defisit	(436.789.885.829,92)	180.457.370.062,26	(41,31)
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	436.789.885.829,92	436.789.885.829,92	100,00
3.1.1	Penggunaan SILPA	436.789.885.829,92	436.789.885.829,92	100,0
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	436.789.885.829,92	436.789.885.829,92	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	617.247.255.892,18	0,00

Adapun Pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.86

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Meningkatkan Perekonomian yang Stabil	40.661.934.362	35.383.926.582	87,02
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	326.124.464.744	231.434.787.443	70,97
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur	288.663.620.917	218.189.143.345	75,59
4	Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi	304.527.069.852	277.497.804.123	91,12
5	Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resilensi Daerah	22.176.574.081	17.858.578.747	80,53

Sumber : Pena Sajiwa Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2029 dan LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

2. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja utama tujuan yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat diketahui dari capaian kinerja tujuan dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025, sebagai berikut.



Tabel 3.87
Efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Program Pendukung	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	(%)
MISI 1. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing						
1	Meningkatkan Perekonomian yang Stabil - Laju Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Perkapita - Indeks Gini	3	1. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 4. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 5. program perizinan usaha pertanian 6. program penyuluhan pertanian 7. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 8. program pengelolaan perikanan tangkap 9. program pengelolaan perikanan budidaya 10. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 11. program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan kedaulatan dan kemandirian 12. program penanganan kerawanan pangan 13. program pengawasan keamanan pangan 14. program perizinan dan pendaftaran perusahaan 15. program peningkatan sarana distribusi perdagangan 16. program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 17. program standardisasi dan perlindungan konsumen 18. program pengembangan ekspor 19. program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 20. program perencanaan dan pembangunan industri 21. program pengendalian izin usaha industri 22. program pengelolaan sistem informasi industri nasional 23. program pengembangan iklim penanaman modal	80,24	35.383.926.582	87,02



No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Program Pendukung	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	(%)
			24. program promosi penanaman modal 25. program pelayanan penanaman modal 26. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 27. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 28. program pengembangan umkm 29. program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) 30. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 31. program pemasaran pariwisata 32. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 33. program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 34. program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi 35. program pendidikan dan latihan perkoperasian 36. program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 37. program pemberdayaan sosial 38. program rehabilitasi sosial 39. program perlindungan dan jaminan sosial 40. program pengelolaan taman makam pahlawan 41. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 42. program penempatan tenaga kerja 43. program hubungan industrial 44. program penataan desa 45. program peningkatan kerja sama desa 46. program administrasi pemerintahan desa 47. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 48. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 49. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			



No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Program Pendukung	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	(%)
MISI 2. Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak dan Bebas Narkoba						
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia - Indeks Pembangunan Manusia	1	1. program pengelolaan pendidikan 2. program pendidik dan tenaga kependidikan 3. program pengembangan kurikulum 4. program pengembangan kebudayaan 5. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 6. program pembinaan perpustakaan 7. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 8. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 9. program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 10. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 11. program pengendalian penduduk 12. program pembinaan keluarga berencana (kb) 13. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) 14. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 15. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 16. program perlindungan perempuan 17. program peningkatan kualitas keluarga 18. program pengelolaan sistem data gender dan anak 19. program pemenuhan hak anak (pha) 20. program perlindungan khusus anak 21. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 22. program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 23. program pengembangan kapasitas kepramukaan 24. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 25. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 26. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan	4.13	231.434.787.443	70,97



No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Program Pendukung	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	(%)
			politik dan pengembangan etika serta budaya politik 27. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 28. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 29. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 30. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
MISI 3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah						
3	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar - <i>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur</i>	1	1. Program pengelolaan sumber daya air (sda) 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 5. Program penataan bangunan gedung 6. Program penataan bangunan dan lingkungannya 7. Program penyelenggaraan jalan 8. Program penyelesaian sengketa tanah garapan 9. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 10. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 11. Program pengembangan perumahan 12. Program kawasan permukiman 13. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 14. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) 15. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) 16. Program pengelolaan pelayaran	0 (data masih dalam proses)	218.189.143.345	75,59
MISI 4. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik						



No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Program Pendukung	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	(%)
4	Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi - <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	1	1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program riset dan inovasi daerah 4. Program pengelolaan keuangan daerah 5. Program pengelolaan barang milik daerah 6. Program penyelenggaraan pengawasan 7. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 8. Program pengelolaan pendapatan daerah 9. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 10. Program pengelolaan aplikasi informatika 11. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 12. Program penyelenggaraan statistik sektoral 13. Program pendaftaran penduduk 14. Program pencatatan sipil 15. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan 16. Program pengelolaan profil kependudukan 17. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno 18. Program pengelolaan arsip 19. Program perlindungan dan penyelamatan arsip 20. Program perekonomian dan pembangunan 21. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 22. Program kepegawaian daerah 23. Program pengembangan sumber daya manusia	108,3	277.497.804.123	91,12
MISI 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Risiko Bencana						
5	Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resilensi Daerah	1	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	0 (data masih dalam proses)	17.858.578.747	80.53



No	Misi/Tujuan/Indikator	Jumlah Indikator	Program Pendukung	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	(%)
	- <i>Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca</i>		4. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) 5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) 6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 8. Program pengelolaan persampahan 9. Program penanggulangan bencana 10. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 11. Program penanganan bencana			

Sumber : Pena Sajiwa Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2029, 2025



Dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antar misi. Misi 4 menjadi contoh praktik terbaik dengan efektivitas tinggi, sementara Misi 2 menunjukkan perlunya evaluasi mendalam. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam ketersediaan data kinerja pada beberapa misi.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih perlu melakukan penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja RPD 2023-2025

Tingkat capaian indikator kinerja utama RPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai rata-rata capaian sebesar 102,25% dan predikat “Sangat Berhasil”. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang efektif.

Tabel 4. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama RPD Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Tujuan : 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,64	72.67	107,4	Sangat Berhasil
Tujuan : 2. Meningkatkan perekonomian daerah						
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,50	5.02	91,27	Berhasil
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp.	20.992,89	29.878,92	142,32	Sangat Berhasil
3	PDRB Perkapita ADHK	Rp.	13.964,36	16.970**	121,52	Sangat Berhasil
Tujuan : 3. Menurunnya angka kemiskinan						
1	Persentase kemiskinan	Persen	6,53	4,81	126,34	Sangat Berhasil
Tujuan : 4. Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar						
1	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks	41-60 (cukup)	21-40 (sedang)	60,4	Kurang Berhasil
Tujuan : 5. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65 (B)	76.16*	117,16	Sangat Berhasil
Tujuan : 6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,97	74.70	109,9	Sangat Berhasil
Rata – rata					109,5	Sangat Berhasil



➤ **Tujuan 1: Meningkatnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target 67,64 terealisasi 72,67 (107,4%) → *Sangat Berhasil*, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia relatif stabil meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

➤ **Tujuan 2: Meningkatnya Perekonomian Daerah**

Seluruh indikator pada tujuan ini menunjukkan capaian sebagai berikut.

- Laju Pertumbuhan Ekonomi terealisasi dengan capaian 91,27% → pertumbuhan ekonomi mendekati target yang ditetapkan.
- PDRB Perkapita ADHB terealisasi dengan capaian 142,32% → peningkatan signifikan pendapatan masyarakat.
- PDRB Perkapita ADHK terealisasi dengan capaian 121,52% → menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi yang kuat.

Hal ini menandakan bahwa sektor ekonomi daerah mengalami akselerasi pertumbuhan yang sangat baik.

➤ **Tujuan 3: Menurunnya Angka Kemiskinan**

- Persentase Kemiskinan Target 6,53% terealisasi 4,81% (126,34%) → *Sangat Berhasil*. Penurunan angka kemiskinan yang melampaui target menunjukkan keberhasilan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

➤ **Tujuan 4: Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar**

- Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar

Target 41-60 (cukup) terealisasi 21-40 (sedang) dengan tingkat capaian 60,4% → *Kurang Berhasil*. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar.

➤ **Tujuan 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**

- Indeks Reformasi Birokrasi

Target 65 (B) terealisasi 76,16* (117,16%) → *Sangat Berhasil*, capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

➤ **Tujuan 6: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target 67,97 terealisasi 74,70 (109,9%) → *Sangat Berhasil*, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan.



Capaian kinerja Tahun 2025 dalam kerangka RPD 2023–2026 menunjukkan rata-rata capaian “sangat berhasil”, dengan mayoritas indikator melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif dan berada pada jalur yang tepat.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek ketersediaan data dan pengukuran kinerja, khususnya pada sektor infrastruktur yang perlu segera diperbaiki agar kualitas akuntabilitas kinerja semakin meningkat.

2. Capaian Kinerja RPJMD 2025-2029

Tingkat capaian indikator kinerja utama RPJMD Tahun 2025 menunjukkan rata-rata predikat capaian “sangat berhasil”, dengan dominasi capaian lebih dari 100%, meskipun ada beberapa indikator yang masih dalam proses penghitungan. Adapun rincian pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Tujuan : 1. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Stabil						
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.52	5.02	111,06	Sangat Berhasil
2.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	28.42	29,88**	105,14	Sangat Berhasil
3.	Indeks Gini	Persen	0.26	0.276**	93,85	Berhasil
Tujuan : 2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia						
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.79	72.67	99,84	Berhasil
Tujuan : 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar						
1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3.63	-	-	*sedang proses perhitungan
Tujuan : 4. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.34	76.16*	108,27	Sangat Berhasil
Tujuan : 5. Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resilensi Daerah						
1.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks	2,21	-	-	*sedang proses perhitungan
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,67	52,63	146,12	Sangat Berhasil
Rata – rata					110,7	Sangat Berhasil



➤ **Tujuan 1: Meningkatkan Perekonomian yang Stabil**

Kinerja pada tujuan ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rincian:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Target 4,52% terealisasi 5,02% (111,06%) → *Sangat Berhasil*
- PDRB Perkapita Target 28,42 Juta Rupiah terealisasi 29,88** Juta Rupiah (105,14%) → *Sangat Berhasil*
- Indeks Gini dengan target 0,26 terealisasi 0,276** (93,85%) → *Berhasil*

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang positif dan relatif merata.

➤ **Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target 72,79 terealisasi 72,67 (99,84%) → *Berhasil*. Capaian ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang stabil dan hampir mencapai target.

➤ **Tujuan 3: Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar**

Realisasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur belum tersedia (*dalam proses perhitungan*). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengukuran kinerja, sehingga efektivitas pembangunan belum dapat dievaluasi secara optimal.

➤ **Tujuan 4: Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi Target 70,34 terealisasi 76,16* (108,27%) → *Sangat Berhasil*. Ini merupakan salah satu capaian terbaik, mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas.

➤ **Tujuan 5: Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Resiliensi Daerah Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

- Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Realisasi Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca juga belum tersedia (*dalam proses perhitungan*).

- Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dengan target 97,67 terealisasi 52,63 (146,12%) → *Sangat Berhasil*. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan upaya pengurangan risiko bencana telah berjalan sangat baik dan melampaui target kinerja yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Periode RPJMD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan beberapa indikator utama mencapai kategori sangat berhasil, khususnya pada sektor ekonomi dan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek pengukuran kinerja dan capaian indikator tertentu yang belum tersedia. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas data, konsistensi pengukuran, dan efektivitas program, agar capaian kinerja dapat



meningkat dan mendukung terwujudnya target RPJMD secara optimal.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

1. RPD 2023 – 2026

Secara umum, capaian indikator menunjukkan predikat “Sangat Berhasil” (109,5%), namun masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu ditangani, khususnya pada:

- Kualitas SDM yang belum melampaui target
- Ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)
- Indikator infrastruktur yang belum terukur

Ke depan, penyelesaian isu diarahkan pada:

- penguatan kualitas kebijakan,
- peningkatan integrasi program, dan
- perbaikan sistem akuntabilitas kinerja, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan.

2. RPJMD 2025 – 2029

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil cukup berhasil (77,84%), namun terdapat isu strategis utama pada:

- Ketimpangan ekonomi
- Kualitas SDM yang belum progresif
- Kelemahan pengukuran kinerja (infrastruktur & lingkungan)

Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada:

- penguatan kualitas data,
- pembangunan yang lebih inklusif, dan
- peningkatan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja, sehingga dapat mendorong peningkatan capaian kinerja menjadi kategori “Berhasil” atau “Sangat Berhasil” pada tahun berikutnya.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kontribusi dari berbagai pihak baik pimpinan, aparat pemerintah dan pihak lain seperti swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga sinergi seluruh elemen masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sehingga penting untuk dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan dalam capaian kinerja pemerintah.



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan tentang apa yang telah dilakukan dan yang harus dilakukan pada masa mendatang, sehingga pembangunan terus berkelanjutan, sesuai arah yang telah ditentukan. Masukan dan saran menjadi penting untuk perbaikan yang akan datang.



LAMPIRAN

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025



KESEHATAN, PEMERINTAHAN, SOSIAL KEMASYARAKATAN

HSU Raih 5 Penghargaan pada Penutupan Jambore Kader Posyandu se-Kalimantan Selatan

25th September 2025

Banjarmasin, 24 September 2025 – Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hj. Murniati Sahrujani, menghadiri penutupan Jambore Kader Posyandu bidang kesehatan se-Kalimantan Selatan yang digelar di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu...



PEMERINTAHAN

Bupati HSU H. Sahrujani Terima Penghargaan dari Kanwil Ditjen Pemasarakatan Kalsel

19th November 2025

BANJARMASIN – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H. Sahrujani, menerima penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, Rabu (19/11) bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Penghargaan tersebut diberikan...



KESEHATAN, PEMERINTAHAN

PEMKAB HSU TERIMA PENGHARGAAN BPOM ATAS KOMITMEN DUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEAMANAN PANGAN TERPADU

8th December 2025

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan peran aktif dalam pelaksanaan program prioritas nasional keamanan pangan terpadu. Penghargaan tersebut...



EKONOMI, PEMERINTAHAN

Bupati HSU Hadiri Hari Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel 2025, Kabupaten HSU Raih 2 Penghargaan

16th December 2025

A muntai – Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Sahrujani, menghadiri Hari Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Idham Chalid, Selasa (16/12/2025). Kegiatan...



PEMERINTAHAN

PEMKAB HSU RAIH NOMINASI KABUPATEN SANGAT INOVATIF UNTUK KETIGA KALINYA PADA IGA AWARD 2025

10th December 2025

J AKARTA — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12), Pemkab HSU...



BUDAYA, KESEHATAN, PEMERINTAHAN, SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bupati HSU H. Sahrujani Bangga !!! Desa Kotaraja Raih Juara 1 Nasional Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2025 Wilayah Tengah

21st October 2025

H ulu Sungai Utara- Prestasi membanggakan diraih Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa Kotaraja berhasil meraih Juara 1 Nasional Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2025 Wilayah Tengah. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan...



KEAGAMAAN, PEMERINTAHAN

Bupati HSU H. Sahrujani Raih BKPRMI Award 2025.

14th September 2025

Amuntai. Bupati HSU H. Sahrujani atau yang akrab disapa H. Jani, berhasil menorehkan prestasi di kancah nasional. Ia meraih BKPRMI Award 2025 dalam kategori Pejabat dan Pimpinan Daerah Peduli BKPRMI Tingkat Nasional. Penghargaan...

[READ MORE](#)


PEMERINTAHAN

PEMKAB HSU RAIH PERINGKAT III INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) SE-KALSEL

9th January 2025

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Raih Peringkat III Terbaik Dalam Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin, bertempat di hotel Harper banjarmasin kegiatan tersebut di ikuti seluruh 13 kabupaten/kota...